

PRABOWO 2 PERIODE ZULHAS ATAU PURBAYA?



6 JURUS
PURBAYA
KEJAR TARGET
PAJAK

KABINET
PRABOWO
KIAN
GEMUK

MAJU MUNDUR
JANJI KOMITE
REFORMASI
POLRI

TANTANGAN
PPP
SETELAH
REKONSILIASI

PORNAS XVII
KORPRI DI SUMSEL
PECAHKAN REKOR
NASIONAL

KEPALA DAERAH
DAN WAKILNYA
MULAI TAK
HARMONIS



Rp75.000,-

LAUTAN AWAN DARI
PUNCAK GUNUNG DEMPO
PAGAR ALAM



info indonesia

www.infoindonesia.id

Network

INOVASI UNTUK NEGERI



INFO PASANG
NUR AISAH
+ 62 815-1157-6312
IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat

Koran Cetak Info Indonesia



www.infoindonesia.id
facebook @infoindonesia.id twitter @_infoindonesia
Instagram @info_indonesia.id YouTube : infoindonesiatv

JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
Email : redaksi@infoindonesia.id

 **info indonesia** iNOVASI UNTUK NEGERI

Selamat Hari
**SUMPAH
PEMUDA**
28 OKTOBER 2025



EDISI
BULAN
OKTOBER
2025

DAFTAR ISI



7

INFO UTAMA

Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2025, apa saja yang layak menjadi perhatian? Ekonomi dan politik tentu saja dua faktor yang paling menentukan.



22

INFO SUMSEL

Provinsi Sumatera Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pertanian. Di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Herman Deru, Sumsel mencatat kenaikan produksi beras dan gabah tertinggi di Indonesia pada periode Januari–November 2024.



34

INFO DAERAH

Gubernur Banten Andra Soni mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kegiatan penanaman jagung serentak kuartal IV tahun 2025 yang digelar di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Rabu 8 Oktober 2025.



50

INFO EKONOMI

Pemerintah mengebut berbagai langkah hasil cepat atau quick win untuk mengejar penerimaan pajak 2025 yang masih jauh dari target. Namun, proyeksi tren melemahnya penerimaan, celah kepatuhan wajib pajak, serta potensi terpengkasnya setoran akibat kebijakan insentif, membayangi kerja otoritas fiskal dalam capai target APBN 2025.



66

INFO ISTANA

Menjelang setahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto kembali menambah jumlah anggota Kabinet Merah Putih.



68

INFO NASIONAL

Mantan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin sedang diperjuangkan untuk mendapat amnesti dan abolisi dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Kontribusinya terhadap bangsa sangat besar karena mengangkat citra positif Indonesia di mata dunia melalui olahraga dan event-event internasional di Sumatera Selatan.



87

INFO KHUSUS

Angka inflasi (kenaikan harga) di tingkat provinsi, kabupaten dan kota menjadi sorotan. Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan sejumlah fakta.

3 DARI REDAKSI

20 OPINI

44 INFO WISATA

46 INFO KESEHATAN

48 INFO OLAHRAGA

86 KAJI

74

INFO NASIONAL

Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah satu tahun bekerja tergolong tinggi. Menurut survei Index Politica, 83,5 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.



100

Talbah kita pada 100 hari terakhir 2025. Hitungan seratus dalam bahasa, sata(m) Sansekerta, satus (Jawa), untuk harian sudah dikenal lama pula secara global. Sejak peradaban manusia mengenal domestikasi tumbuhan menjadi budidaya tanaman pangan yang siap panen dalam waktu 100 hari. Apalagi di wilayah empat musim yang setiap musimnya berlangsung mendekati 100 hari.

Bahkan hingga saat artificial intelligence, teknologi kecerdasan imitasi atau buatan yang meniru hingga melampaui kemampuan fisik manusia, kita masih mengenal hitungan 100 harian. Entah kita menyebutnya kuartal (dari quarter, seperempat), atau triwulan (tiga bulan mendekati 100 hari). Semuanya mengarah pada upaya memahami dan, lebih penting lagi, untuk mengatasi masalah yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kita sebagai manusia.

Mulai saja sebagai manusia sebagai perorangan, individu, pribadi. Kemudian masalah bersama di lingkaran lembaga terkecil: keluarga, lanjut lingkaran lebih besar: organisasi atau lembaga tempat kita mencurahkan banyak waktu dan tenaga sehari-hari, apakah sekolah, bekerja, mengabdikan, atau ranah lainnya hingga lembaga lebih besar yang dikenal sebagai negara. Lebih dari itu, kita juga berada di ranah yang lebih luas lagi dalam komunitas global. Masing-masing, sejak wilayah pribadi hingga kawasan global, kita menghadapi masalah atau tantangan untuk diatasi. Tak jarang urusan pribadi hingga masalah global saling terkait satu sama lain, terlebih teknologi informasi dan komunikasi memungkinkannya.

Tinggal kita saja menentukan prioritas hendak menyelesaikan dulu persoalan mana. Prioritas itu biasanya terkait dengan peran masing-masing kita di setiap lembaga. Apakah kita ingin lebih dulu menyelesaikan masalah kesehatan pribadi, atau masalah bersama seperti makan bergizi gratis, korupsi yang bagaikan tanpa jeda, atau masalah lainnya.

Dari komunitas global yang berhimpun di Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nations General Assembly) di New York pada Selasa, 23 September 2025 lalu, ya awal dari 100 hari terakhir tahun berjalan, kita dapat menyimak persoalan bersama umat manusia: setidaknya perubahan iklim yang berdampak pada masalah pangan, energi, dan air, juga benturan kepentingan yang menyertainya. Agaknya 4-5 masalah global tadi akan berdampak dan menjadi masalah pula di tingkat negara, lembaga, keluarga, hingga pribadi kita dalam skala yang berbeda-beda.

Masalah pangan pokok (staple food) kita, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi: masa tanam, perawatan, pemupukan, gangguan hama hingga panen padi, berlanjut dengan penggilingan, pengemasan, dan penyaluran beras, tambah pula konsumsinya hingga soal makan bergizi gratis untuk anak-anak generasi penerus kita. Masih ada pula masalah kualitas hygiene dan sanitasi serta dampak kesehatan pula jika kita melihat kasus-kasus keracunan siswa yang mengkonsumsi MBG. Belum lagi soal energi yang terwujud dalam stok bahan bakar dan kemampuan daya beli, serta hasil konsumsi untuk pribadi hingga negara, juga dampak positif-negatif terhadap perubahan iklim.

Nah, dalam 100 hari terakhir 2025, tersedia waktu untuk menyusun rencana dan target mengatasi masalah yang alangkah banyak jika dirinci cabang-cabangnya. Toh keberhasilan mencapai target sesuai dengan rencana kita kenal sebagai sukses, berhasil. Silakan sukses 0 hingga 100 persen, Kita masih punya kesempatan. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

- TELP 021-791 96781
- FAX 021-791 96786

Twitter : @Infoindonesia

Facebook : infoindonesia.id

Instagram : @infoindonesia.idn

Email : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

PENDIRI: Usman Rizal
DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM: Rusdiyono
PEMIMPIN PERUSAHAAN: Nur Aisah
PEMIMPIN REDAKSI: Gunawan Effendi
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rahmad Romli
REDAKTUR PELAKSANA: Irma Yani
REDAKTUR : Melati Tagore, Nina Erlina, Ega Tri Gustina
REPORTER: Mario CH, Budi Prasetya, Indra Hadi, Muhammad Moeslim, Reno, Rasmiadi, Ida Iryani, Yadhi, Muhammad Fikri
EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali
KEUANGAN: Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI :** Nur Aisah
PENGEMBANGAN BISNIS: Ega Tri Gustin, Nur Aisah **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar
BANK ACCOUNT: A/N PT. Wahana Multimedia, BCA No Rek: 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



SATU TAHUN PRABOWO, MAKIN NGE GAS

Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2025, apa saja yang layak menjadi perhatian? Ekonomi dan politik tentu saja dua faktor yang paling menentukan.



Yang semakin jelas, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerapkan kebijakan populis. Pengertian sederhana politik populis adalah prioritas kebijakan yang mengutamakan rakyat kebanyakan dan sering kali berhadapan dengan kalangan yang mendapat keis-

ing kali menghadapi kritik para ekonom terkait kesinambungan fiskal, dampak jangka panjang, juga pemanfaatannya untuk kepentingan politik, termasuk pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, maupun kepala daerah.

Untuk kesinambungan fiskal (anggaran), reaksi terhadap kebijakan pengurangan transfer ke daerah (TKD)

penurunan anggaran TKD 2026 telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan kepala daerah. Menurutnya, pemangkasan TKD berdampak langsung pada belanja daerah dan berpotensi mengganggu roda pemerintahan. "Kami hari ini dari APPSI, sengaja meminta waktu Pak Menteri untuk kami bercerita tentang keluh kesah kami di daerah, karena dengan TKD yang dikirim ke daerah luar biasa turunnya. Nah daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari TKD itu sendiri," ujarnya.

Dalam audiensi dengan Menteri Keuangan, Haris menegaskan bahwa banyak kepala daerah merasakan beban berat akibat pemotongan ini. Ia mencontohkan, di Provinsi Jambi alokasi TKD menurun tajam dari Rp4,6 triliun pada 2025 menjadi Rp3,1 triliun di tahun 2026, menyusul pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan tunda salur.

"Di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar KPP (kartu kredit pemerintah). Personal belanja pegawai besar sekali, apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya, ini luar biasa berdampak terhadap APBD kami pada 2026," ujarnya.

Salah satu perwakilan, Sherly Tjoanda, yang juga Gubernur Maluku Utara mengatakan pertemuan itu menegaskan sikap para Kepala Daerah yang disebutnya tidak menyetujui pemotongan TKD 2026 mendatang. "Semuanya tidak setuju," ujar Sherly kepada wartawan di Gedung Pusat Kemenkeu usai pertemuan itu.

Sherly mengaku pemangkasan TKD itu akan membebani kerja sejumlah Pemda yang meliputi pembangunan infrastruktur seperti jembatan, hingga gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dia juga mengatakan jika pemangkasan TKD itu juga otomatis berdampak kepada pengurangan APBD di kisaran 20-60 persen. "Itu berat untuk pembangunan infrastruktur," ungkapnya.

"Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat ke Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan. Karena dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur, jalan,



timewaan dan mapan namun korup.

Lebih dari itu, kebijakan politik populis terletak pada fokusnya yang kuat pada rakyat dan penyampaian manfaat yang cepat dan terlihat untuk mendapatkan dukungan politik. Toh meskipun dapat memberikan manfaat langsung dan meningkatkan kesejahteraan dalam jangka pendek, kebijakan ini juga ser-

tampak dalam kedatangan belasan gubernur menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa, 7 Oktober 2025. Pertemuan antara menkeu Purbaya dan belasan kepala daerah itu membahas antara lain soal pemangkasan transfer ke daerah (TKD).

Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris, menyatakan bahwa

jembatan itu menjadi berkurang sehingga kita minta untuk jangan ada pemotongan,” kata Sherly.

Ia mengaku Provinsi Maluku Utara mendapat TKD Rp 6,7 triliun di 2026, turun dari pagu 2025 yang mencapai Rp 10 triliun. Potongan terbesar berada pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH).

“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk

tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” tegas Muzakir.

Sebagai tanggapannya, Menkeu Purbaya mengatakan sikap para gubernur yang mendatangnya itu normal karena anggaran yang diberikan lebih kecil. Tapi, ia meminta Pemda memperbaiki dahulu kinerja belanja yang selama ini dicap kurang bagus.

“Semuanya tergantung kepada kepala daerahnya lagi nanti ke depan-

Jumlah itu sudah ditambah dari sebelumnya Rp 650 triliun, namun masih lebih rendah dari alokasi 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun.

Purbaya mengakui pemotongan itu cukup besar. Dengan demikian, ia membuka kemungkinan untuk menambah anggaran ke daerah jika pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara bagus. “Saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026. Kalau



pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70 persen, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” sambungnya.

Keluhan serupa disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang anggaran daerahnya dipotong hingga 25 persen pada 2026. Ia berharap ada evaluasi dari Purbaya agar pertumbuhan ekonomi bisa jalan seperti yang diharapkan. “Semuanya kami mengusulkan supaya

nya. Saya kan pemerintahan baru, image mereka kan kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas kelihatannya. Jadi kalau mereka bisa memperbaiki image itu, ya nggak ada keberatan,” kata Purbaya.

Kalau mereka mau bangun daerahnya, lanjut Purbaya, kan harusnya dari dulu sudah bagus, anggarannya nggak ada yang hilang sana-sini. Salah satu concern di sana adalah banyak melasetnya,” tambahnya.

Memang, TKD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diputuskan sebesar Rp 693 triliun.

memang ekonominya sudah bagus, pendapatan pajaknya naik, core tax lebih bagus, bea cukai nggak ada bocor, pajaknya nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan? Kalau naik semua, kita bagi,” tandas Purbaya.

Sedangkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengemukakan, kebijakan pemerintah bukanlah pemangkasan TKD, melainkan penyesuaian dalam tata kelola anggaran agar lebih efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat. Ia juga menyebut kedatangan para gubernur itu bukanlah penggerudukan.

• INFO UTAMA

"Bukan menggeruduklah itu, bukan, mereka menyampaikanlah. Menyampaikan apa yang menjadi dinamika dan kemarin sudah kita terima. Diterima oleh Menteri Keuangan, kemudian diterima juga oleh Mendagri, dan kita berikan pemahaman bersama, penjelasan bersama bahwa sesungguhnya yang berkenaan dengan masalah transfer ke dae-

dalam bentuk program-program nasional yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Program tersebut juga dinikmati oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya menerima TKD langsung.

"Transfer ke daerah yang tidak langsung itu adalah yang dari pemerintah

kurang lebih di dalam satu tahun berjalan ya tahun depan itu kan di Rp 335 triliun. Nah ini kan dinikmati juga oleh seluruh daerah kan begitu," jelasnya.

Menanggapi keluhan sejumlah kepala daerah yang menilai program-program pusat tersebut bukan berasal dari inisiatif mereka, Prasetyo menilai penting untuk menyamakan persepsi agar arah kebijakan anggaran tetap terintegrasi dan sejalan dengan kepentingan publik. "Ya itulah kemudian yang diberikan pemahaman dan penjelasan, oleh sekarang ini kita bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, nanti pemerintah daerah, mari kita perbaiki tata kelola anggaran kita supaya semua kita desain untuk program-program yang memang betul-betul berdampak kepada kepentingan masyarakat," tandasnya.

Sedangkan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengemukakan agar kepala daerah untuk tidak bersikap pesimistis atau menolak secara langsung kebijakan pengurangan anggaran. Menurut dia, masalah pemborosan anggaran masih terjadi di berbagai daerah, sehingga setiap kepala daerah perlu introspeksi diri.

"Jangan kemudian menjadi pesimistis, dan langsung resisten ketika melihat dampak. Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan dan ketidakefisienan, yang akhirnya kerap berujung masalah hukum," kata Tito di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis, 9 Oktober 2025.

Menurut Tito, praktik pemborosan anggaran telah menyebabkan beberapa kepala daerah terkena operasi tangkapan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, Mendagri menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, efektif, dan efisien. "Kena OTT, masuk penjara, dan lain-lain. Efektifkan, efisienkan dahulu. Tepat sasaran, efisienkan. Kalau ada masalah, nanti kita terbuka dan bicarakan," jelasnya.

Mendagri menjelaskan, Menkeu Purbaya juga mendorong kepala daerah untuk melakukan exercise atau simulasi pengelolaan anggaran berdasarkan TKD yang dipangkas, sehingga daerah yang benar-benar kesulitan dapat dicari solusi. "Pak Purbaya menyampaikan, exercise dahulu. Silakan, nanti kita lihat



rah ini kan sekarang dibagi menjadi dua, transfer ke daerah langsung dan transfer ke daerah tidak langsung," ujar Prasetyo di Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2025

Prasetyo menambahkan, transfer ke daerah tidak langsung kini diwujudkan

pusat dalam bentuk program-program. Yang itu penerimanya adalah juga semua masyarakat di daerah-daerah gitu lho. Salah satunya misalnya contoh program makan bergizi gratis, itu kan kalau dihitung dari budget di APBN-nya itu kan

daerah yang betul-betul kesulitan,” tambah Tito.

Dari kalangan wakil rakyat, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengemukakan para Gubernur perlu berinovasi terkait pemotongan TKD. Doli berharap setiap Pemda nantinya juga perlu berinovasi untuk meningkatkan pendapatan. “Kita sama-sama mengetahui bahwa sekitar 80 persen daerah saat ini sangat tergantung dengan keuangan transfer dari pusat. Itu satu situasi realitas yang terjadi. Kemudian, tentu kita semua punya keingi-

merumuskan ulang terkait kebijakan penerapan daerah dan otonomi daerah kita,” ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mendorong adanya perbaikan tata kelola keuangan daerah. Hal ini merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa kerap terjadi kebocoran anggaran di daerah. “Mungkin dari sisi tata kelolanya kita perlu perbaiki yang selama ini penerimaan itu sering bocor Pak Prabowo kan selalu bilang begitu lalu belanja juga sering bocor gimana itu tidak terjadi lagi,”

gun pagar antar kantor. “Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh program kegiatan yang sebenarnya itu apa namanya bisa dalam kategori tidak tepat lah Termasuk pemborosan maka bisa tuh rasionalisasi lah itu efektifan lagi lah itu,” ungkap Zulfikar.

Nah, sejauh ini, menjelang satu tahun pemerintahan presiden Prabowo dan Wapres Gibran belum bergeser dari kebijakan populisnya termasuk menekankan efektivitas dan efisiensi anggaran. Sebagaimana penjelasan Menkeu Purabaya, pemotongan TKD merupakan ba-



nan, dan saya kira ini yang juga menjadi visi Presiden kita, bahwa situasi ke depan setiap pemerintah daerah harus semakin mandiri,” kata Doli kepada wartawan, Rabu, 8 Oktober 2025.

Doli juga mengemukakan para pemimpin daerah perlu melakukan mitigasi jika pendapatan utama daerah tersebut dipotong. Ia menekankan adanya kreativitas dalam rangka memperoleh pendapatan pengganti. “Dalam konteks ini, mungkin pendekatannya, selain perlu ditingkatkan daya inovasi dan kreativitas pemerintah daerahnya, mungkin juga perlu di-review beberapa regulasi, khususnya tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan beberapa lainnya. Dalam jangka panjang, kita semua perlu

kata Zulfikar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.

Politisi Partai Golkar melihat perlu rasionalisasi dan efektivitas program dan kebijakan pemerintah daerah. Dan anggaran Pemda harus betul-betul digunakan untuk program prioritas untuk masyarakat. “Lalu kita perlu juga merasionalisasi, mengefektifkan program dan kebijakan-kebijakan dan program itu harus benar-benar yang memang dibutuhkan betul oleh masyarakat yang prioritas,” ujarnya.

Zulfikar pun mencontohkan kasus penggunaan anggaran daerah yang tidak sesuai. Seperti untuk membangun kantor pemerintahan di daerah, ada tambahan anggaran untuk memban-

gian dari upaya rasionalisasi anggaran secara nasional. Ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus berkesinambungan dan sesuai dengan kondisi keuangan negara.

Toh pemerintah pusat sebenarnya telah menyepakati peningkatan alokasi TKD tahun 2026 menjadi Rp 692,99 triliun, setelah sebelumnya sempat diusulkan Rp 649,99 triliun. Namun, peningkatan ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp 919 triliun.

Akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik akan memungkinkan alokasi anggaran yang meningkat di berbagai sektor, terlepas pilihan kebijakan populis atau bukan. ● Editor: GE



PAPUA DAN WAPRES GIBRAN

Masih berkaitan dengan daerah, Presiden melantik Ketua dan Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Apa kaitannya dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka?

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan, pelantikan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua amanat dari UU Otonomi Khusus Papua. "Yang hari ini dilantik adalah ketua dan anggota dari komite eksekutif tersebut yang akan bantu kerja badan pengarah yang diketuai Wapres," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025.

Prasetyo mengatakan Komite tersebut didirikan untuk membantu kerja dari Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BKP3) sebagaimana yang diamanatkan UU Otsus Papua. "Jadi begini, sesuai dengan UU Otsus itu, kan ada yang disebut badan pengarah percepatan pembangunan Otsus Papua. Itu mengamanatkan membantu badan ini, maka dibentuk komite eksekutif," ucapnya.

Sekadar mengingatkan, Wakil Pres-

iden sebelumnya, Ma'ruf Amin juga memimpin Badan Percepatan Pembangunan Papua. Boleh bilang ini merupakan kesinambungan tugas Wakil Presiden di periode sebelumnya.

Presiden Prabowo melantik Velix Vernando Wanggai sebagai Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua. Dalam menjalankan tugasnya, Velix dibantu sembilan anggota yang terdiri dari Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, John Wetipo, Letjen Purn Ali Hamdan Bogra, John Gebze, Billy Mambrasar, Ribka Haluk, Yanni, dan Juharson Estrella Sihalale.

Velix Wanggai pernah menjadi staf khusus bagi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Deputy di Sekretariat Wakil Presiden era Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin. Ribka Haluk menjadi anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua masih menjabat Wakil Mend-

agri. Sedangkan John Wempi Wetipo pernah menjabat Wakil Menteri Dalam Negeri serta Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, ada pula sosok selebritis Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale yang masuk dalam komite ini.

Beriringan dengan itu, Presiden Prabowo juga melantik Akhmad Wiyagus menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Dengan pelantikan Akhmad Wiyagus, jajaran Wamendagri kini diisi oleh Bima Arya, Ribka Haluk, dan Akhmad Wiyagus.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengemukakan, dengan tiga Wamendagri, pembagian tugasnya akan mengikuti pembagian zona waktu Indonesia, barat, tengah, dan timur. Wamendagri pertama akan menangani Jawa dan Sumatera, yang kedua bertanggung jawab atas Kalimantan dan Sulawesi, sedangkan satu lainnya akan fokus di wilayah Maluku, Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara.

"Jadi saya tinggal bagi tugas saja nanti. Tiga wamen, ada nanti yang koordinator bagian barat, bagian tengah dan bagian timur," ungkap Tito.

Ia menambahkan, kehadiran tiga wakil menteri justru membuat koordinasi Kemendagri semakin efisien mengingat luasnya cakupan wilayah pemerintahan. Menurut Tito, ketiga wakilnya akan diberi mandat untuk turun langsung ke daerah, terutama wilayah yang menghadapi persoalan serius seperti inflasi tinggi, kemiskinan, dan ketimpangan pembangunan. Ia menilai pendekatan langsung di lapangan penting untuk memastikan kebijakan pusat berjalan efektif.

"Mereka nanti akan saya tugaskan untuk berkunjung mendatangi daerah-daerah itu, yang misalnya inflasinya tinggi, yang kemiskinannya tinggi, yang punya problema, yang saya enggak akan mungkin sempat kalau sendiri," jelas Tito.

Sedangkan Velix menyebut pembentukan komite itu karena Prabowo ingin komite tersebut dapat mengelola secara khusus agenda pembangunan di Papua. Menurut dia, langkah awal yang akan dilakukannya adalah melakukan konsolidasi kebijakan dan strategi di Papua.

Terlebih, sambungnya, Papua kini memiliki enam provinsi yang memerlukan keterpaduan dalam segala aspek. "Karena tentu kita ingin dengan kehadiran enam provinsi, ini membutuhkan langkah-langkah dan maksud besar itu langkah-langkah percepatan," ujarnya.

Velix juga mengemukakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap tata kelola pembangunan Papua secara langsung dan berkesinambungan. "Presiden ingin memastikan bahwa setiap program

karakteristik masing-masing wilayah.

"Bapak Presiden memberi komitmen yang kuat untuk langsung handle, mengelola Papua. Mengelola Papua tentu di dalam agenda yang menyeluruh, yang terintegrasi baik agenda Papua dalam konteks global, di dalam konteks nasional, integrasi antara kebijakan lintas kementerian, private sector maupun juga konsolidasi ke tingkat provinsi maupun kabupaten," ujar Velix.

Ia menambahkan pula, lembaganya



pembangunan di Papua membawa hasil nyata bagi masyarakat dan dikelola dengan sistem koordinasi yang solid," ujarnya.

Komite Eksekutif, sambungnya, akan memastikan setiap kebijakan pemerintah pusat diterjemahkan secara efektif di daerah. Antara lain menyesuaikan, dengan kebutuhan dan

akan mengawal delapan agenda besar dalam kerangka asta cita kontekstual Papua, yang meliputi pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan. Selain itu, Velix juga menjelaskan bahwa lembaga baru yang memiliki anggota dengan latar belakang beragam ini juga akan mengurus terkait dengan beragam aspek

• INFO UTAMA

sosial budaya mulai dari olahraga, kesetaraan gender, hingga ekonomi kreatif untuk pembangunan Papua. "Negara harus hadir menyentuh saudara-saudara kita di pantai, pegunungan, pedalaman, hingga rawa-rawa agar semua merasakan kehadiran negara," tuturnya.

Sedangkan Gubernur Papua, Matius Fakhiri yang dilantik pada hari yang sama dengan Velix, menyambut positif pembentukan komite eksekutif tersebut dan menegaskan kesiapan pemer-

buatan proyek strategis seperti pembangunan jalan antarprovinsi, penguatan layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah daerah, kata Matius, siap menjadi mitra aktif dalam implementasi kebijakan pusat di Papua.

Gubernur Matius menegaskan bahwa prioritas utama pemerintahannya adalah pembangunan sumber daya manusia Papua, terutama melalui sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai sebagai fondasi utama kema-



intah daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat. "Koordinasi intensif menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan, baik infrastruktur, ekonomi, maupun kesejahteraan masyarakat," tegas Matius Fakhiri.

Ia menilai dengan lembaga koordinatif di tingkat nasional, proses percepatan pembangunan dapat berjalan lebih efisien. Hal ini terutama penting dalam memastikan keberlan-

juan daerah. "Kami akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, serta Komite yang dibentuk Presiden, untuk mempercepat langkah-langkah pembangunan," tandasnya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi II Fraksi PKB, Indrajaya, menyebut pembentukan komite ini sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. "Komite ini diharapkan menjadi wadah

koordinasi dan inovasi kebijakan yang berorientasi pada rakyat serta mampu mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua," ujar Indrajaya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 11 Oktober 2025.

Keberadaan komite juga penting sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua agar seluruh program pembangunan berjalan sinergis dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Ia berharap Komite Eksekutif mampu mengawal delapan agenda besar dalam kerangka *Asta Cita* kontekstual Papua, meliputi pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, hingga tata kelola pemerintahan yang baik.

Legislator asal Papua Selatan itu menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, sebagai fondasi utama bagi kemajuan Papua di masa depan. "Papua memiliki sumber daya maritim yang melimpah. Jika dikelola secara berkelanjutan, potensi ini dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat. Dengan kerja bersama dan koordinasi kuat antara pusat dan daerah, Papua pasti akan semakin maju dan sejahtera," pungkas Indrajaya.

Sedangkan implikasi politiknya, Wapres Gibran yang bertindak sebagai Ketua Dewan Pengarah, pelantikan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, merupakan pen delegasian kewenangan Presiden sekaligus memberikan ruang untuk unjuk kinerjanya, terlebih isu Papua yang kerap menjadi sensitif secara domestik maupun dari kaca mata regional dan global.

Penugasan Gibran untuk mengurus Papua menunjukkan delegasi kewenangan yang signifikan dari Presiden Prabowo. Hal ini dapat dilihat sebagai cara untuk memberikan ruang bagi Gibran dalam menunjukkan kinerjanya, sekaligus memberikan fokus khusus pada isu Papua yang sensitif.

Bagaimana kinerja Wapres terkait dengan amanat penyelenggaraan negara di Papua? Akan lebih adil melihatnya sejak hari pertama tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran setelah 20 Oktober 2025. ●

SIKAP BEDA GUBERNUR JAKARTA

Belasan Gubernur menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak pemotongan transfer ke daerah (TKD). Namun, Gubernur Jakarta Pramono Anung menunjukkan sikap berbeda. Pramono menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya menerima keputusan tersebut dan mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat terkait pengurangan TKD antara lain melalui pemotongan dana bagi hasil (DBH).

"Memang seperti yang saya sampaikan Jakarta ini apapun kan sebenarnya sebagai role model, karena APBD kita

itu memang berat untuk daerah, termasuk Jakarta.

Oleh sebab itu, Pramono mengatakan bakal mencari sumber pendanaan di luar APBD untuk membangun Jakarta. "Tetapi saya akan menggunakan kesempatan ini, momentum ini, untuk katakanlah misalnya alternative financing itu akan menjadi salah satu kata kunci untuk membangun Jakarta. Bagaimana caranya? dengan KLB, SP3L, SLF dan macam-macam yang selama ini belum terkelola secara baik, akan kami gunakan termasuk kemudian kalau bisa dengan Jakarta Collaboration Fund ini akan menjadi lebih

Keuangan," ujar Pramono.

Purbaya mengaku senang dan menyambut baik rencana itu. Menurut dia, dengan adanya pembangunan gedung tersebut, maka perekonomian berjalan dan dapat menyerap tenaga kerja.

"Dan yang paling penting apa? Saya nggak keluar uang. Uangnya dari Bank Jakarta. Jadi, Bank Jakarta cukup banyak uang. Dari pada nggak dipakai, lebih baik dipakai untuk meningkatkan aktivitas perekonomian pembangunan," ungkap Pak Menkeu.

Purbaya menjelaskan gedung bank tersebut akan dibangun di atas tanah



selama ini sangat terbuka, transparan, sehingga dengan begitu, seperti yang saya katakan di depan Pak Menteri kalau Jakarta, kalau ini sudah menjadi keputusan apalagi ini kan sudah diputuskan di dalam undang-undang APBN, disahkan di DPR, sebenarnya tidak ada ruang untuk berargument," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025.

Meski begitu, Pramono mengatakan tindakan para gubernur lain yang memprotes pemotongan itu tidak bisa disalahkan. Ia menyebut pemotongan

baik," katanya.

Dalam kaitan ini, justru Menkeu Purbaya yang mendatangi Balai Kota Jakarta. Selain soal TKD dan DBH, pertemuan Purbaya dan Pramono membahas pula pembangunan gedung Bank Jakarta di Lot 1 SCBD, Jakarta Selatan.

"Kami memohon persetujuan Pak Menteri untuk bisa disetujui (pembangunan Gedung Bank Jakarta), dan kami akan segera bangun di SCBD untuk pusat Bank Jakarta dalam bentuk kerja sama dengan Kementerian

milik Kementerian Keuangan. Pihak Bank Jakarta menyewa lahan tersebut selama 50 tahun. Nantinya, pemerintah pusat akan menarik 30 persen keuntungan dari gedung tersebut.

"Bank Jakarta pinjam tanah ke saya selama 50 tahun, saya kasih 50 tahun perpanjangannya. Nanti dibagi tiga ya. Pemerintah Pusat dapat 30 persen dari gedung itu," jelas Purbaya.

Menurut rencana awal, pembangunan akan dimulai pada tahun ini juga dan diselesaikan dalam 15 bulan ke depan. ●

MENUJU PILPRES 2029

Apa boleh buat. Rangkaian dinamika politik menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran sudah menyentuh pula soal figur yang layak menjadi calon wakil presiden mendatang.

Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun sudah ditanya soal kemungkinan menjadi Wakil Presiden.

Mendengar pertanyaan itu, Purbaya kaget dan langsung memberikan jawaban spontan.

"Bapak jadi idola baru nih Pak, kepikiran enggak untuk jadi cawapres Pak?" tanya salah seorang wartawan di acara penutupan Investor Daily Summit 2025 di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.

"Baru juga sebulan kerja, gila lu! Nggak itu kan bisa berubah. Kalo ekonomi bagus ya begitu, kalo turun, turun lagi," ujar Purbaya.

Lebih lanjut Menkeu mengatakan bahwa, "Ekonomi kan naik turun naik turun, jadi jangan cepet-cepet. Dan gue gak mikirin juga jadi ca..apa ca..nggak mikir sama sekali," katanya.

Ia menilai lonjakan popularitas yang terjadi belakangan ini lebih disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sedang

membaik. Menurut Purbaya, jika situasi ekonomi kembali menurun, sorotan publik terhadap dirinya pun bisa ikut meredup.

"Kerja juga belum. Ini kan baru cuma di permukaan aja, yang di bawahnya belum kita sisir betulan. Jadi gak ada pikiran sama sekali, gue gak peduli juga," tandasnya.

Tersirat bahwa popularitas menjadi faktor yang ikut mempengaruhi peluang menjadi calon Wapres pada pemilihan mendatang. Lebih dari itu, popularitas juga ditentukan oleh rekam jejak kinerja dan koneksi dengan kekuatan politik, antara lain partai-partai yang akan mencalonkannya sebagai kandidat. Tak kurang pula dukungan dari koneksi komunitas bisnis yang berpengaruh.

Bahkan Wapres petahana Gibran Rakabuming Raka pun yang masih menjabat pun bukan perkecualian. Toh Presiden sebelumnya Joko Widodo yang juga ayahanda Wapres Gibran



mengakui sudah mengarahkan relawan Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dua periode.

Jokowi mengaku dukungan Prabowo-Gibran dua periode ini merespons pertanyaan relawan. "Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu (dukung Prabowo-Gibran dua periode)," kata Jokowi, Jumat, 19 September 2025 ketika menjawab pertanyaan mengenai klaim relawan Bara JP untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode.

Sebelumnya, Ketua Umum Bara JP, Willem Frans Ansanay, mengaku mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dua periode. "Kita mendukung program pemerintah, Asta Citanya, dan 17 program prioritas. Semangat ini bukan maunya kami saja, tetapi merupakan amanat dari pembina utama Bara JP, yaitu Bapak Joko Widodo," kata Frans.

Bara JP, sambungnya, harus menjadi organisasi relawan yang mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran dua periode. "Beliau sampaikan mengawal pemerintahan, tapi bagi saya pemerintahan satu periode itu rasanya belum maksimal, jadi kita bulatkan saja dua periode," kata Frans.

Kembali ke popularitas dan rekam jejak kinerja, untuk Wapres Gibran jalannya sudah terbuka dengan pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Sebagai Wakil Presiden, Gibran tidak menjabat di Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, tapi di Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Komite Eksekutif yang diketuai oleh Velix Wanggai untuk membantu BP3OKP yang dipimpin oleh Gibran.

Gibran sebagai Ketua BP3OKP bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugasnya mencakup supervisi dan pengawasan kebijakan strategis untuk pembangunan Papua. Sedangkan Komite Eksekutif dibentuk untuk membantu BP3OKP yang diketuai Gibran. Komite ini akan menjadi perpanjangan tangan BP3OKP di lapangan untuk mengkoordinasikan dan mempercepat

pelaksanaan program di enam provinsi di Papua.

Tambahan pula, masih banyak ruang untuk Gibran menunjukkan kinerjanya. Namun, faktor distraksi (gangguan) terhadap Gibran juga perlu dipertimbangkan. Sebagian besar distraksi itu bersifat politik dan berasal dari kontroversi yang mengiringi proses pemilihannya, serta isu-isu yang terus berlanjut hingga menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Distraksi ini dapat berpengaruh terhadap popularitas dan kinerjanya sebagai petahana Wapres.

Nah, soal Cawapres mendatang,

tusan unit TransJakarta berbasis listrik. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa dicontoh oleh kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. "Ini sekarang beliau sedang menambah armada untuk Transjakarta listrik. Ini ada 500 bus baru di akhir 2025 ya," kata Wapres dalam acara Green Impact Festival 2025 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Juli 2025.

"Lalu digratiskan untuk 15 golongan, jadi TNI, Polri, kaum difabel, lansia, gratis. Hari Rabu, ASN, sama Gubernurnya wajib naik TransJakarta," ujarnya.

Menanggapi pujian dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait



Gubernur Jakarta Pramono Anung pun sebenarnya patut menjadi perhitungan. Terlebih Wapres Gibran sendiri pernah memuji kinerjanya terkait transportasi umum. Pramono sendiri membuat kebijakan kepada pegawai Pemprov untuk naik transportasi umum setiap hari Rabu.

Terlebih, lanjut Wapres, Pemprov Jakarta juga berencana menambah ra-

kebijakan transportasi umum di Ibu Kota. Pramono pun mengucapkan terima kasih atas pujian tersebut. "Matur nuwun, terima kasih, Mas Wapres," kata Pramono singkat menanggapi pujian Gibran.

Toh belakangan, Pramono menegaskan akan memilih pensiun sebagai politisi dan pejabat setelah masa jabatan

• INFO UTAMA

gubernurnya berakhir. Menurut Pram, nama ringkasnya, masa jabatannya sebagai pemimpin Jakarta itu akan menjadi penutup dari perjalanan panjangnya di dunia birokrasi dan politik yang sudah ia lakoni selama seperempat abad.

"Target saya pengen jadi gubernur satu periode. Tetapi saya memutuskan dan benar-benar satu periode dan berhenti," kata Pramono di acara Top Team Workshop Bank BTN di Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Oktober 2025.

Bahkan, dia juga mengaku tidak pernah berkeinginan atau sekadar membayangkan untuk menjadi pemimpin ibu kota. Sebelumnya, dia justru berkeinginan untuk pensiun dan menikmati masa tua dengan bermain bersama cucu-cucunya, karena sudah lebih dari

Nah, jika melihat faktor dukungan partai politik, tentu saja para ketua umum partai politik juga berpeluang untuk menjadi cawapres. Terlebih beberapa ketua umum partai politik yang memiliki kursi parlemen juga menjabat sebagai menteri dan menteri koordinator di pemerintahan Prabowo Gibran.

Sebut saja misalnya Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang juga Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Umum Partai Amanat Na-

Golkar dan Presiden berjalan konstruktif.

Ia menjelaskan diskusi bersama Presiden Prabowo juga berbicara mengenai arah koalisi pendukung pemerintah ke depan. "Kita berbicara tidak hanya sekarang, tetapi juga berbicara tentang bagaimana koalisi ke depan itu ke arah yang lebih baik dan produktif. Sudah barang tentu tadi kita lakukan semua dalam rangka bagaimana bisa kita mewujudkan apa yang menjadi program-program Bapak Presiden dalam Asta Cita," ujar Bahlil.

Sedangkan para ketua umum partai lain yang menjabat Menko masing-masing akan diuji dalam konsolidasi internal partai dan juga kinerja sebagai penyelenggara dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Terlebih Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan pengha-



dua dekade ia berkarir di pemerintahan dan politik.

Jauh sebelum menjabat Gubernur DKI, Pramono pernah menjadi anggota DPR, lalu menjabat Sekretaris Kabinet pada era Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo. Setelah itu barulah ia terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Apakah setelah itu Pram benar-benar pensiun setelah tugasnya berakhir pada 2030, belum ada kepastian.

sional yang juga Menko Pangan Zulkifli Hasan.

Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029 melekat dengan kekuatan untuk menentukan arah politik partai di Pilpres 2029. Lebih dari itu, Bahlil berhasil keluar dari isu Munas Luar Biasa Partai Golkar dan membawa rombongan partainya menemui Presiden Prabowo Subianto pada akhir Agustus 2025. Selepas pertemuan, Bahlil menyebut diskusi antara Partai

pusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Putusan ini dikeluarkan pada 2 Januari 2025 (Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024), mengubah secara mendasar dinamika politik nasional menjelang Pilpres 2029.

Jadi, untuk para ketua umum partai politik, putusan MK itu lebih memungkinkan untuk mencalonkan diri bukan hanya sebagai cawapres, melainkan juga capres. Memang Pilpres 2029 masih beberapa tahun lagi. Tapi, apa boleh buat. ●

PELUANG ZULKIFLI HASAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Menko Pangan Zulkifli Hasan berpeluang menjadi Cawapres, bahkan Capres pada Pilpres 2029. Ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan dalam Pilpres.

Namun, sejauh ini ia belum mengemukakan soal cawapres apalagi Capres. Zulhas, nama ringkasnya, tampak lebih fokus pada jabatannya sebagai Menko Pangan.

Boleh jadi juga karena secara internal PAN yang diketuainya tampak solid. Jadi, Zulhas tampak lebih sibuk dengan jabatan sebagai menteri senior di jajaran kabinet Prabowo-Gibran.

Pada Jumat, 10 Oktober 2025, misalnya, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan meninjau langsung pembibitan sayur, panen brokoli, pertemuan kelompok mingguan (PKM), serta program ketahanan pangan ayam petelur di Rumah Pangan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Kopeng, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Kunjungan Menko Pangan didampingi Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi dan Komisaris Utama PNM, Dradjad Hari Wibowo. Rangkaian kunjungan dimulai dengan meninjau usaha grosir dan ritel milik nasabah binaan PNM yang juga menjual telur dari hasil Rumah Pangan PNM. Menko Zulhas mengunjungi pula rumah pembibitan sayuran yang dikelola nasabah PNM ULAMM sebelum melakukan panen brokoli di ladang.

Kegiatan dilanjutkan ke PKM di rumah salah satu Ketua Kelompok PNM Mekaar. Di lokasi ini, Zulhas menyaksikan secara langsung praktik pendampingan dan pengembangan kapasitas usaha yang dilakukan PNM setiap pekan bagi 22,5 juta perempuan prasejahtera di seluruh Indonesia.

Kunjungan ditutup dengan peninjauan program ayam petelur di Rumah Pangan PNM sebagai wujud nyata kontribusi PNM dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat lokal. "Saya berterima kasih ke PNM karena sudah membantu ketahanan pangan di daerah-daerah, terutama di desa. Saya yakin masa depan ibu-ibu akan

cerah dibantu program ayam petelur ini, apalagi Pak Presiden punya program MBG, jadi insya Allah usaha di bidang ayam petelur akan laku keras," kata Zulhas, Jumat, 10 Oktober 2025.

Berdasarkan survei PNM September lalu, mayoritas keluarga nasabah mengaku pola makan mereka menjadi lebih bergizi

Melalui kegiatan ini, PNM menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan akses permodalan, pendampingan, dan program pemberdayaan yang selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.



sejak mengikuti program ini. Selain itu, program ini terbukti tidak hanya menambah penghasilan harian nasabah sebesar Rp50 ribu-Rp150 ribu per bulan, tetapi juga meningkatkan kualitas gizi keluarga melalui konsumsi telur yang lebih rutin.

"Mungkin ini kontribusi kecil PNM yang bisa kami lakukan, diawali dari memenuhi kebutuhan masing-masing, kebutuhan lingkungan, dan kedepan kita akan perluas hingga bisa memenuhi kebutuhan pasar secara luas," tambah Arief Mulyadi.

Harap maklum, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025, juga Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2025 terkait dengan upaya pemerintah mempercepat pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air. Inpres 14 dan Keppres 19 Tahun 2025 menempatkan Zulhas sebagai figur utama dalam implementasinya. Kinerja Zulhas menerapkan amanat dari Presiden Prabowo tentu akan ikut menentukan perjalanan politiknya hingga Pilpres 2029. ●

MENGGUGAT KELALAIAN NEGARA DALAM KASUS KERACUNAN MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal digadang sebagai salah satu inovasi utama pemerintah dalam upaya membangun sumber daya manusia.

Narasi yang dibangun sederhana tetapi kuat, anak sekolah yang sehat dan bergizi akan mampu belajar dengan baik, menurunkan angka stunting, dan pada akhirnya memperbaiki kualitas generasi.

Dalam kerangka politik pembangunan, MBG ditempatkan sebagai program unggulan yang diharapkan menjadi simbol kepedulian negara kepada anak-anak bangsa. Namun, fakta di lapangan memperlihatkan wajah yang tak seragam. Alih-alih menjadi program yang menyehatkan, MBG justru memunculkan gelombang kasus keracunan massal.

Sejumlah daerah melaporkan kejadian luar biasa setelah ratusan siswa jatuh sakit se usai menyantap makanan dari MBG. Di Kabupaten Bandung Barat, misalnya, satu insiden menyebabkan ratusan anak harus dirawat.

Di beberapa provinsi lain, media mencatat jumlah korban yang juga keracunan mencapai ratusan siswa. Data yang dikumpulkan dari sejumlah sumber bahkan menunjukkan ribuan anak terdampak sejak program ini berjalan.

Situasi ini memunculkan tanda tanya besar, bagaimana mungkin program yang dimaksudkan untuk memberikan nutrisi justru menimbulkan penyakit? Kejadian ini tidak bisa direduksi sebagai masalah teknis belaka. Ketika pola keracunan terjadi berulang dan tersebar di berbagai daerah secara sporadis, artinya ada masalah struktural dalam manajemen program.

Pertanyaan mengenai kelalaian negara bukan sekadar isu moral. Ia adalah persoalan hukum. Dalam konsep hukum perdata, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain menimbulkan kewajiban ganti rugi. Unsur kelalaian dapat timbul bukan hanya dari tindakan aktif yang salah, melainkan juga dari pengabaian kewajiban yang seharusnya dilakukan.

Dalam konteks MBG, negara berperan sebagai perancang, pengendali, sekaligus penanggung jawab pelaksanaan program. Pengadaan makanan, mekanisme distribusi, standar sanitasi, dan sertifikasi bahan pangan semestinya berada dalam pengawasan ketat. Jika pada akhirnya makanan yang disajikan justru menimbulkan keracunan massal, maka ada indikasi bahwa pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Lebih jauh, negara memiliki kewajiban konstitusional melindungi hak anak atas kesehatan. UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap warga negara atas hidup yang layak, kesehatan, dan pendidikan.

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang menegaskan kewajiban negara memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk gizi dan kesehatan. Ketika program MBG

justru menimbulkan bahaya kesehatan, negara dapat dinilai gagal menjalankan kewajiban tersebut.

"Citizen Law Suit"

Salah satu jalur hukum yang relevan adalah citizen law suit atau gugatan warga negara. Mekanisme ini memungkinkan warga atau sekelompok warga menggugat pemerintah atas tindakan atau kelalaian yang merugikan kepentingan publik. Citizen law suit menjadi penting karena memberikan ruang bagi publik untuk menuntut akuntabilitas negara meski penggugat bukan korban langsung.

Di Indonesia, citizen law suit belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Namun, praktik peradilan menunjukkan mekanisme ini makin diterima. Salah satu preseden penting adalah gugatan polusi udara Jakarta.

Pada 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan warga yang menuntut pemerintah pusat dan daerah memperbaiki tata kelola udara bersih.

Hakim menilai negara lalai dalam mengendalikan polusi udara dan memerintahkan pemerintah mengambil langkah konkret.

Putusan tersebut menegaskan bahwa kelalaian negara dapat ditarik ke ruang pengadilan melalui gugatan warga negara.

Selain kasus polusi udara, ada sejumlah gugatan serupa dalam isu lingkungan, pendidikan, dan pelayanan publik. Meski hasilnya beragam, pola yang terlihat adalah adanya penerimaan pengadilan terhadap gugatan warga negara. Artinya, jalur hukum ini bukan sekadar wacana, melainkan instrumen nyata.

Dalam konteks MBG, citizen law suit dapat diajukan oleh orangtua siswa, organisasi masyarakat sipil, ataupun lembaga advokasi konsumen. Gugatan tidak hanya berorientasi pada ganti rugi biaya medis, tetapi juga menuntut langkah korektif yang lebih luas.

Pengadilan bisa diminta memerintahkan audit independen terhadap penyelenggaraan MBG, membuka kontrak pengadaan penyedia makanan, menghentikan sementara penyedia yang bermasalah, serta memberikan sanksi administratif pada pejabat yang lalai.

Dengan kata lain, gugatan warga negara dapat berfungsi sebagai instrumen koreksi kebijakan.

Jalan Panjang Menuju Akuntabilitas

Meski peluangnya terbuka, citizen law suit bukan jalan yang mudah. Pengalaman gugatan warga negara sebelumnya menunjukkan beberapa hambatan.

Pertama, soal legal standing. Pengadilan seringkali mempertanyakan kedudukan hukum penggugat, apakah mereka memiliki kepentingan langsung atau tidak. Meski demikian, sejumlah putusan terakhir mulai lebih progresif dengan menerima gugatan meski penggugat bukan korban langsung.

Kedua, soal pembuktian kausalitas. Dalam kasus MBG, beban pembuktian cukup berat. Penggugat harus menunjukkan bahwa

OLEH:
YAYANG NANDA BUDIMAN
Kepala Divisi Edukasi dan Literasi LBH Bentala
Indra Nusantara

makanan dari program MBG memang menjadi penyebab keracunan massal. Untuk itu, dibutuhkan data medis, laporan epidemiologis, serta hasil laboratorium. Data semacam ini hanya bisa dikumpulkan dengan kerja kolaboratif antara tenaga medis, ahli kesehatan masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil.

Ketiga, soal keberanian politik hukum. Gugatan warga negara seringkali menabrak kepentingan besar. Dalam kasus MBG, program ini menjadi ikon pemerintahan Prabowo-Gibran. Tidak menutup kemungkinan ada resistensi politik yang membuat proses hukum berlarut-larut.

Anak-anak yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru menjadi korban dan dalam hal ini negara tidak bisa menutup mata.

Langkah paling bertanggung jawab dari pemerintah adalah membuka data secara transparan, mengakui kelalaian, dan segera melakukan perbaikan menyeluruh. Jika itu tidak dilakukan, citizen law suit menjadi jalan yang sah dan konstitusional. Jalan ini bukan sekadar gugatan hukum, melainkan bentuk perlawanan publik terhadap kelalaian negara.

Gelombang keracunan MBG adalah alarm keras. Ia mengingatkan bahwa hak anak atas gizi dan kesehatan tidak boleh



Namun, disinilah nilai penting citizen law suit. Ia menjadi instrumen yang mengingatkan negara bahwa popularitas politik tidak boleh mengorbankan hak dasar warga negara.

Preseden gugatan polusi udara memberikan pelajaran berharga. Meskipun putusan itu masih dalam perdebatan di tingkat kasasi, ia sudah memberikan pesan bahwa pengadilan dapat memutus negara lalai.

Hal ini memperkuat legitimasi publik untuk mengajukan gugatan dalam kasus MBG. Bukti yang ada menunjukkan pola keracunan berulang, skala korban yang besar, serta adanya indikasi lemahnya pengawasan. Semua itu cukup untuk membangun argumentasi kelalaian negara.

Gelombang keracunan MBG adalah cermin rapuhnya tata kelola kebijakan publik. Ia menunjukkan bagaimana sebuah program besar dijalankan tanpa kesiapan infrastruktur pengawasan.

dijadikan eksperimen politik. Jika pengadilan berani menerima gugatan warga negara, sejarah akan mencatat bahwa hukum masih bisa menjadi instrumen koreksi. Jika tidak, kepercayaan publik pada negara akan semakin terkikis.

Pada akhirnya persoalan MBG bukan hanya tentang makanan, melainkan tentang makna kehadiran negara. Jika negara gagal memberikan jaminan dasar atas kesehatan anak, kepercayaan publik akan runtuh.

Citizen law suit memberikan jalan bagi masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban itu. Gugatan warga negara adalah cara untuk memastikan bahwa negara belajar dari kelalaiannya, bukan mengulanginya.

Gelombang kejadian keracunan MBG harus menjadi momentum agar ke depan setiap program publik dijalankan dengan standar akuntabilitas yang tinggi. ●



CATAT KENAIKAN PRODUKSI BERAS DAN GABAH TERTINGGI NASIONAL

Provinsi Sumatera Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pertanian. Di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Herman Deru, Sumsel mencatat kenaikan produksi beras dan gabah tertinggi di Indonesia pada periode Januari–November 2024, melampaui empat provinsi produsen beras besar lainnya.

Capaian itu disampaikan Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian, Dr. Ir. Suwandi, saat meninjau program cetak sawah di Desa Benawa, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten OKI, Kamis (2/10/2025). Ia menegaskan bahwa kenaikan tersebut merupakan capaian luar biasa yang patut diapresiasi.

Menurut Suwandi, Kabupaten OKI memiliki salah satu program cetak sawah terluas di Indonesia. Dari total 38.000 hektare lahan yang telah dilakukan Survei Investigasi dan Desain (SID), sebanyak 29.884 hektare sudah masuk tahap kontrak. "Ini sangat bagus karena sisanya tinggal sedikit lagi," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keber-

hasilan program cetak sawah harus diikuti dengan keberhasilan pengolahan. Jika lahan tidak segera ditanami, maka hanya akan ditumbuhi rumput

liar. Karena itu, percepatan bertanam menjadi ukuran suksesnya program.

Suwandi memastikan pemerintah pusat terus memaksimalkan dukun-



gan peralatan dan mobilisasi alat pertanian. Ia juga mengingatkan pemerintah daerah dan Forkopimda untuk bekerja lebih keras, terutama memasuki musim penghujan pada Oktober.

"Saya percaya Sumsel bisa menjadi percontohan terbaik di luar Pulau Jawa," kata Suwandi. Menurutnya, program ini dipantau langsung oleh Menteri Pertanian sebagai upaya strategis memperkuat ketahanan pangan nasional.

Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa Sumsel memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian. Ia mengajak masyarakat untuk bersyukur atas anugerah alam yang dimiliki dan mengelolanya secara berkelanjutan demi anak cucu di masa depan.

"Kita harus menjaga warisan ini. Kekayaan alam tidak hanya untuk dieksploitasi, tetapi juga diwariskan dalam kondisi membanggakan," ujar Herman Deru.

Ia menegaskan keberlanjutan menjadi kunci, termasuk dalam reklamasi lahan pascatambang.

Lebih lanjut, Deru menyampaikan Sumsel kini semakin kuat sebagai penyangga pangan nasional. Kebijakan Presiden yang melarang impor beras menjadi pemicu semangat petani untuk terus meningkatkan produksi.

Menurutnya, Sumsel tahun ini mendapat program cetak sawah seluas 48.000 hektar, di mana 18.000 hektar berada di OKI. Dengan dukungan tersebut, produksi gabah kering giling Sumsel naik signifikan. Hingga September 2024, kenaikan sudah mencapai 600 ribu ton dari target 2,9 juta ton.

"Sumsel mencatat sejarah, belum pernah produksi melonjak mendekati 3,5 juta ton," ungkap Deru penuh semangat. Ia yakin Sumsel bisa naik dari posisi lima besar menjadi tiga besar produsen beras nasional.

Di akhir kunjungan, Herman Deru mengajak semua pihak memanfaatkan lahan kosong sesuai aturan yang berlaku.

Ia menegaskan, OKI berpotensi besar menjadi primadona pangan Indonesia, sekaligus mendorong Sumsel semakin kokoh sebagai lumbung pangan nasional. • ADV





PORNAS XVII KORPRI DI SUMSEL PECAHKAN REKOR NASIONAL

Antusiasme luar biasa mewarnai pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) XVII KORPRI Tahun 2025 yang digelar di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring Sport City (JSC) Palembang. Ribuan peserta dari seluruh Kementerian, Lembaga, dan Provinsi se-Indonesia, serta masyarakat umum memadati Stadion Gelora Sriwijaya untuk menyaksikan secara langsung momen bersejarah tersebut.

Wakil Menteri PANRB RI, Komjen Pol (P) Purwadi Arianto menyampaikan bahwa sejak berdiri tahun 1971, KORPRI telah menjadi wadah penting dalam membina dan meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurutnya, KORPRI bukan hanya sekedar organisasi kedinasan, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan, menumbuhkan semangat persatuan, dan memperkuat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Ia menegaskan bahwa PORNAS KORPRI memiliki makna penting, bukan hanya untuk mengasah prestasi olahraga, tetapi juga memperkuat integritas ASN di seluruh Tanah Air.

"Mari junjung tinggi sportivitas, jadikan ajang ini sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat komitmen

dalam menumbuhkan semangat baru membangun bangsa dan negara," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mengungkapkan bahwa PORNAS XVII KORPRI Sumsel 2025 diikuti kurang lebih 11 ribu peserta, terdiri atas 9.305 atlet, 504 pelatih, dan 1.754 ofisial dari 102 kontingen. Jumlah ini memecahkan rekor penyelenggaraan sebelumnya yang digelar di Jawa Tengah.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, yang telah mendukung penuh penyelenggaraan PORNAS KORPRI ke-17 sehingga menjadi PORNAS termegah dan paling meriah," ujarnya.

Prof. Zudan juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan PORNAS KORPRI 2027 mulai dipersiapkan sejak dini oleh

seluruh pihak, baik atlet, pelatih, maupun official. Ia menyebutkan, Provinsi Lampung telah mengajukan diri sebagai calon tuan rumah selanjutnya.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Sumsel sebagai tuan rumah PORNAS XVII KORPRI.

"Ini merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat melayani dan menyambut atlet-atlet terbaik dari KORPRI seluruh Indonesia," ujar Herman Deru.

Ia menilai ajang PORNAS KORPRI bukan hanya menjadi sarana kompetisi, tetapi juga wadah mempererat silaturahmi antar anggota KORPRI, sekaligus menjadi suplemen moral bagi ASN agar lebih bersemangat dalam bekerja dan mengabdikan.

"Kami berterima kasih kepada seluruh pimpinan KORPRI dari Kementerian, Lembaga, dan Provinsi se-Indonesia atas kehadirannya di Kota Palembang yang memang sangat rindu dengan event nasional seperti ini," ucapnya.

Gubernur Herman Deru juga berpesan kepada seluruh atlet, khususnya kontingen Sumatera Selatan, agar menjaga sportivitas dan menjauhi tindakan yang dapat mencederai semangat kompetisi.

Herman Deru mengajak seluruh peserta dan pengunjung untuk menikmati keindahan dan kekayaan kuliner khas Sumatera Selatan.

"Atas nama masyarakat dan jajaran Pemerintah Provinsi Sumsel, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu dan pengunjung. Jangan lupa membawa oleh-oleh khas Sumsel seperti pempek dan wastra kebanggaan daerah kami," pungkasnya.

Hidupkan Ekonomi Kerakyatan

PORNAS XVII KORPRI Tahun 2025 di Palembang juga menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Sumsel dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, salah satunya dengan membuka bazar UMKM. Kegiatan yang dibuka secara resmi Sekda Sumsel Drs. H. Edward Candra.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kami mengucapkan selamat datang di Palembang dan Sumsel dalam semangat kebersamaan dan

pelayanan ASN untuk bangsa," ujarnya.

Menurutnya, kegiatan pesta rakyat dan bazar UMKM ini merupakan bentuk inovasi Pemprov dalam memanfaatkan momen besar nasional untuk menghidupkan sektor ekonomi masyarakat. Bazar tersebut diikuti ratusan pelaku UMKM dari berbagai kabupaten dan kota di Sumsel yang menampilkan

pengunjung.

Sekda mengaku bangga atas antusiasme masyarakat yang begitu tinggi. Menurutnya, kehadiran bazar tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha kecil menengah.

"Kegiatan ini memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi UMKM, dan



produk-produk unggulan khas daerah.

Lebih dari sekadar pelengkap, bazar UMKM menjadi daya tarik utama yang menghadirkan nuansa ekonomi kreatif di tengah suasana kompetisi olahraga. Produk-produk lokal seperti songket, jumputan, dan aneka kuliner khas Sumsel seperti pempek dan kue tradisional mendapat sambutan luar biasa dari

menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk meniru model kolaborasi ini," ujarnya.

Ia juga menyebut, keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari sinergi antara ASN, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam semangat kebersamaan itulah, Pemprov Sumsel berupaya menjadikan pesta rakyat ini sebagai simbol kemandirian ekonomi daerah. • ADV



PORNAS XVII KORPRI, BERKAH EKONOMI DAN KEBANGGAAN BAGI SUMSEL

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menegaskan, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) XVII KORPRI Tahun 2025 di Palembang bukan hanya tentang kompetisi olahraga tapi juga tentang kebersamaan, semangat persaudaraan, dan dampak ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat Sumsel.

Dalam acara penutupan di Stadion Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Herman Deru menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Sumsel sebagai tuan rumah sekaligus raihan juara dua nasional dengan perolehan 24 medali (9 emas, 7 perak, dan 8 perunggu).

"Selama sepekan pelaksanaan, Palembang menjadi kota yang sangat hidup. Mulai dari kuliner, wisata, hingga penginapan semuanya penuh. Bahkan beberapa tamu dari luar daerah kesulitan mencari tiket karena antusiasme begitu tinggi," ujar Gubernur Herman Deru.

Ia menilai PORNAS menjadi ajang silaturahmi yang mempererat hubungan antar ASN dari seluruh Indonesia.

"Dari sinilah muncul energi positif yang memperkuat semangat kebersamaan dan pelayanan publik yang lebih baik," tambahnya.

Menurut Herman Deru, efek dari kegiatan ini dirasakan masyarakat secara

langsung, terutama sektor ekonomi. Ia mencontohkan, konsumsi pempek ikon kuliner khas Palembang melonjak tajam dari rata-rata 11 ton menjadi 24 ton per hari selama kegiatan berlangsung.

"Ini keberkahan yang nyata. PORNAS KORPRI bukan hanya mencetak atlet berprestasi, tapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal dan kebanggaan bagi masyarakat Sumsel," ucapnya penuh syukur.

Ia pun mengapresiasi kerja keras panitia, relawan, dan masyarakat Sumsel yang telah menjadi tuan rumah yang ramah, tertib, dan kompak.

Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini memuji profesionalitas Sumsel sebagai tuan rumah. Menurutnya, PORNAS KORPRI bukan sekadar arena kompetisi, tetapi wadah untuk memperkuat karakter ASN yang sehat, berintegritas, dan bersatu.

"ASN adalah satu tubuh. Dari olahraga kita belajar bahwa kemenangan lahir dari kerja sama, disiplin, dan semangat

kebersamaan," tegasnya.

Ketua Umum Bapor Korpri, Asrorun Ni'am Sholeh, menambahkan bahwa PORNAS tahun ini mencatatkan rekor baru dari sisi jumlah peserta dan cabang olahraga.

"Dari 4.959 peserta pada 2023 menjadi 9.305 peserta tahun ini. Ini bukti antusiasme ASN meningkat," ujarnya.

Ia mengapresiasi kepada Gubernur Herman Deru dan Pemprov Sumsel yang telah menyiapkan semua dengan sangat baik.

"Palembang berhasil menjadi contoh bagaimana event olahraga bisa memadukan prestasi, ekonomi, dan persaudaraan ASN," tuturnya.

Dimeriahkan Korpri Run 2025

Sebelum ditutup, ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia ikut memeriahkan ajang Korpri Run 2025 yang digelar di Halaman DPRD Provinsi Su-



matera Selatan. Acara tersebut secara resmi dilepas Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel sekaligus Ketua Korpri Sumsel, Drs. H. Edward Candra MH.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian utama Pekan Olahraga Nasional (Ponas) Korpri XVII 2025, yang diselenggarakan di Sumatera Selatan. Peserta datang dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, tidak hanya dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga masyarakat umum yang ikut berpartisipasi dengan penuh antusias.

Ajang lari tahunan ini bukan sekadar kompetisi olahraga, melainkan juga gerakan sportivitas dan kebersamaan yang menanamkan semangat hidup sehat di kalangan ASN dan masyarakat luas.

Dengan mengusung tema "Sehat Bersama, Melayani dengan Hati", kegiatan ini diharapkan menjadi simbol dedi-

kasi Korpri dalam membangun ASN yang sehat jasmani dan rohani.

Dalam pelaksanaannya, Korpri Run Fornas 2025 menghadirkan dua kategori lomba lari, yaitu 5K khusus ASN/Korpri dan kategori umum. Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperkenalkan keindahan dan kekayaan budaya Palembang kepada para peserta dari berbagai daerah di Tanah Air.

semangat para peserta yang datang dari seluruh Indonesia. Ia menilai, kegiatan seperti Korpri Run memiliki nilai lebih karena mampu membangun rasa kebersamaan dan solidaritas di antara ASN dan masyarakat.

"Korpri Run bukan hanya ajang olahraga tapi juga wadah untuk mempererat persaudaraan, menanamkan semangat hidup sehat, dan memperkuat komitmen melayani masyarakat dengan



Suasana keceriaan tampak sejak pagi. Ribuan peserta memadati area start dengan semangat tinggi, diiringi alunan musik dan hiburan dari panggung utama. Panitia juga menyediakan berbagai hadiah menarik bagi para pemenang di setiap kategori serta doorprize bagi peserta yang beruntung.

Sekda Sumsel Edward Candra menyampaikan apresiasi atas partisipasi dan

hati," ujar Edward.

Penyelenggaraan Korpri Run 2025 ini sekaligus menjadi bukti komitmen Sumatera Selatan dalam mendukung kegiatan nasional berbasis olahraga. Selain mempererat persaudaraan, acara ini juga memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan. •ADV



Feby Deru Resmi Jadi Bunda PAUD Sumsel TEGUHKAN KOMITMEN CIPTAKAN ANAK CERDAS DAN BERKARAKTER

Suasana haru dan penuh semangat menyelimuti Griya Agung Palembang saat Hj. Febrita Lustia Herman Deru atau yang akrab disapa Feby Deru resmi dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Provinsi Sumatera Selatan oleh Gubernur H. Herman Deru.

Pengukuhan tersebut juga dirangkaikan dengan pelantikan Bunda PAUD dari 11 kabupaten/ kota serta pengukuhan Pokja Bunda PAUD Provinsi Sumsel periode 2025–2030. Momen ini menjadi tonggak baru dalam penguatan peran perempuan dalam dunia pendidikan anak usia dini.

Dalam pidatonya, Gubernur Herman Deru mengapresiasi dedikasi

para Bunda PAUD yang telah berperan aktif membangun kualitas pendidikan di daerah masing-masing. Ia menegaskan bahwa keberadaan Bunda PAUD bukan hanya simbol, tetapi kekuatan moral dalam menyiapkan generasi unggul.

“Bunda PAUD adalah pondasi peradaban bangsa. Kita semua tengah menyiapkan generasi yang kelak akan memimpin Indonesia di usia

100 tahun kemerdekaan,” ujar Herman Deru.

Ia mengingatkan bahwa kualitas anak bangsa ditentukan oleh bagaimana mereka diasuh dan dididik di usia emas. Oleh sebab itu, perhatian terhadap PAUD harus menjadi prioritas di setiap daerah.

Selain itu, Herman Deru menyoroti pentingnya kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat dalam



menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak-anak. "Anak usia dini harus tumbuh di lingkungan penuh kasih, bukan tekanan. Dari situlah lahir generasi cerdas dan berkarakter," katanya.

Gubernur juga menyoroti data rendahnya rata-rata IQ anak Indonesia yang perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Ia menilai hal itu bukan hanya masalah pendidikan formal, tetapi juga pola asuh di rumah dan akses terhadap stimulasi positif.

"Kalau kita abai hari ini, dampaknya akan dirasakan puluhan tahun ke depan. Maka mari kita bersama-sama perkuat PAUD di seluruh Sumsel," tambahnya.

Sementara itu, Feby Deru dalam kesempatan terpisah menyampaikan tekadnya untuk menjadikan PAUD sebagai gerakan bersama lintas sektor. Menurutnya, pendidikan anak usia dini adalah investasi terbaik untuk masa depan bangsa.

"Bunda PAUD bukan hanya posisi, tapi tanggung jawab sosial. Saya ingin memastikan setiap anak di Sum-

sel mendapat kesempatan belajar yang layak dan menyenangkan," ungkap Feby Deru. ●



PERKUAT PERAN AGAMA DALAM MENJAGA TOLERANSI

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru mendorong Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk terus memperkuat peran aktifnya dalam menjaga toleransi antarumat beragama di daerah. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Kerukunan Umat Beragama di Hotel Swarna Dwipa Palembang.

Menurut Gubernur, kerukunan tidak bisa hanya berhenti sebagai slogan, tetapi harus diimplementasikan dalam sikap dan tindakan. Ia menilai, di tengah keberagaman Sumsel yang luas, menjaga keharmonisan adalah tanggung jawab bersama.

"Kerukunan itu bukan formalitas. Ia butuh kesadaran kolektif dan kerja sama dari semua pihak," ujar Herman Deru.

Ia juga menyoroti fenomena meningkatnya intoleransi di dunia digital. Media sosial, katanya, kerap dijadikan alat untuk memecah belah dan menanamkan benih kebencian.

"Virus intoleransi ini kadang tidak terasa, tapi menyebar cepat. Karena

itu kita harus tanggap dan saling mengingatkan," tegasnya.

Herman Deru menekankan bahwa keberhasilan Sumsel mempertahankan status zero konflik selama ini adalah buah dari kerja keras semua elemen masyarakat, termasuk FKUB.

"Kita patut bangga karena Sumsel dikenal sebagai provinsi zero konflik. Tapi jangan terlena. Ini amanah yang harus terus dijaga," katanya.

Ia pun mengingatkan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan lintas agama. Baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, dialog terbuka harus terus dihidupkan.

"Musyawarah adalah jalan terbaik. FKUB jangan pasif, harus menjadi jembatan komunikasi antarumat,"

ujar Herman Deru.

Dalam hal pendirian rumah ibadah, Gubernur meminta agar setiap keputusan diambil melalui kesepakatan bersama yang adil dan saling menghormati.

"Persoalan rumah ibadah ini bukan hal baru. Tapi bisa diselesaikan dengan bijak jika kita menekan ego dan mau duduk bersama," ungkapnya.

Ia juga berharap Rakor ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, melainkan menghasilkan rekomendasi strategis yang memperkuat tumpukan FKUB ke depan.

"Rakor harus menghasilkan produk nyata berupa rekomendasi kerja yang memperkuat toleransi dan persaudaraan," ujarnya.

Herman Deru menegaskan bahwa

kerukunan adalah warisan sosial yang harus dijaga untuk generasi mendatang.

"Mari jaga Sumsel agar tetap jadi contoh provinsi yang damai dan ber-satu," pungkasnya.

Awasi Kelayakan Bangunan Ponpes

Gubernur Herman Deru menginstruksikan seluruh pemerintah daerah di kabupaten dan kota untuk segera melakukan evaluasi terhadap bangunan pondok pesantren (ponpes). Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan para santri serta memastikan kelayakan bangunan pendidikan berbasis keagamaan di Sumsel.

Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Drs H Edward Candra MH memimpin rapat pembahasan rencana pengawasan dan evaluasi bangunan pondok pesantren

Edward Candra menegaskan bahwa isu keselamatan bangunan pondok pesantren bukan hal yang bisa dianggap sepele. Ia mengingatkan bahwa peristiwa runtuhnya bangunan pesantren di Sidoarjo baru-baru ini menjadi peringatan penting agar pemerintah daerah lebih proaktif melakukan pengawasan di wilayah masing-masing.

"Masalah ini sangat serius dan harus kita pahami bersama. Pemerintah daerah perlu segera melakukan tindak lanjut di wilayah masing-masing untuk mengevaluasi kelayakan bangunan pesantren," ujarnya.

Edward menilai langkah cepat Gubernur Herman Deru membentuk Tim Pengawasan dan Evaluasi Bangunan Pesantren merupakan keputusan strategis. Tim ini nantinya akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan pemeriksaan lapangan, mengidentifikasi potensi kerusakan, dan menyusun laporan kelayakan.

Ia berharap hasil evaluasi dapat disampaikan secara menyeluruh, baik yang menunjukkan kondisi bangunan dalam keadaan baik maupun yang membutuhkan perbaikan segera. Laporan tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam

mengambil langkah teknis lanjutan bersama kementerian terkait.

"Dengan demikian, ketika nanti pemerintah pusat meminta laporan terkait kelayakan bangunan publik, kita sudah siap dan dapat bersama-sama mencari solusi terbaik," tegas Edward.

Melalui langkah ini, Pemerintah Provin-

si Sumsel menegaskan komitmennya menjaga keselamatan dan kenyamanan para santri. Gubernur Herman Deru berharap seluruh pondok pesantren di Sumsel dapat menjadi tempat pendidikan yang tidak hanya unggul dalam keagamaan, tetapi juga aman, layak, dan memberikan rasa tenang bagi seluruh penghuni dan masyarakat sekitarnya. ●



Festival Kreatif Sriwijaya 2025 AJANG KOLABORASI DAN KEBANGKITAN WASTRA SUMSEL

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menunjukkan keseriusannya dalam mendorong ekonomi kreatif dengan menggelar Festival Kreatif Sriwijaya 2025 dan launching Wastra Warisan Sumsel, di Dining Hall JSC Palembang. Acara dibuka langsung Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru bersama Ketua Dekranasda Sumsel Hj. Febrita Lustia Herman Deru.

Festival ini menjadi wadah bagi pelaku kreatif lintas bidang mulai dari seni rupa, fashion, kuliner, hingga musik untuk berinovasi dan memperlihatkan karya terbaik yang berakar dari budaya lokal. Herman Deru menyebut kegiatan ini sebagai bukti nyata sinergi antara kreativitas dan pembangunan ekonomi daerah.

mencoba,” ujar Gubernur.

Menurutnya, generasi muda memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Karena itu, ia mengajak semua pihak termasuk orang tua dan pelaku UMKM untuk menanamkan semangat inovasi di setiap langkah anak muda.

Dalam kesempatan yang sama, Gu-

justru harus menjadi simbol modernitas yang berakar pada tradisi.

“Wastra Sumsel adalah warisan yang memiliki nilai budaya tinggi. Kalau kita punya rasa memiliki, maka harga tidak lagi menjadi persoalan. Mari kita mulai dengan kebiasaan memakai wastra setiap Jumat,” imbaunya.

Ketua Dekranasda Sumsel Hj. Feb-



“Festival ini bukan sekadar pameran. Ini adalah ruang bagi gagasan-gagasan besar lahir, berkembang, dan memberi manfaat ekonomi. Anak muda Sumsel harus jadi generasi yang visioner dan tidak takut

bernur Herman Deru menyoroti pentingnya menumbuhkan rasa bangga terhadap produk lokal, terutama wastra atau kain tradisional daerah. Ia menegaskan bahwa kain wastra tidak boleh dianggap kuno, tetapi

rita Lustia HD menjelaskan bahwa launching kali ini menghadirkan Wastra Warisan Sumsel hasil penelusuran dan penenunan ulang kain langka, seperti Kain Songket Ughan dari Kabupaten OKU, yang sebel-

umnya hanya diketahui dari gambar di museum luar negeri.

"Ini adalah bentuk nyata upaya Dekranasda melestarikan budaya daerah. Kami ingin wastra Sumsel tidak sekadar dikenang, tapi juga hidup kembali di masyarakat," ujarnya.

Selain itu, beberapa kabupaten dan kota di Sumsel juga telah berhasil mengangkat kembali kain khasnya, seperti Kain Bidak Cukit dari OKI, Bidak Galah Napuh dari OKU Timur, dan Perlung Besemah dari Pagaram. Semua ini menunjukkan antusiasme daerah dalam menghidupkan kekayaan kain lokal.

Feby Deru pun mengajak seluruh Ketua Dekranasda kabupaten/kota untuk terus berinovasi dan memperbanyak wastra khas masing-masing, tanpa meninggalkan nilai dan motif



tradisional yang menjadi ciri khas daerah.

Festival Kreatif Sriwijaya diharapkan menjadi momentum kebangkitan bagi seluruh pelaku industri kreatif di Sumsel. Dengan dukungan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Sumatera Selatan berpotensi menjadi pusat kreativitas baru di tingkat nasional. ●ADV



STOK PANGAN DI BANTEN SURPLUS SIGNIFIKAN

Gubernur Banten Andra Soni mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kegiatan penanaman jagung serentak kuartal IV tahun 2025 yang digelar di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Rabu 8 Oktober 2025.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Dalam kesempatan itu, Andra Soni menyampaikan bahwa stok pangan di Provinsi Banten saat ini berada dalam kondisi aman dan bahkan mengalami surplus yang signifikan.

"Alhamdulillah, hingga triwulan keempat tahun 2025, cadangan pangan di Provinsi Banten menunjukkan surplus," ujar Andra.

Ia menjelaskan bahwa stok cadangan pangan pemerintah provinsi mencapai 523 ton, melampaui kewajiban minimum sebesar 370 ton, sehingga terdapat kelebihan 153 ton.

Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, ketersediaan cadangan pangan

mencapai 1.982 ton dari target 1.416 ton, atau surplus sebanyak 566 ton

Menurut Andra, capaian ini tidak lepas dari sinergi erat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta dukungan dari Kepolisian Republik Indonesia yang aktif membantu penguatan sektor pertanian melalui berbagai program dan pendampingan.

"Saya meyakini, kolaborasi lintas sektor ini akan terus memperkuat produktivitas pertanian Banten sekaligus mendukung kemandirian pangan nasional," tegasnya.

Andra Soni juga memaparkan perkembangan positif di sektor pertanian. Produksi padi di Banten selama Januari hingga Oktober 2025 mencapai lebih dari 1,7 juta ton gabah kering giling (GKG) dari luas panen sekitar 328 ribu hektare.

Angka ini meningkat 234 ribu ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 1,5 juta ton GKG.

"Kami optimistis, hingga akhir tahun 2025 produksi padi bisa menembus 2 juta ton lebih, dan Banten berpotensi masuk ke dalam delapan besar provinsi penghasil padi nasional," ujarnya.

Selain padi, produksi jagung di Banten juga mencatatkan tren peningkatan. Luas panen jagung pada Januari-Oktober 2025 bertambah 2.539 hektare atau naik sekitar 18 persen dibanding tahun sebelumnya. Produksi jagung pipilan kering pun meningkat 14 persen.

Andra menjelaskan, sebagian besar hasil jagung tersebut diserap oleh 12 industri pakan ternak yang beroperasi di Banten, dengan kebutuhan bahan baku mencapai 1,5 juta ton per tahun.

Untuk menjaga pasokan tersebut,



pemerintah provinsi akan memperluas area tanam terutama di wilayah Banten Selatan dengan target produksi 79 ribu ton jagung pipilan kering per tahun.

“Upaya ini menjadi bagian dari strategi kami untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus berkontribusi terhadap swasembada pangan nasional,” pungkas Andra Soni.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui kegiatan tanam jagung serentak yang digelar di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten.

Gibran tiba di lokasi sekitar pukul 08.56 WIB dan disambut oleh jajaran menteri serta pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raja Juli Antoni, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wapolri Komjen Dedi Prasetyo, Kapolda Banten Irjen Hengki, Gubernur Banten Andra Soni, dan Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran menerima paparan dari sejumlah pejabat terkait kondisi lahan pertanian, perkembangan hasil panen, varietas jagung yang digunakan, hingga metode penanaman modern berbasis mekanisasi.

Usai itu, Gibran secara simbolis menanam jagung hibrida varietas unggul dengan ketahanan genetik alami terhadap penyakit bulai menggunakan alat pertanian traktor.

Selain menanam, Wapres turut menyerahkan bantuan sarana produksi pertanian serta paket sembako dari Polri kepada masyarakat sekitar. Ia juga meninjau sejumlah stan hasil olahan pertanian, produk UMKM lokal Kabupaten Tangerang, dan kegiatan pelayanan kesehatan gratis termasuk pembagian vitamin bagi warga.

Program tanam jagung serentak kuartal IV tahun 2025 ini merupakan kolaborasi antara Polri dan pemerintah daerah dengan total lahan mencapai 50 hektare di wilayah Banten. Dalam kegiatan tersebut, Polri juga melepas

1.268 ton jagung hasil panen dari berbagai daerah untuk diserap langsung oleh Bulog di seluruh Indonesia.

Dukungan Polri tidak berhenti di situ. Jajaran kepolisian turut memberikan bantuan berupa sarana produksi per-

2025 tanpa perlu impor jagung. Upaya ini sekaligus membantu pemerintah menstabilkan pasokan dan harga pangan di dalam negeri,” ujar Listyo Sigit.

Ia menambahkan, sinergi antara Polri, Kementerian Pertanian, dan Bulog



tanian lengkap, seperti benih unggul, pupuk, pompa air, instalasi perpipaan, hingga dryer untuk pengeringan hasil pasca-panen.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa gerakan tanam jagung serentak ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Polri untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Sejak 2020 hingga 2024, Polri telah berkontribusi dalam produksi lebih dari 1,3 juta ton jagung di seluruh Indonesia.

“Alhamdulillah, berkat kerja sama lintas sektor, kita optimistis bisa menjaga kemandirian pangan hingga akhir

berhasil meningkatkan pengadaan jagung hingga 82.413 ton angka tertinggi dalam sembilan tahun terakhir.

Ke depan, Polri menargetkan dukungan penuh terhadap upaya Bulog mencapai target nasional pengadaan 1 juta ton jagung, dengan pasokan tambahan dari hasil panen kuartal keempat tahun ini.

Gerakan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam memperluas lahan produktif, meningkatkan produktivitas petani lokal, serta memperkuat fondasi swasembada pangan berkelanjutan di Indonesia. ●

DBH DIPANGKAS TIDAK MENGGANGGU PEMBANGUNAN JAKARTA

Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat yang mencapai Rp15 triliun dipastikan mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun depan dari semula Rp95 triliun menjadi sekitar Rp79 triliun.

Meski DBH mengalami pemotongan, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, optimistis pembangunan Jakarta akan tetap berjalan.

"Pemerintah Jakarta akan berusaha yang biasanya dengan anggaran yang cukup besar, kurang lebih Rp90 triliun lebih, tahun ini sebenarnya Rp95 triliun akan menjadi Rp79 triliun dan kami tetap harus dengan senyum dan optimisme untuk bisa membangun Jakarta," kata Pramono di Balai Kota, Senin 6 Oktober 2025.

Pramono mengaku akan mencari pembiayaan kreatif dan kemitraan strategis untuk membiayai proyek-proyek besar, di antaranya menggunakan dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan

Lahan/Lokasi (SP3L).

Salah satu contohnya adalah rencana pembangunan TOD Dukuh Atas.

Pramono mengatakan, pembangunan TOD ini tetap akan dilanjutkan, tetapi mekanismenya menggunakan pembiayaan non-APBD, yakni melalui partnership dan lainnya.

Selain itu, Pramono juga menyatakan perlunya mengkaji kembali potensi pendapatan lainnya, termasuk pemberian subsidi besar di sektor transportasi.

"Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya. Berbagai hal yang seperti itu, apakah subsidi transportasi, karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir Rp15.000. Sehingga dengan demikian, dengan berbagai hal kami akan kaji kembali," jelasnya.

Pramono menegaskan Pemerintah



Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan strategi realokasi dan efisiensi anggaran, termasuk mendorong skema pembiayaan kreatif untuk menghadapi pemotongan DBH.

“Untuk itu harus ada realokasi, efisiensi, dan juga stressing pada hal-hal yang tidak boleh dikurangi,” ucapnya.

Pramono memastikan program-program prioritas yang menyentuh langsung kesejahteraan warga tidak akan terganggu, termasuk program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Pemprov DKI Jakarta pun berencana melakukan efisiensi dan refocusing pada program-program non-prioritas.

Dia mencontohkan efisiensi pada perjalanan dinas dan lainnya.

“Kemudian anggaran-anggaran belanja yang tidak atau bukan menjadi prioritas utama, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan minum dan sebagainya,” ujarnya.

Asisten Perencanaan dan Keuangan Setda DKI Jakarta, Suharni Eliawati, menambahkan, Pemprov DKI Ja-

karta akan mencari pembiayaan kreatif untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

“Kami tetap optimistis untuk menyelenggarakan pemerintahan 2026. Bagaimana kemudian kita harus menimbulkan creative financing untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sekarang ini tentu akan semakin meningkatkan layanan kita kepada masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, Pemprov DKI saat ini tengah melakukan proses reposturing atau penataan ulang APBD.

Postur-postur anggaran yang sudah disusun akan dilihat kembali sesuai dengan prioritasnya.

“Sekarang ini adalah pada kita, tataran eksekutif, melakukan reposturing tentang APBD kita,” pungkasnya.

Diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan mengapa Kementerian Keuangan memangkas DBH Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebelumnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta su-

dah ditetapkan Rp 95 triliun pada 2026. Namun setelah DBH dipangkas hampir Rp 15 triliun, APBD provinsi tersebut hanya tersisa Rp 79 triliun. Secara daerah, pemangkasan di APBD DKI Jakarta ini cukup besar dibandingkan provinsi lainnya.

Purbaya menjelaskan pemotongan DBH Pemda dilakukan karena adanya keterbatasan fiskal pemerintah. Dia berjanji akan mengembalikan dana jika perekonomian telah membaik dan pendapatan pajak pusat meningkat.

Dia akan melakukan tinjauan atas kebijakan ini pada akhir kuartal I dan pertengahan kuartal kedua tahun depan. Jika semua membaik, dia memastikan akan mengembalikan DBH yang dipangkasnya ke dalam APBD Pemda.

“Ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan yang meningkat, menjelang pertengahan akhir triwulan pertama tahun depan, pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa. Nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikkan lagi ke daerah,” jelas Purbaya. ●



11 STRATEGI BOBBY NASUTION UNTUK PENGENDALIAN INFLASI

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti tingginya inflasi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang menembus 5,32 persen (year on year) pada September 2025, tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Toms Tohir, menegaskan pentingnya langkah cepat pemerintah daerah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok agar tekanan ekonomi masyarakat tidak semakin berat.

"Inflasi 5,32 persen di satu provinsi itu sudah sangat terasa bagi masyarakat. Kami minta ini menjadi perhatian serius bagi para gubernur," ujar Toms saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin 6 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, selain Sumut, provinsi dengan lonjakan harga cukup tinggi

juga terjadi di Riau, Aceh, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah.

Di Sumut sendiri, beberapa daerah seperti Deli Serdang, Pematangsiantar, Gunungsitoli, dan Padangsidempuan menjadi wilayah dengan tingkat inflasi tertinggi.

Toms meminta seluruh pemerintah daerah lebih aktif turun ke lapangan, melakukan operasi pasar, serta memastikan jalur distribusi pangan berjalan lancar.

"Kalau kita mau bekerja konsisten, harga-harga pangan bisa dijaga agar tidak melonjak liar," katanya menegaskan.

Pemprov Sumut bergerak cepat merespons lonjakan inflasi yang menem-

bus angka 5,32 persen secara tahunan (year on year) pada September 2025.

Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan bahwa pengendalian inflasi kini menjadi fokus utama pemerintah daerah guna menjaga stabilitas harga, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat.

"Inflasi bukan hanya persoalan statistik, tapi nyata terasa dampaknya di dapur masyarakat. Karena itu, kami ambil langkah konkret dan segera agar harga-harga, terutama kebutuhan pokok, bisa kembali terkendali," ujar Bobby dalam keterangan resminya, Selasa 7 Oktober 2025.

Menurut Bobby, lonjakan inflasi di



Sumut terutama dipicu oleh kenaikan harga beberapa komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras.

Untuk menekan gejolak tersebut, Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan 11 langkah strategis yang akan dijalankan dalam tiga bulan mendatang.

Langkah-langkah tersebut antara lain: pembagian gratis bahan pangan penyumbang inflasi, program bundling beras SPHP harga murah dengan cabai merah, percepatan distribusi bantuan pangan, penyelenggaraan pasar murah, pengawasan tata niaga, sidak pasar, monitoring distribusi logistik pangan, kerja sama antar daerah untuk pasokan, penugasan BUMD dalam pengelolaan cabai dan bawang, antisipasi pasokan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penetapan toko pantau inflasi di berbagai titik strategis.

Bobby menegaskan bahwa seluruh program tersebut akan dilaksanakan dengan prinsip 4T, tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat.

"Kebijakan ini tidak boleh berhenti di atas kertas. Masyarakat harus benar-benar merasakan manfaatnya di lapangan," tegasnya.

Lebih lanjut, Bobby menyebut pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar. Diperlukan sinergi lintas sektor, terutama keterlibatan BUMD pangan daerah untuk menjaga stok komoditas strategis.

Ia pun menugaskan PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) agar turun langsung mengelola serta menyalurkan cabai, bawang, dan beras ke pasar-pasar.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menambahkan bahwa selain langkah cepat, pemerintah juga tengah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal serta memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir.

Menurutnya, BUMD pangan akan digerakkan menjadi bagian dari ekosistem pangan strategis, bekerja sama

dengan kelompok tani dan pemerintah kabupaten/kota agar pasokan lebih stabil dan berkelanjutan.

"Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, ketergantungan pada pasokan luar bisa berkurang. Dengan begitu, harga di tingkat konsumen akan lebih mudah dikendalikan," jelas Poppy.

Pemprov Sumut juga memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, dan

Satgas Pangan. Setiap perkembangan terkait kondisi harga dan langkah pengendalian inflasi akan disampaikan secara terbuka melalui siaran pers serta konferensi pers berkala agar masyarakat mendapatkan informasi yang transparan dan terpercaya.

Dengan sinergi lintas lembaga dan komitmen nyata di lapangan, Pemprov Sumut optimistis inflasi akan kembali berada dalam kisaran aman sebelum akhir tahun 2025. ●

11 Langkah Strategis Tekan Inflasi

1. Pembagian gratis komoditas utama penyumbang inflasi.
2. Program bundling beras SPHP dengan cabai merah harga terjangkau.
3. Percepatan penyaluran bantuan pangan.
4. Pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala.
5. Inspeksi mendadak ke pasar dan distributor.
6. Pemantauan distribusi barang kebutuhan pokok.
7. Penguatan kerja sama antar-daerah penghasil pangan.
8. Penugasan BUMD untuk menjaga pasokan cabai dan bawang.
9. Pembentukan "Toko Pantau Inflasi" di sejumlah titik strategis.
10. Pemanfaatan data harga harian untuk deteksi dini.
11. Publikasi dan sosialisasi rutin kepada masyarakat.



PRO DAN KONTRA PROGRAM POE IBU KDM

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), mengeluarkan Surat Edaran Nomor 149/PMD.03.04/KESRA pada Rabu, 1 Oktober 2025, yang menginisiasi gerakan donasi sosial bertajuk Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu).

Program ini mengajak aparatur sipil negara (ASN), pelajar, dan masyarakat umum untuk menyisihkan Rp1.000 per hari sebagai bentuk gotong royong membantu warga yang menghadapi kesulitan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Menurut Dedi Mulyadi, gagasan ini lahir dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Sunda, yaitu silih asah, silih asih, silih asuh.

Ia menilai bahwa gerakan kecil dengan kontribusi sederhana dapat menciptakan dampak besar jika dilakukan bersama.

"Rereongan bukan tentang besar kecilnya jumlah, tapi tentang semangat kebersamaan dan kepedulian sosial," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Dana yang terkumpul akan dikelola oleh panitia di masing-masing wilayah baik instansi pemerintahan, sekolah, maupun komunitas masyarakat dengan tanggung jawab penuh terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Seluruh donasi disalurkan hanya untuk kebutuhan darurat dan mendesak, seperti biaya pengobatan warga tidak mampu, bantuan pendidikan, atau perbaikan fasilitas umum yang vital.

Setiap laporan pengelolaan dana wajib dipublikasikan secara berkala melalui aplikasi Sapawarga dan Portal Layanan Publik Jawa Barat, serta kanal media sosial resmi. Selain itu, pengumpulan dana dilakukan melalui rekening khusus Bank BJB dengan format nama "Rereongan Poe Ibu - [Nama Instansi/Komunitas]".

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar menegaskan, pentingnya transparansi agar gerakan ini tidak disalahartikan sebagai pungutan.

"Gerakan ini murni bentuk solidaritas masyarakat Jawa Barat. Kami ingin

memastikan setiap rupiah tersalurkan tepat sasaran," katanya.

Ia menambahkan bahwa Pemprov Jabar akan melakukan audit internal secara berkala.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada bupati dan wali kota se-Jawa Barat, kepala perangkat daerah, serta

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah daerah diminta untuk menyosialisasikan, memfasilitasi, dan mengawasi pelaksanaan gerakan ini agar berjalan secara sukarela, transparan, dan akuntabel.

Dijelaskan Adi, bahwa Rereongan



Poe Ibu bukan kebijakan fiskal, melainkan gerakan sosial berbasis gotong royong. Pemerintah daerah, kata Adi Komar, tidak mewajibkan siapa pun untuk berdonasi dan tidak ada sanksi bagi yang tidak ikut.

"Ini bukan pungutan, bukan pajak. Ini bentuk solidaritas masyarakat untuk membantu sesama," tegasnya.

Adi juga menyebut, sejak diumumkan, gerakan ini telah mendapat sambutan positif dari sejumlah komunitas dan sekolah yang secara mandiri mengumpulkan donasi untuk siswa atau warga sekitar yang membutuhkan.

Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah dana yang terkumpul, tetapi juga dari kejujuran, keikhlasan, dan keadilan sosial yang mengiringinya nilai-nilai yang menjadi inti dari semangat rereongan masyarakat Jawa Barat.

Namun, inisiatif ini menuai kritik dari sejumlah kalangan, salah satunya datang dari Yanuar Nugroho, pendiri Nalar Institute dan dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan beban moral baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Ajakan berdonasi Rp1.000 per hari

tampak ringan, tetapi tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi warga miskin dan buruh harian yang kini sudah kesulitan akibat inflasi dan melemahnya daya beli," ujar Yanuar pada Selasa, 7 Oktober 2025.

Menurutnya, meski sifatnya sukarela, dalam kultur birokrasi Indonesia batas antara imbauan dan kewajiban kerap kabur.

"ASN, guru, dan pelajar bisa merasa tertekan untuk ikut berdonasi karena adanya hierarki sosial dan tekanan moral," tambahnya.

Yanuar juga mengkritik pendekatan pemerintah daerah yang dianggap menggeser tanggung jawab fiskal negara kepada masyarakat.

"Pendidikan dan kesehatan adalah mandat konstitusional negara. Jika pemerintah mendorong masyarakat membiayai sesamanya secara sistematis, itu tanda beban fiskal sedang dialihkan tanpa mandat hukum yang jelas," tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa tanpa mekanisme pelaporan dan audit yang independen, program semacam ini bisa disalahartikan sebagai pungutan terselubung.

Lebih jauh, ia menilai kebijakan ini bisa menjadi preseden berbahaya bagi daerah lain.

"Jika dibiarkan, nanti muncul semacam pajak sukarela yang dikemas dengan bahasa moralitas," ujarnya. •



SUMATERA BARAT MANTAPKAN DIRI JADI POROS WISATA HALAL NASIONAL

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan posisinya sebagai salah satu motor utama penggerak wisata halal nasional.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah, Sumbar terus memperkuat fondasi ekonomi syariah dan pariwisata berbasis nilai-nilai Islam melalui berbagai kebijakan konkret yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat.

Langkah ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, yang secara tegas menyatakan bahwa arah pembangunan daerah dilandaskan pada falsafah "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" (ABS-SBK).

Falsafah ini bukan sekadar simbol budaya, melainkan menjadi pijakan filosofis dan etis dalam setiap kebijakan pemerintah daerah.

"Nilai-nilai ABS-SBK bukan hanya warisan leluhur, tapi pedoman hidup yang kami terapkan dalam pembangunan Sumatera Barat. Wisata halal, ekonomi syariah, hingga kegiatan sosial keagamaan adalah bentuk nyata penerapan nilai itu," ujar Gubernur Mahyeldi, Kamis 9 Oktober 2025.

Dari Filosofi ke Implementasi Nyata Pemprov Sumbar telah menjadikan wisata halal sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Pendekatannya tidak hanya berhenti pada branding destinasi halal, tetapi pada penciptaan ekosistem wisata yang sesuai syariat, nyaman, dan berkelanjutan.

Salah satu wujudnya adalah pengembangan kawasan ramah muslim di sejumlah destinasi unggulan. Program andalan seperti Zona Kuliner

Halal, Aman, dan Sehat (Zona KHAS) kini hadir di berbagai titik strategis mulai dari Pantai Padang, Kompleks Masjid Raya Syech Ahmad Khatib Alminangkabawi, hingga Sentra Nasi Kapau Bukittinggi.

Semua tenant di kawasan ini telah bersertifikat halal, dilengkapi fasilitas ibadah, serta ruang publik nyaman dan ramah keluarga.

Selain itu, Pemprov Sumbar juga aktif mendorong sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, terutama di sektor kuliner dan produk wisata. Program pendampingan dilakukan bersama Bank Indonesia (BI), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sumbar.

Hasil Nyata di Tingkat Nasional

Konsistensi tersebut membuahkan hasil signifikan. Dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2023, Sumbar berhasil menempati peringkat ketiga



nasional, hanya terpaut dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Aceh.

Selain itu, Sumbar juga meraih Juara Umum Anugerah Adinata Syariah 2023, dengan tujuh kategori unggulan, mencakup sektor pariwisata halal, UMKM syariah, dan literasi ekonomi Islam.

KDEKS Sumbar bahkan dinilai sebagai salah satu lembaga daerah paling progresif di Indonesia dalam memperkuat literasi ekonomi syariah, rantai nilai halal, dan kolaborasi lintas sektor.

Atas capaian tersebut, Sumatera Barat dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional KDEKS se-Indonesia yang akan digelar pada akhir Oktober 2025.

Untuk memperkuat kesadaran publik, Pemprov Sumbar juga secara berkelanjutan menggelar berbagai kegiatan edukatif dan promosi wisata halal. Salah satu agenda unggulan adalah Minangkabau Halal Festival, yang kini menjadi event tahunan bergengsi.

Festival ini memadukan kearifan lokal Minangkabau, budaya kuliner halal, serta pameran produk syariah dan pariwisata religi, mencerminkan karakter Sumbar yang religius, kreatif, dan berdaya saing global.

Tak berhenti di situ, Pemprov bersama KDEKS Sumbar juga tengah menyiapkan Konferensi Wakaf Internasional yang akan diselenggarakan di Padang pada awal November 2025.

Kegiatan ini akan menghadirkan tokoh-tokoh ekonomi syariah dan wakaf dari dalam maupun luar negeri, menjadi forum strategis dalam memperkuat peran wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagi Mahyeldi, penguatan wisata halal tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan moral dan sosial masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pariwisata halal adalah bagian integral dari ekonomi syariah, yang di dalamnya juga mencakup sektor keuangan, filantropi Islam, hingga pemberdayaan umat.

"Kami tidak ingin wisata halal hanya menjadi label promosi. Ini adalah ba-

gian dari ekosistem besar ekonomi syariah yang harus tumbuh dari nilai, budaya, dan keikhlasan masyarakat Sumbar," tegas Mahyeldi.

Dengan pondasi filosofis yang kuat, kebijakan yang konsisten, dan kolaborasi antarlembaga yang solid, Sumatera Barat kini melangkah pasti menuju

poros wisata halal nasional.

Provinsi ini juga diproyeksikan akan menjadi salah satu kandidat kuat penerima penghargaan International Halal Tourism Summit (IHTS) mendatang, mempertegas posisinya sebagai ikon wisata halal berbasis nilai dan keberlanjutan di Indonesia. ●





LAUTAN AWAN DARI PUNCAK GUNUNG DEMPO PAGAR ALAM

Sumatera Selatan (Sumsel) memiliki banyak wisata, termasuk Gunung Dempo yang berada di Kota Pagar Alam.

Bukan hanya untuk pendakian, Gunung Dempo juga jadi destinasi wisata keluarga. Wisatawan bisa menikmati hamparan kebun teh, udara sejuk, spot foto yang indah, hingga menjelajahi kawah dan puncaknya.

Didukung fasilitas dasar yang memadai, daya tarik utama Gunung Dempo adalah kombinasi alam pegunungan,

perkebunan teh, dan budaya Pagar Alam yang membuatnya berbeda dari destinasi lain di Sumatera.

Gunung Dempo adalah gunung tertinggi di Sumatera Selatan (3.159 mdpl) dan menjadi ikon Kota Pagar Alam.

Gunung Dempo terletak di perbatasan Sumatera Selatan dan Bengkulu, gunung ini dikelilingi oleh perkebunan teh yang luas, udara sejuk, dan panorama indah.

Jalur pendakiannya cukup terkenal di kalangan pecinta alam, namun juga ramah untuk wisatawan yang hanya ingin menikmati pemandangan di kaki gunung.

Kebun Teh Gunung Dempo akan menyajikan pemandangan alam yang

memukau dengan hamparan teh hijau yang sangat luas. Dengan keindahan kebun teh yang luas, lautan awan dan latar belakang Gunung Dempo sebagai gunung api strato, dengan warisan budaya.

Berwisata ke Kebun Teh Gunung Dempo yang berada di Kota Pagar Alam Sumsel, kamu akan menikmati pemandangan negeri diatas awan.

Wisatawan dapat menikmati pemandangan perkebunan teh yang luas dengan latar belakang Gunung Dempo, menciptakan ilusi seperti berada di negeri di atas awan. Dari puncak terlihat panorama lautan awan yang sangat luas dan indah, termasuk juga kawah gunung yang menawan.



Kebun teh ini berada di ketinggian sekitar 1.520 meter di atas permukaan laut, sehingga udaranya sejuk dan memberikan suasana damai bagi pengunjung.

Kebun teh ini dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara VII. PTPN VII merupakan perusahaan BUMN yang unit kerjanya terfokus pada agribisnis dan perkebunan.

Selain teh, perusahaan BUMN ini juga mengelola perkebunan lain seperti tebu, karet, dan kelapa sawit.

Menurut data yang dilansir website PTPN VII, Kebun Teh Pagar Alam memiliki luas puluhan ribu hektar. Volume penjualannya mencapai ribuan ton per tahun, yang trendnya selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Setengah hasil Kebun Teh Pagar Alam digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, sebagian lagi diekspor ke luar negeri. Selain terkenal dengan

kopi robusta, Pagar Alam juga salah satu penghasil teh unggulan di Indonesia.

Di sekitar area Gunung Dempo, juga terdapat peninggalan sejarah berupa situs-situs megalit yang terjaga dengan baik, menunjukkan adanya perpaduan budaya dan alam.

Untuk mencapai kebun Teh Gunung Dempo dari Palembang ke Pagar Alam sekitar 7-8 jam dengan kendaraan pribadi. Setelah sampai Pagar Alam, menuju Desa Kampung IV sebagai titik awal pendakian.

Jalan ke Kampung IV dari pusat kota agak berkelok dan melalui kebun teh.

Di puncak Gunung Dempo, terdapat kawah aktif dengan warna hijau kebiruan yang mempesona. Kawah ini sering menjadi spot favorit foto.

Kaki Gunung Dempo menawarkan pemandangan alam yang indah. Tidak heran ketika memasuki waktu akhir pekan dan waktu liburan tiba, tempat ini menjadi salah satu tempat favorit wisata

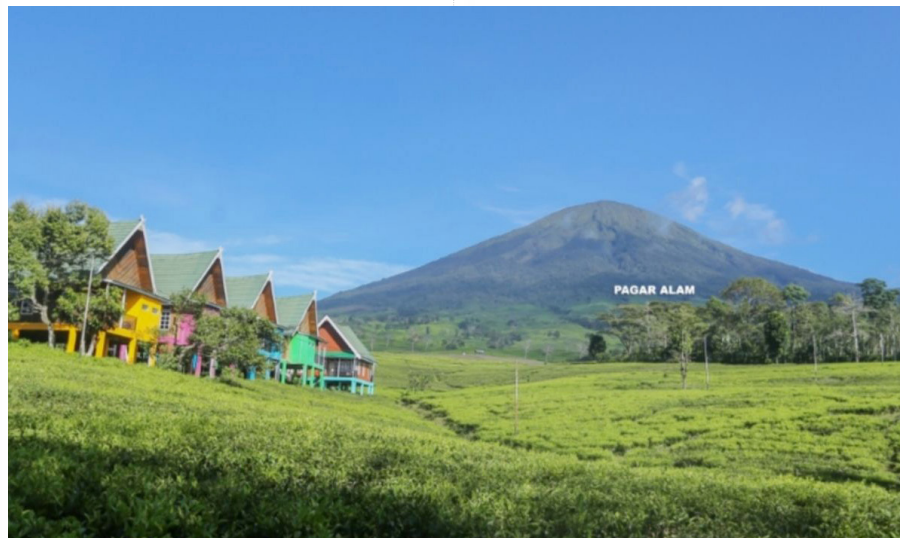
alam di Sumatera Selatan.

Apalagi di lokasi wisata ini sudah banyak ditemukan fasilitas penunjang wisata, seperti tempat penginapan dengan berbagai fasilitas hingga pusat belanja oleh-oleh.

Selain itu, kegiatan menarik lainnya yang bisa dilakukan adalah mengunjungi hamparan perkebunan warga. Jika sedang musim panen, wisatawan bisa membeli berbagai buah dan sayuran yang masih segar langsung dari para petaninya.

Wisatawan yang berkunjung ke kawasan kaki gunung ini biasanya lebih memilih untuk menginap, pasalnya Gunung Dempo juga memiliki pemandangan matahari terbit yang menawan.

Satu yang membuat para wisatawan betah berlama-lama di tempat ini, apalagi jika ditemani dengan secangkir kopi robusta khas Pagaralam yang terkenal kenikmatannya. ●



RAHASIA JALAN KAKI ALA JEPANG YANG BAKAR LEMAK LEBIH EFEKTIF DARI JOGGING

Tren kebugaran asal Jepang yang dikenal sebagai Japanese Walking atau Interval Walking Training (IWT) kini tengah populer karena terbukti mampu membakar lebih banyak lemak dibanding jogging biasa.

Metode ini pertama kali dikembangkan oleh para profesor dari Universitas Shinshu, Jepang, sebagai alternatif olahraga ringan namun efisien untuk meningkatkan kesehatan jantung dan metabolisme tubuh.

Kombinasi Jalan Cepat dan Lambat Berbeda dari jalan santai pada umumnya, Japanese Walking menggabungkan ritme jalan cepat dan lambat secara bergantian. Skemanya sederhana: tiga menit berjalan cepat disusul tiga menit berjalan lambat, diulang selama sekitar 30 menit. Meskipun terlihat mudah, kombinasi ini mampu memberikan efek pembakaran lemak dan peningkatan stamina yang signifikan.

Salah satu pencetus metode ini, Dr. Hiroshi Nore menjelaskan, bahwa IWT dirancang khusus bagi orang yang jarang beraktivitas fisik atau lanjut usia agar bisa mendapatkan manfaat mak-

simal dari olahraga tanpa harus berlari.

Pola interval tersebut membuat tubuh bekerja dalam dua sistem sekaligus, aerobik dan anaerobic yang mempercepat proses pembakaran energi.

Cara Kerja dan Manfaat Ilmiah

Pergantian tempo cepat dan lambat dalam Japanese Walking menstimulasi EPOC (Excess Post-Exercise Oxygen Consumption), yakni kondisi ketika tubuh tetap membakar kalori beberapa jam setelah latihan selesai.

Selain itu, latihan ini juga mengaktifkan mitokondria, pusat energi di dalam sel, yang meningkatkan metabolisme, daya tahan, serta efisiensi pembakaran lemak.

Selama fase cepat, detak jantung naik dan tubuh menggunakan lebih banyak energi, sedangkan fase lambat membantu pemulihan namun tetap mempertahankan metabolisme yang tinggi.

Hasilnya, meski intensitasnya lebih



rendah dari jogging, efek pembakaran kalori dan peningkatan kebugaran justru lebih tahan lama.

Hasil Riset: Lebih Efektif dari Jogging

Penelitian yang dilakukan tim Universitas Shinshu menunjukkan bahwa peserta yang melakukan latihan jalan interval selama lima bulan mengalami penurunan lemak tubuh antara 3-5 kilogram, sementara mereka yang berjalan dengan kecepatan konstan mengalami perubahan yang jauh lebih

Japanese Walking umumnya aman dilakukan oleh siapa pun, terutama pemula, lansia, atau individu dengan gaya hidup sedentari. Latihan ini memiliki dampak yang lebih ringan bagi sendi dibandingkan berlari, namun tetap mampu menstimulasi sistem kardiovaskular dan metabolisme tubuh.

Meski demikian, bagi mereka yang memiliki kondisi medis tertentu seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi yang belum terkontrol, atau gangguan

1. Gunakan pelacak kebugaran (fitness tracker)

Saat fase jalan cepat, usahakan detak jantung berada di kisaran 70-85% dari detak jantung maksimal, kemudian turunkan ke 40-50% saat fase jalan lambat.

2. Gunakan metode "tes bicara" (talk test)

Jika tidak memiliki alat pemantau detak jantung, uji intensitas dengan berbicara. Saat berjalan cepat, Anda masih



kecil.

Dalam studi lanjutan yang dilakukan hingga 10 tahun, para lansia yang rutin melakukan teknik ini juga menunjukkan kondisi fisik lebih stabil dan terhindar dari penurunan kebugaran akibat penuaan.

Selain itu, penelitian tersebut mencatat peningkatan VO₂ max (kemampuan tubuh menyerap oksigen) serta penurunan tekanan darah sistolik. Menurut data dari Harvard Health, peningkatan VO₂ max berhubungan langsung dengan kebugaran jantung yang lebih baik dan risiko penyakit kardiovaskular yang lebih rendah.

Aman untuk Siapa Saja, Tapi Tetap Perlu Waspada

sendi, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli kesehatan sebelum mencoba metode ini.

Dengan panduan yang tepat, Japanese Walking dapat menjadi solusi olahraga efektif, aman, dan menyenangkan untuk menjaga kebugaran di segala usia.

Bahkan metode ini dinilai lebih efektif untuk mendapatkan manfaat kesehatan ketimbang dengan 10.000 langkah per hari tanpa harus menghabiskan waktu lama di luar rumah.

Tips Menguasai Teknik Jalan Kaki Ala Jepang

Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari latihan ini, berikut panduan yang bisa diterapkan:

bisa mengucapkan beberapa kata namun akan terasa terengah-engah. Saat jalan santai, Anda seharusnya bisa berbicara dengan lancar.

3. Tingkatkan secara bertahap

Bagi pemula, mulailah dengan jalan cepat hanya 20-30 detik per siklus, lalu tingkatkan durasinya sedikit demi sedikit hingga mencapai tiga menit penuh.

Dengan kombinasi yang tepat antara kecepatan, ritme, dan konsistensi, jalan kaki ala Jepang bukan hanya cara praktis untuk meningkatkan kebugaran, tetapi juga strategi cerdas untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan metabolisme bahkan tanpa harus menempuh 10.000 langkah setiap hari. ●



TRAGEDI RUANG GANTI TERJADI LAGI

Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert diguncang isu keretakan antara pemain dan pelatih hingga menimbulkan ketegangan di ruang ganti menjelang lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Isu tragedi ruang ganti juga pernah terjadi di masa Shin Tae Yong yang berakhir dengan pemecatan sang pelatih.

Kini tragedi di ruang ganti kembali terjadi. Sebelum pertandingan sempat terjadi perdebatan internal saat tim kepelatihan menentukan starting XI Timnas Indonesia saat lawan Arab Saudi. Beberapa pemain merasa emosi saat Patrick Kluivert menurunkan pemain yang pada akhirnya.

Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes mengakui ada suasana panas menyelimuti pemain seperti Justin Hubner dan beberapa pemain lain yang tidak puas dengan strategi pelatih.

"Sekarang kami dalam perasaan yang buruk, emosinya sangat tinggi. Bahkan di ruang ganti pemain penuh emosi," kata Jay Idzes.

Bahkan pemain temperamen Justin Hubner sempat meluapkan emosinya, dan itu ia tulis di akunnya. "Kita semua bisa setuju siapa yang seharusnya ada di lapangan"

Namun tulisan itu kemudian dihapusnya dan menulis penyesalan terhadap luapan emosinya saat itu.

"Setelah posting saya kemarin setelah pertandingan saya benar-benar ingin meminta maaf kepada semua rekan tim saya, staf dan seluruh negeri. Itu keputusan emosional dari diri saya sendiri apa yang tidak akan pernah terjadi lagi Saya

selalu ingin yang terbaik untuk TIMNAS dan negara" tulis Justin Hubner di Instagram story miliknya.

Sementara Manajer Timnas Indonesia, Sumardji menjelaskan bila memang ada perdebatan dalam tubuh Timnas Indonesia mengenai pemilihan starting XI Patrick Kluivert. Namun Sumardji coba mengerti dan menerima keputusan Kluivert karena bagaimanapun soal pemilihan pemain tanggungjawab ada di tangan pelatih kepala.

"Ya itu menjadi catatan kami terutama kemarin kita sebenarnya, saya sudah banyak berdiskusi dengan tim kepelatihan berkaitan dengan 11 pemain yang

jadi starter," kata Sumardji

"Saya sampaikan berulang kali mulai dari Yakob, mulai dari Klok, semua saya tanya satu-satu. Dan benar itu jadi perdebatan. Kondisi itu memang ya boleh dikatakan semua tergantung pelatih ya. Pelatih sudah mempersiapkan itu dari ujicoba-ujicoba sebelumnya," tambahnya.

"Kalau kita lihat pertandingan semalam ya berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya pasti disitu ada Jay, ada Ridho lalu Justin dan hasilnya bagus gitu. Tapi ya kembali lagi bahwa semua ini adalah strategi yang dipilih Patrick Kluivert."



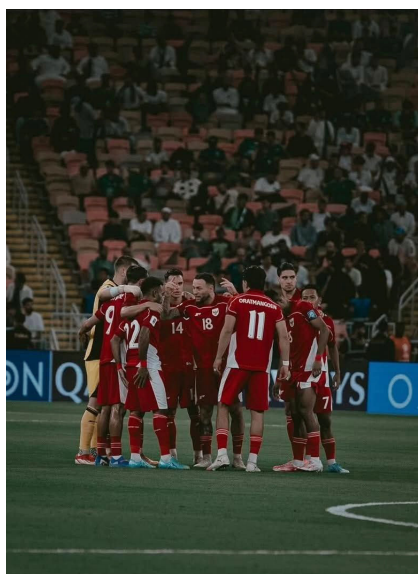
“Tentunya strategi ini sudah dipikirkan matang-matang. Dan pasti kita sudah diskusi dan setelah hasilnya tidak bagus tentu kita malam lakukan evaluasi, agar supaya tidak terulang lagi saat kita memilih 11 pemain,” imbuhnya.

Sumardji juga meminta kepada fans



Timnas Indonesia untuk tidak melakukan perundungan kepada Marc Klok, Yakob Sayuri, hingga Beckham Putra Nugraha.

“Jadi begini, para pemain ini kan menjalankan peran itu sesuai dengan strategi, taktik yang diinginkan oleh pelatih,” ujar Sumardji. ●



DINILAI KURANG PAHAM DENGAN PEMAIN

Singkatnya pertemuan dan kurangnya kebersamaan antara pemain dan tim kepelatihan membuat Patrick Kluivert mengalami kendala dalam memahami kemampuan dan karakter pemain. Sehingga saat laga melawan Arab Saudi, sang pelatih salah melakukan penempatan pemain hingga harus bermain dalam kondisi tertekan.

Pengamat sepakbola, Abdul Haris merasa tak yakin Patrick Kluivert kenal dengan pemain-pemainnya di Timnas Indonesia. Penilaian itu muncul karena Patrick Kluivert memainkan Yakob Sayuri sebagai full back kanan di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi di matchday pertama Grup B babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

“Saya gak yakin Patrick Kluivert kenal dengan pemain-pemainnya seperti era Shin Tae-yong yang dekat dengan para pemainnya. Bisa dilihat Yakob Sayuri itu bukan bek kanan, tapi dimainkan sebagai bek kanan,” kata Abdul Haris.

Sebelumnya, Patrick Kluivert menurunkan Yakob Sayuri sebagai bek kanan saat Timnas Indonesia bermain 0-0 dengan Lebanon di FIFA Matchday September 2025. Dalam laga itu, Yakob Sayuri tidak bermain optimal dan justru kembali dimainkan di posisi tersebut saat menghadapi Arab Saudi.

Akibatnya, Yakob Sayuri berandil atas dua dari tiga gol yang dibuat Arab Saudi ke gawang Timnas Indonesia. Salah satunya ketika pemain milik Malut United ini menjadi penyebab Arab Saudi dihadiah penalti setelah menarik baju Feras Albrekan di kotak terlarang.

Yakob Sayuri memang pernah bermain sebagai fullback kanan. Namun, peran ini terakhir dijalani bersama sang klub, Malut United, musim lalu.

“Dipanggilnya Yakob, Marc Klok dan Beckham ke Timnas Indonesia sebenarnya masuk akal. Sebab, mereka sedang bagus di Super League. Tapi, untuk memainkan Yakob, Marc Klok dan Beckham sebagai starter melawan Arab Saudi di laga penting

seperti ini, saya pikir urusan lain,” kata Abdul Haris.

“Dalam kondisi seperti ini, Patrick Kluivert seharusnya menurunkan pemain yang lebih siap. Ketimbang memainkan Beckham, sebenarnya ada Ragnar Oratmangoen yang dapat dimainkan di posisi tersebut (winger kiri). Sementara untuk posisi penyerang tengah ada Ole Romeny dan Mauro Zijlstra yang dapat diandalkan,” tutup Bung Ais.

Tidak Enak Hati

Penempatan kacau ala Patrick Kluivert karena ia tak enak jika menurunkan starting XI full diaspora di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi. Karena itu, pelatih asal Belanda ini memilih memainkan empat pemain yang merumpuk di Super League sebagai starter melawan Arab Saudi, yakni Yakob Sayuri, Beckham Putra, Marc Klok dan Ricky Kambuaya.

“Ada statement yang mengatakan mereka (tim kepelatihan Timnas Indonesia) tidak enak jika menampilkan semua pemain diaspora. Karena itu, mereka memilih menurunkan Beckham Putra, Ricky Kambuaya, Yakob Sayuri dan Marc Klok sebagai starter,” kata Bung Harpa -sapaan akrab Haris Pardede, mengutip dari channel YouTube Bung Harpa.

Sementara Patrick Kluivert sendiri mengakui kalau mereka kurang persiapan dan kebersamaan saat menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026.

“Faktanya, para pemain bermain di luar negeri, kami tidak bisa berlatih bersama dalam waktu yang cukup. Jadi, ini memang salah satu kesulitan yang selalu kami hadapi.”

“Pemain terakhir baru datang kemarin, dan tentu itu tidak ideal untuk mempersiapkan diri dengan baik menghadapi laga penting seperti ini.”

“Jika kami bisa berlatih bersama sebagai satu tim sejak awal kualifikasi, mungkin kami bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi sekali lagi, saya bangga dengan para pemain, dengan usaha yang mereka lakukan,” ujar Patrick Kluivert. ●



6 JURUS PURBAYA KEJAR TARGET PAJAK

Pemerintah mengebut berbagai langkah hasil cepat atau quick win untuk mengejar penerimaan pajak 2025 yang masih jauh dari target. Namun, proyeksi tren melemahnya penerimaan, celah kepatuhan wajib pajak, serta potensi terpengkasnya setoran akibat kebijakan insentif, membayangi kerja otoritas fiskal dalam mencapai target APBN 2025.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak pada periode Januari-Agustus 2025 tercatat Rp1.135,4 triliun atau minus 5,1 persen dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp 1.196,54 triliun. Per Agustus 2025, realisasi penerimaan pajak baru mencapai 54,7 persen dari outlook APBN 2025 senilai Rp2.076,9 triliun.

Secara nominal, sisa penerimaan yang perlu dikejar tahun ini mencapai sekitar Rp941,5 triliun. Jika mengacu pada tren 2022–2024, rata-rata kontribusi empat bulan terakhir berkisar 31,5 persen hingga 38 persen dari outlook di setiap tahun.

Jika kinerja penerimaan pajak di empat bulan terakhir tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, maka proyek-

erimaan pajak dengan target.

“Ada beberapa effort yang sedang kami jalankan. Saya yakin tidak ada masalah,” kata Purbaya pada media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat, 26 September 2025.

Pada konferensi pers APBN Kita, Senin, 22 September 2025, Purbaya memaparkan, sedikitnya terdapat enam program yang ia yakini dapat mengungkit kinerja penerimaan di sisa 2025.

Program pertama ialah mendorong pertumbuhan ekonomi agar setoran pajak meningkat tanpa menaikkan tarif. Pemerintah menempatkan dana menganggur senilai Rp200 triliun di lima bank milik negara untuk memperluas peredaran uang primer (M0).

“Kalau ekonominya tumbuh kencang, pajak juga naik dan masyarakat membayarnya tanpa terasa,” kata Purbaya.

Langkah kedua adalah penagihan tunggakan pajak terhadap 200 wajib pajak besar dengan potensi setoran Rp50–60 triliun. Penagihan ini melibatkan kejaksaan, kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Ketiga, Kemenkeu menargetkan percepatan penyelesaian masalah sistem inti administrasi pajak (Coretax) yang sempat mengalami downtime. Purbaya berencana mendatangkan ahli teknologi informasi dari luar negeri agar perbaikan selesai dalam satu bulan.

Program keempat difokuskan pada pemberantasan rokok ilegal, termasuk produk impor yang beredar melalui jalur hijau bea dan cukai atau platform daring. Purbaya menegaskan tidak akan segan menindak aparat yang terlibat.

Program kelima adalah percepatan belanja negara di kementerian dan lembaga. Purbaya menilai percepatan ini dapat menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi, dan pada gilirannya meningkatkan penerimaan pajak.

Sementara program keenam merupa-



si penerimaan tahun ini hanya akan mencapai 86,2–92,7 persen dari outlook.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku telah melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk melancarkan implementasi program jangka pendek yang dia siapkan.

Dia yakin program ini dapat menjadi pengungkit penerimaan untuk mengecilkan selisih antara realisasi pen-



PEMERINTAH MINTA 12 PERSEN SAHAM FREEPORT GRATIS

Pemerintah Indonesia memastikan akan mendapatkan tambahan saham 12 persen PT Freeport Indonesia (PT FI). Penambahan saham ini juga bakal memperpanjang izin tambang Freeport.

Saat ini, saham PT Freeport Indonesia dikuasai oleh Pemerintah Indonesia sebesar 51,2 persen. Kepemilikan saham pemerintah terdiri atas 26,24 persen saham milik PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) dan 25 persen dimiliki PT Indonesia Papua Metal dan Mineral. Nantinya, dengan penambahan 12 persen, apabila dikalkulasikan pemerintah RI bakal menggganggam 63,2 persen saham Freeport.

"Negosiasi tambahan Freeport sudah saya nyatakan final. Sudah penambahan 12 persen," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.

Penambahan saham ini akan diikuti perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP). Namun, Bahlil mengatakan, mereka masih akan mengevaluasi kebijakan tersebut.

"Nanti kami lihat. Sekarang, kan, tambang yang ada ini (IUP-nya) sampai dengan tahun 2041. Tanggalnya berapa, lagi dibicarakan sekarang," kata Bahlil.

Pada 26 September 2025, Bahlil mengatakan, dengan permintaan divestasi atau pelepasan saham Freeport-McMoran ke pemerintah, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT FI akan diperpanjang lagi selama 20 tahun hingga 2061. Perpanjangan ini akan berlaku setelah kontrak saat ini habis pada 2041.

Penawaran perpanjangan izin operasional tersebut, menurut Bahlil, dilakukan karena produksi tambang bawah tanah mereka di daerah dataran tinggi Kabupaten Mimika, Papua Tengah, baru akan mencapai puncaknya pada 2035. Tambang bawah tanah baru mulai dieksplorasi pada 2004 dan baru berproduksi pada 2020.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia mengungkap proses divestasi 12

persen saham PTFI dari Freeport-McMoran ke pemerintah akan dilakukan melalui MIND ID.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan, proses negosiasi sudah berjalan dan sudah sepakat penempatan saham sebesar 12 persen free of charge. Saat ditanya soal waktu penyelesaiannya, Rosan menyebutkan prosesnya akan segera rampung dan masih dalam tahap finalisasi.

"Semua kesepakatannya sudah kita setuju, yang kami negosiasikan, boleh dibilang sudah semuanya selesai dan sekarang tinggal melihat draft dari detailnya saja. Tapi kesempatan prinsipnya itu sudah tercapai," kata Rosan di Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025.

Menurut Rosan, alasan free of charge lantaran kesepakatan itu hasil dari proses negosiasi panjang. Ia menyebut pembahasan tersebut sudah berlangsung lebih dari enam bulan lebih.

Rosan juga baru-baru ini bertemu dengan CEO Freeport McMoran, Kathleen Quirk, dan Chairman Freeport McMoran, Richard Adkerson, di Amerika Serikat.

"Tentunya dengan ada ini, kami juga akan lebih memastikan lagi, dari segi

keselamatan, dari segi world class mining, operasinya juga terus terjaga,” tambah Rosan.

Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, mengatakan belum bisa berkomentar lebih lanjut karena belum ada proses penandatanganan kesepakatan.

“Kalau kami memang masih didiskusikan terus. Kalau dikatakan sudah final, sudah disepakati dan diteken, baru mungkin itu dikatakan final,” kata Tony.

Terkait dengan perpanjangan kontrak, ia juga mengatakan hal itu masih dibicarakan dengan pemerintah.

Tony juga enggan mengkonfirmasi apakah saham yang dilepaskan mencapai 12 persen dan free of charge, sebagaimana yang diklaim pemerintah. Perusahaan belum bisa berkomentar lebih jauh karena baru saja menyelesaikan proses evakuasi pekerja yang terdampak insiden longsor tambang Grasberg Block Cave.

Adapun produksi PT FI diperkirakan bakal mengalami penundaan yang signifikan dalam waktu dekat, yakni pada triwulan IV-2025 dan baru akan pulih perlahan selama 2026. Penundaan produksi terjadi karena insiden terjalangan lumpur di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave pada 8 September 2025.

Dalam skenario produksi secara bertahap di Grasberg Block Cave, produksi PT FI pada tahun depan berpotensi turun sekitar 35 persen dari estimasi sebelum insiden, yakni sekitar 1,7 miliar pon atau 771 juta tembaga dan 1,6 juta ons atau sekitar 450.000 kilogram emas. Namun, estimasi tersebut bisa berubah bergantung banyak faktor.

Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Akmaluddin Rachim, menilai, dalam perpanjangan izin operasi produksi Freeport nantinya, perlu ada penambahan klausul terkait keselamatan kerja dan aspek lingkungan, selain aspek penambahan saham untuk Pemerintah Indonesia.

Untung dan Rugi

Pengamat BUMN sekaligus Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia, Danang Widoyoko, berpendapat proses akuisisi saham itu masih belum jelas. Terlebih, pemerintah belum bisa memastikan berapa persen penam-

bahan saham yang dimaksud.

“Ketidakjelasan regulasi berdampak pada kesimpangsiuran soal divestasi, dibeli di harga berapa, atau gratis dengan ongkos biaya eksplorasi ditanggung bersama. Ini dampak dari ketidakjelasan regulasi,” ucap Danang.

Dia menilai upaya nasionalisasi sumber daya alam yang dilakukan tanpa kejelasan regulasi dapat menyulitkan investasi asing. Danang juga berpendapat nasionalisme sumber daya belum tentu memberikan keuntungan kepada negara.

Dia mencontohkan, perusahaan eks-

gai pungutan. Negara tinggal mengatur besar kecilnya pungutan,” ucap Danang.

Dia pun mengingatkan pemerintah melalui BUMN lebih baik menggunakan modal untuk eksplorasi dan eksploitasi tambang yang lain. Sebab, pemerintah saat ini sudah menguasai 51 persen saham PTFI sekaligus menjadi pengendali.

Sementara itu, Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Ishak Razak, menilai penambahan kepemilikan saham di PTFI akan membawa sejumlah keuntungan signifikan bagi negara. Hal ini terutama peningkatan dari total royalti,



Belanda yang diambil alih melalui nasionalisasi pada masa Soekarno. Banyak di antaranya yang kemudian bangkrut. Menurutny, tanpa diambil alih atau kepemilikan negara ditambah, perusahaan sebenarnya tetap memberikan kontribusi.

“Misalnya saja, perusahaan tetap 100 persen milik Amerika. Toh, perusahaan tetap bayar pajak, bea ekspor dan berba-

pajak, dan dividen, yang bisa menghasilkan tambahan ratusan juta dolar AS per tahun.

“Keuntungan ini bisa digunakan untuk melakukan investasi lebih lanjut, termasuk pembayaran biaya akuisisi pada biaya investasi yang telah dikeluarkan PTFI dalam waktu singkat,” ucap Ishak.

Kendati demikian, harus ada kepastian pengendalian atas operasional dan

• INFO EKONOMI

keuangan yang dapat menjadi modal untuk memperkuat hilirisasi, termasuk peningkatan kapasitas smelter Gresik yang dapat menciptakan ribuan lapangan kerja. Selain itu, peningkatan investasi tersebut harus meningkatkan perbaikan kualitas lingkungan yang rusak akibat kegiatan pertambangan. Ini termasuk percepatan pembangunan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia masyarakat di lokasi tambang.



"Meskipun demikian, perlu diantisipasi proses peralihan tersebut tidak mengganggu proses produksi, sehingga menurunkan ekspor dan pendapatan negara," kata Ishak.

Hal berbeda disampaikan Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, yang menilai kebijakan ini tidak sebanding dengan keuntungan yang akan diterima Indonesia. Hal ini lantaran biaya investasi dan operasional Freeport diperkirakan akan meningkat.

"Benefit diterima Indonesia hanya sebatas kenaikan dividen. Padahal, Freeport akan mulai undermining yang membunuh investasi dan biaya operasional membengkak, sehingga menurunkan laba yang pada gilirannya mengurangi dividen," ujarnya, Kamis, 9 Oktober 2025.

Fahmy menilai, penambahan saham yang diikuti perpanjangan kontrak justru bisa merugikan negara. Ia memperingat-

kan, kondisi tersebut berpotensi menukarkan, bahkan meniadakan dividen bagi Indonesia di masa mendatang.

"Bahkan, dimungkinkan tidak akan dapat dividen kalau Freeport mengalami rugi usaha di kemudian hari akibat membengkaknya biaya untuk proses undermining," terangnya.

Karena itu, Fahmy menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan ulang, bahkan membatalkan kebijakan penam-

bahan saham tersebut. Menurutnya, peluang pembatalan masih terbuka karena kesepakatan itu belum mengikat secara hukum.

"Presiden Prabowo saya kira masih bisa membatalkan kesepakatan tersebut dengan pertimbangan kepentingan negara," ungkapnya.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushop), Bisman Baktiar, menilai, sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengambil alih saham Freeport.

"Penambahan divestasi saham Freeport ini tujuan baik. Namun tidak mendesak, mengingat saat ini pemerintah melalui MIND ID sudah memegang saham mayoritas.

Jadi penambahan divestasi tidak perlu terburu-buru dan selesai sekarang juga," ungkap Bisman.

Bisman menyebut, hal ini juga berkaitan dengan dampak jangka panjang atas insiden longsor yang telah

menimpa tambang bawah tanah Grasberg Block Cave.

Dalam pernyataannya, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan Grasberg hanya mampu memproduksi 30 persen dari total produksi semestinya.

Melansir data produksi PTFI, sepanjang tahun lalu, tembaga yang diproduksi Freeport sebesar 1,8 miliar pound, dengan produksi emas mencapai 1,84 juta ounces atau sekitar 56 ton. Dari total tersebut, Grasberg menyumbang 64 persen dari total produksi PTFI pada 2024.

"Saat ini dengan longsor Grasberg tambang tidak bisa beroperasi secara normal yang akan berpengaruh pada produksi, pendapatan termasuk juga tanggung jawab," tambah Bisman.

Pemerintah Indonesia juga harus mempertimbangkan tanggung jawab atas pemulihan lingkungan dan korban jiwa usai menambah kepemilikan saham.

"Perlu diperjelas dalam kesepakatan dan perjanjian tentang pembagian kewajiban pemulihan lingkungan termasuk juga tanggung jawab pada korban. Dan yang paling penting apakah penambahan saham ini juga diikuti dengan posisi sebagai pengendali penuh dan mempunyai akses kontrol operasional lebih kuat," jelasnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, menekankan, divestasi saham Freeport harus memenuhi dua syarat utama.

"Pertama, apakah pemerintah dengan akuisisi saham lebih besar bersedia menyelesaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan PTFI? Kalau saham makin besar tapi eksternalitas negatif PTFI ditanggung pemerintah, ini namanya ketiban masalah bukan malah untung," jelas dia.

Kedua, kepastian dari aspek nilai tambah produk tembaga dan emas PTFI yang dapat dirasakan lebih banyak oleh masyarakat.

"Langkah ini (divestasi) perlu pertimbangan ruang fiskal. Kondisi penerimaan pajak sedang turun, sementara akibat longsor tambang PTFI kemarin, ada risiko investasi tambahan jadi lebih tinggi," kata Bhima. ●

MINGGU MALAM PRESIDEN PRABOWO PIMPIN PERTEMUAN BAHAS ISU STRATEGIS SEKTOR KEUANGAN

Presiden Prabowo Subianto memimpin pertemuan yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming beserta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, di Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin yang digelar secara berkala oleh Presiden untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan program pemerintah.

Salah satu fokus utama pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai kondisi dan stabilitas sistem keuangan serta sistem perbankan nasional. Presiden Prabowo juga menyoroti implementasi kebijakan terbaru pemerintah terkait pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) yang telah diatur melalui peraturan pemerintah.

Dalam pertemuan itu, Presiden turut memberikan arahan dan pembaruan mengenai capaian program-program prioritas pemerintah di berbagai sektor.

●Sumber: BPMI Setpres



Presiden Prabowo juga menyoroti implementasi kebijakan terbaru pemerintah terkait pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) yang telah diatur melalui peraturan pemerintah..





PROYEKSI 4,7 PERSEN, INDONESIA MAU LEBIH TINGGI

Bank Dunia masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di bawah lima persen. Masih perlu pembuktian.

Laporan Bank Dunia (World Bank) tentang Ekonomi Asia Timur dan Pasifik Edisi Oktober 2025 memproyeksikan pertumbuhan Tiongkok, Kamboja, dan Indonesia masing-masing tumbuh sebesar 4,8 persen pada 2025. Sebelumnya, pada April 2025, Bank Dunia malah memproyeksikan pertumbuhan Indonesia lebih rendah lagi, 4,7 persen.

Dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update yang terbit pada Selasa, 7 Oktober 2025, Bank Dunia mencatat pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara kawasan Asia Timur dan

Pasifik (EAP) masih relatif tinggi. Namun, sejumlah langkah yang diambil untuk mempertahankan laju pertumbuhan saat ini dinilai belum tentu mampu mendukung pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Proyeksi pertumbuhan ini, menurut Bank Dunia dipengaruhi oleh meningkatnya hambatan perdagangan, ketidakpastian kebijakan ekonomi global yang tinggi, pertumbuhan global yang melambat, serta ketidakpastian politik dan kebijakan domestik yang meningkat.

Bank Dunia menyoroti bahwa pertumbuhan tahunan di China dan Indonesia yang mencapai sekitar lima persen, melampaui estimasi potensi pertumbuhan berkat dukungan pemerintah. Laporan tersebut menyebutkan pula, tantangan fiskal (anggaran) di Indonesia lebih berkaitan dengan komposisi belanja pemerintah ketimbang besaran defisit, yang diperkirakan masih sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam aturan fiskal nasional.

"Saat ini, alokasi anggaran pemerin-

tah Indonesia difokuskan pada subsidi untuk sektor pangan, transportasi, dan energi, serta investasi yang digerakkan oleh negara guna mendorong peningkatan permintaan agregat dalam perekonomian," ungkap laporan Bank Dunia.

Di sisi lain, Bank Dunia menilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cenderung menunjukkan produktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan swasta dalam sektor manufaktur yang sama. "Selain itu, keberadaan BUMN dikaitkan dengan berkurangnya penciptaan lapangan kerja dan produktivitas perusahaan lain di sektor tersebut," ungkap laporan yang sama.

Nah, terkait dengan laporan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal III (Juli-September) 2025 berpotensi melambat dipicu sejumlah indikasi ekonomi. Perlambatan juga tercermin dari munculnya aksi demonstrasi. "Mungkin triwulan ketiga akan lambat karena memang perlambatan kemarin. Anda lihat demo-demo itu

kan. Itu sebetulnya indikasi ekonomi yang melambat,” ujar Purbaya, Rabu, 8 Oktober 2025.

Namun, sambungnya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV (Oktober-Desember) 2025 akan tumbuh lebih cepat. Purbaya malah memproyeksikan ekonomi pada kuartal terakhir tahun ini akan melesat hingga 5,5 persen.

“Jadi 5,5 persen untuk triwulan IV saja ya. Buat saya tidak penting pernah jatuh, yang penting ke depan arahnya ke mana. karena kita lihat ke depan akan naik terus,” tegas Purbaya.

Sedangkan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, menyebutkan proyeksi ekonomi World Bank (Bank Dunia) yang pesimis tidak mencerminkan kondisi riil Indonesia. Ia juga menyarankan tidak terlalu mempercayai proyeksi tersebut.

“World Bank kan enggak tahu tentang fiskal kita,” kata Febrio menjawab pertanyaan wartawan di kantor DJP Kemenkeu, Kamis, 9 Oktober 2025.

Febrio menjelaskan, Bank Dunia tidak mengetahui secara mendalam kondisi fiskal dan langkah-langkah kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah, seperti penempatan dana Rp 200 triliun sebagai stimulus. Stimulus tersebut, sambungnya, diperkirakan mampu mengerek pertumbuhan ekonomi hingga mencapai level di atas 5%.

Oleh sebab itu, Febrio menilai proyeksi Bank Dunia sebaiknya dianggap sebagai masukan atau umpan balik (feedback) semata. Terlebih, lembaga ini seringkali meleset dalam memprediksi kinerja ekonomi Indonesia.

“Ya sudah bagus itu (proyeksi ekonomi) sebagai feed-

back. Kita senang banyak orang yang ngeliatin ekonomi Indonesia, berarti mereka tertarik,” tambahnya.

Febrio optimistis perkiraan pertum-

buhan ekonomi Indonesia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa tercapai, yakni 5,2 persen di 2025 dan 5,4 persen di 2026. “Kita optimis untuk 2025 bisa 5,2 persen. World Bank itu kalau kalian lihat juga beberapa tahun terakhir kan selalu miss. Ya sudahlah bagus itu sebagai feedback, kita senang banyak orang yang liatin ekono-

berapa? Kalau terlalu mahal ya kita nggak mau juga. Banyak orang dari lembaga internasional pengin investasi di Indonesia, makanya mereka pantau terus. OECD itu juga perpanjangan tangan dari negara-negara OECD, dia ingin tahu makanya dia selalu buat forecast. IMF juga sama, ADB juga sama, World Bank juga sama,” ujarnya.



aneous interpretation will be available in Indonesian, Chinese, Mongolian, Thai, and Vietnamese

Register Now

mi Indonesia berarti mereka tertarik,” ujar Febrio.

Menurut Febrio, lembaga internasional seperti Bank Dunia hingga Dana Moneter Internasional (IMF) ingin investasi di Indonesia melalui penanaman modal. Makanya mereka rajin membuat studi tentang Indonesia.

“W o r l d

Bank itu kan bukan lembaga auditor atau apa. World bank itu dia mau investasi di Indonesia, kita tanya bunganya

Menurut dia, lembaga internasional itu membuat studi untuk mewakili kebutuhan investor dari negara-negaranya yang ada di Indonesia. Meski demikian, ia menyambut baik masukan yang diberikan untuk menjadi perhatian pemerintah ke depan.

“Jadi, mereka ingin investasi di Indonesia sehingga selalu mereka pantau. Kita justru malah melihat dan menyambut baik mereka terus memantau perekonomian Indonesia, artinya mereka ingin investasi karena mereka itu bukan iseng-iseng bikin forecast, bikin studi. Mereka itu mewakili kepentingan kebutuhan investor-investor yang mereka bawa,” tandasnya.

Toh proyeksi tetaplah proyeksi. Akhir tahun kelak kita akan melihat bukti. •

KOPERASI MERAH PUTIH SEGERA BERTAMBAH

Melalui sebuah surat keputusan bersama (SKB) pengembangan Koperasi Merah Putih sudah lebih jelas. SKB itu melibatkan Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

SKB itu menjadi landasan pemerintah menggelontorkan pendanaan dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih. Masih terkait dengan SKB, sebelumnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang menargetkan pembentukan kopdes/kopkel di lebih dari 80.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, keputusan bersama ini menjadi bagian dari upaya percepatan realisasi pembangunan KopDes/Kel Merah Putih. Harapannya, realisasi pembangunan 80.000 koperasi ini akan segera dilaksanakan.

“Mudah-mudahan dalam waktu

Ferry menegaskan bahwa mekanisme pembiayaan akan dijalankan seperti skema umum perbankan agar masyarakat desa dapat menjadi subjek aktif dalam pengelolaan ekonomi. “Kami ingin masyarakat desa bukan hanya menjadi objek pembangunan, tapi pelaku yang berdaya,” tegasnya.

Sedangkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani memastikan, pihaknya akan menyiapkan dukungan pendanaan dari APBN untuk pembangunan KopDes/Kel Merah Putih. Dukungan akan diberikan untuk pembangunan 80.000 koperasi.

“Kemenkeu siap mendukung Insyaallah pendanaan untuk KopDes/Kel Merah Putih. Itu akan kita support penuh dari dukungan APBN dan tentunya dari bentuk lokasi yang akan kita siapkan, apakah dari transfer ke daerah (TKD) atau dari belanja lainnya, yang menjadi komitmen kita bersama,” ujar Askolani.

Askolani berharap, kesepakatan yang terjalin antara kementerian/lembaga (KL) pada hari ini dapat sesegera mungkin direalisasikan. Pemantauan juga akan terus dilakukan untuk mengawal realisasinya di tahun 2025 ini hingga dalam jangka menengah.

Namun demikian, tidak disebutkan berapa dukungan pendanaan yang akan diberikan. Ia menjelaskan, dana tersebut akan disalurkan secara bertahap untuk dipergunakan dalam pembangunan 80.000 koperasi.

CEO Danantara Rosan Perkasa Roestlani menjelaskan, pembangunan ini salah satunya akan berasal dari dana desa yang dialokasikan melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dana dipergunakan untuk pembangunan gerai hingga gudang. “Pembangunan ini berasal dari dana desa yang akan dialokasikan melalui Menteri Keuangan, dengan atas dasar Kementerian Desa pengalokasiannya,” jelas Rosan.

Saat dimintai penjelasan tentang



sesegera mungkin kita akan melaksanakan proses pembangunan gudang fisik, gerai, dan sarana kelengkapan di seluruh desa dan kelurahan yang ada,” kata Ferry, dalam acara penandatanganan SKB di Kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Oktober 2025. Menkop Ferry menambahkan pembangunan gerai dan gudang koperasi desa/kelurahan merah putih ini akan dimulai pada pertengahan Oktober 2025.

penggunaan dana desa, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto enggan berbicara banyak. Penjelasan akan dia berikan setelah payung hukum yang lebih tinggi untuk kebijakan ini terbentuk.

“Nanti kita jelaskan lagi lebih detailnya. Ini kan baru SKB. Nanti Insyaallah akan ada payung hukum yang lebih tinggi lagi untuk menjelaskan, termasuk sumber pendanaan dan lain-lain,” kata Yandri.

Toh Mendes Yandri mengemukakan pembangunan fisik dan operasional gerai dan pergudangan ini akan dilakukan di sekitar 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan 75.295 desa yang terbagi dalam empat kategori — mandiri, maju, berkembang, dan tertinggal — program ini diharapkan mampu mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

“Kami mengajak seluruh kepala desa, pengurus koperasi, dan tokoh masyarakat untuk menyambut program ini dengan semangat gotong royong. Ini adalah program strategis nasional yang harus kita sukseskan bersama,” kata Yandri.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, pendanaan untuk percepatan pembentukan 80 ribu kopdes dibebankan pada APBN, APBD, APB-Des, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga diminta turut memodali pendirian koperasi untuk investasi infrastruktur dan modal kerja. Pada diktum ‘Ketujuh’, bagian tugas khusus Menteri Keuangan, disebutkan bahwa Menteri Keuangan menyusun kebijakan pendanaan untuk mendukung pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Menteri Keuangan menyusun kebijakan penyaluran sumber dana dari APBN Tahun Anggaran 2025 sebagai modal awal pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Lalu Menteri Keuangan memberikan dukungan insentif kepada desa/kelurahan yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui alokasi kinerja dan/atau alokasi insentif dalam

pengalokasian dana desa.

Selain itu, bank Himbara juga diminta untuk ikut serta memberikan sumber pendanaan yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian Koperasi atas kebutuhan investasi KopDes/Kel Merah Putih terkait infrastruktur mencakup bangunan, salu-

badan usaha milik negara (BUMN). Sejauh ini BUMN itu adalah PT Agrinas Pangan Nusantara

PT Agrinas Pangan Nusantara pun sudah menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam membangun Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan di seluruh wilayah In-



ran air, saluran listrik, atau akses jalan. Hal ini tercantum pada bagian khusus Menteri BUMN.

Berkaitan dengan itu CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur kopdes akan dikoordinasikan melalui salah satu

donesia. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kerja sama yang dilakukan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dengan Direktur Utama PT. Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Jumat, 10 Oktober 2025. ●

MAGANG NASIONAL SEGERA MULAI

Program magang nasional terjadwal mulai berlangsung pada 20 Oktober 2025. Peminatnya ternyata membeludak.

Nama programnya magang khusus fresh graduate (lulusan baru). Program ini ditujukan bagi lulusan Diploma hingga Sarjana, dengan tujuan memberikan pengalaman kerja nyata sekaligus memperluas kesempatan penciptaan lapangan kerja baru. Pelaksanaan program magang ini diatur dalam Permenaker Nomor 8 Tahun 2025 dan menjadi bagian dari rangkaian 8 Paket Akselerasi Ekonomi 2025.

Sedangkan pendaftarannya dibuka mulai 7 hingga 12 Oktober 2025, dengan masa magang yang berlangsung selama enam bulan, terhitung dari Oktober 2025 hingga April 2026. Sedangkan masa pendaftaran bagi perusahaan yang ingin mengikuti program Magang

ruan tinggi yang tercatat di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Rincian pendaftaran tersedia platform SIAPkerja di tautan <https://siapkerja.kemnaker.go.id/>. Setelah mendaftar, data peserta akan diverifikasi oleh tim pelaksana. Sedangkan proses validasi menggunakan data dari kementerian atau lembaga terkait. Nah, peserta yang dinyatakan memenuhi syarat setelah validasi akan melanjutkan ke tahap rekrutmen yang dijalankan oleh penyelenggara magang.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa pemerataan menjadi aspek yang penting dalam program Magang Nasional 2025. "Rule pertamanya adalah kita ingin ada pemerataan, baik itu (pemerataan) lintas geografi dan pemerataan (program studi serta sektor industri)," kata Menaker Yassierli usai memberikan pemaparan dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu, 11 Oktober 2025.

"Kita tentu akan melihat tidak hanya posisi tertentu, tapi juga variasi (jenis pekerjaan untuk pemagang), sehingga berbagai program studi para calon peserta magang ini bisa diakomodasi," ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan saat ini sudah terdapat setidaknya 1.000 perusahaan yang akan terlibat dalam program ini. "Ini adalah kesempatan yang baik bagi perusahaan untuk mengenalkan perusahaannya kepada para pencari kerja," ujar Menaker.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menambahkan, program Magang Nasional 2025 ini diharapkan menjadi kesempatan yang baik pula bagi para lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan di dunia industri. "Kesempatan yang baik untuk para pencari kerja mendapatkan exposure terkait tentang industri, peningkatan kompetensi di tempat kerja," kata dia.

Sementara, bagi pemerintah, program ini juga memberikan suatu solusi yang disebut dengan "School to Work Transition Program". "Jadi sesudah dia lulus, kemudian kita buat suatu magang

Nasional 2025 sebagai penyelenggara berlaku hingga 15 Oktober 2025. seleksi dan pengumuman peserta pemagangan 16-18 Oktober 2025. Terakhir, pelaksanaan pemagangan akan dimulai 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

Untuk pendaftaran, peserta magang perlu memenuhi sejumlah persyaratan berikut: Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid, lulusan Diploma atau Sarjana dengan masa kelulusan maksimal satu tahun sejak tanggal ijazah pada saat mendaftar, dan berasal dari pergu-



nasional yang masif, sehingga mereka mendapatkan kompetensi. Sesudah itu kemudian mereka bisa bekerja,” ujar Yassierli.

Pada tahap pertama program Magang Nasional 2025, Kemnaker menyediakan kuota awal untuk 20 ribu fresh graduate. Selama enam bulan pemagangan, peserta magang akan memperoleh uang saku setara upah minimum Kabupaten/ Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk DKI Jakarta setiap bulan, dan dibayarkan pemerintah melalui Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri, BSI).

Selain uang saku, peserta magang juga akan memperoleh Jamsostek mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JM), dan pendampingan mentor dari perusahaan tempat magang, serta sertifikat pemagangan bagi peserta yang menyelesaikan program penuh. “Selain uang saku, peserta magang juga akan memperoleh Jamsostek mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JM), dan pendampingan mentor dari perusahaan tempat magang, serta sertifikat pemagangan bagi peserta yang menyelesaikan program penuh,” ujar Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga.

Namun, jumlah peminat magang ternyata lebih tinggi dari kuota yang tersedia. “Sekarang jumlah perusahaan itu sudah lebih dari 1.000 dan jumlah yang mendaftar sebanyak 212.000 pendaftar. Jadi, fasenya sampai tanggal 14 itu perusahaan masih bisa posting,” kata Menaker Yassierli.

Yassierli mengatakan, meski sempat muncul sejumlah keluhan terkait teknis pelaksanaan, pihaknya menilai program ini tetap menjadi terobosan penting dalam memperkuat School to Work Transition Program yakni skema nasional untuk membantu lulusan baru memperoleh pengalaman kerja dan kompetensi industri sebelum masuk ke pasar tenaga kerja formal.

Nah, program magang ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia memastikan paket stimulus ekonomi berupa 8 Program Akselerasi 2025, 4 Program Lanjutan di 2026, serta 5 Pro-

gram Penyerapan Tenaga Kerja (8+4+5) akan terus berjalan hingga akhir tahun ini.

Menurut Airlangga, pemerintah menargetkan agar program tersebut dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional hingga kuartal IV 2025. Salah satu program unggulan yang segera digulirkan adalah program

syah Noor, serta jajaran Kemnaker.

Melalui akun media sosial resmi @ sekretariat.kabinet, Seskab Teddy menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program magang yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah. “Pemerintah baru saja meluncurkan tahap pertama dari Program Magang



magang bagi fresh graduate yang akan dimulai pada 25 Oktober 2025, dengan penempatan di BUMN maupun perusahaan swasta.

Program magang nasional ini juga mendapat perhatian dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Ia mengunjungi kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kunjungan tersebut untuk berdiskusi mengenai perkembangan Program Magang Nasional bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afrian-

Nasional yang ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi (program Pendidikan Diploma atau Sarjana) dengan maksimal satu tahun kelulusan atau fresh graduate,” ungkap unggahan itu pada Sabtu, 11 Oktober 2025.

Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja bagi lulusan baru. “Dalam program ini, para peserta magang juga akan langsung mendapatkan upah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah masing-masing,” tandasnya. ●

MENTERI PERTANIAN JUGA KEPALA BAPANAS

Tugas Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Bapanas selesai. Jabatannya beralih ke Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Dalam salinan dokumen Keputusan Presiden (Keppres) 116/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional yang sudah beredar, pergantian Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan. Sehingga, perlu memberhentikan Kepala Bapanas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden (Kep-

“Memberhentikan dengan hormat Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut,” demikian petikan salinan Keppres yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto itu.

Selanjutnya, menunjuk Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Bapanas. Dan, kepada Amran diberikan hak keuangan dan fasilitas lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bapanas adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk pada 29 Juli 2021 melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Badan ini bertugas menjalankan tugas pemerintah di bidang pangan.

Dari laman daring terungkap 11 tu-

Koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;

Pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;

Pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganeekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;

Pengembangan sistem informasi pangan;

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;

Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional;

Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Dengan penunjukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, maka tugasnya bertambah luas mencakup pula terutama stabilisasi harga pangan. Sedangkan sejauh ini, kinerja sektor pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman menuai apresiasi luas dari publik.

Hasil survei terbaru Litbang Kompas mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) mencapai 71,5 persen. Peneliti Litbang Kompas Agustina Purwanti



pres) Nomor 7/M Tahun 2022, serta mengangkat penggantinya.

“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden,” tertulis dalam diktum menimbang poin b,

Masih dalam Keppres tersebut, Presiden Prabowo memberhentikan dengan hormat Arief Prasetyo Adi. Pemberhentiannya disertai ucapan terima kasih.

gas Bapanas. Salah satunya adalah mengembangkan sistem informasi pangan terutama terkait dengan stabilisasi pasok dan harga pangan. Secara rinci, tugas pokok dan fungsi Bapanas adalah:

Koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

menjelaskan publik menilai Kementan berhasil menjalankan berbagai program yang berdampak langsung bagi petani dan masyarakat luas.

“Kepuasan responden terhadap kinerja Kementerian Pertanian mencapai 71,5 persen. Ini angka yang cukup tinggi karena banyak hal nyata yang telah dilakukan Kementan, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan,” ujar Agustina, Sabtu, 11 Oktober 2025.

Agustina menambahkan apresiasi publik meningkat berkat keberhasilan Kementan dalam meningkatkan produksi beras nasional, menjaga nilai tukar petani (NTP) di level 124, serta menjalankan berbagai program seperti bantuan sarana pertanian dan Petani Milenial. Hal ini yang menurutnya menjadi faktor kunci membuat masyarakat aman dan tenang terkait kondisi sektor pangan yang terus terjaga.



Memberhentikan dengan hormat Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

“Publik menilai program-program itu nyata dan berdampak langsung. Bahkan tingkat keyakinan terhadap kemampuan Kementan dalam meningkatkan kesejahteraan petani mencapai 77 persen,” kata Agustina.

Selain survei khusus terhadap Kementan, Litbang Kompas juga mencatat kepuasan publik terhadap program ketahanan pangan nasional. Secara umum tingkat kepuasan publik berada di angka 61,5 persen, dengan 4,8 persen sangat puas dan 56,7 persen cukup puas.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengemukakan Indonesia dapat swasembada beras

dalam waktu 2-3 bulan ke depan atau sekitar Desember 2025 - Januari 2026. Di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025 sore, Amran menjelaskan capaian itu sesuai dengan target yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu swasembada pangan tercapai dalam waktu se-

dahan (jika) tidak ada iklim ekstrem, kita swasembada,” kata Mentan Amran saat jumpa pers di Kantor Presiden selepas rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Amran memaparkan produksi beras per 9 Oktober 2025, sebagaimana disam-



tahun.

“Target Pak Presiden kepada kami pada saat dilantik yaitu empat tahun harus swasembada pangan, khususnya beras. Kemudian setelah 21 hari, ada perubahan sedikit, target empat tahun menjadi tiga tahun. Setelah 45 hari, ada perubahan sedikit lagi dari target tiga tahun menjadi satu tahun.

Alhamdulillah hari ini, mudah-mudahan tidak ada aral melintang, 2 bulan ke depan, kurang lebih 3 bulan, Insya Allah Indonesia tidak impor lagi. Mudah-mu-

paikan juga oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mencapai 33,1 juta ton. “Januari - November (2025), perkiraan produksi kita yaitu 34 juta ton pada akhir tahun, (lebih tinggi) dibandingkan dengan tahun lalu, produksi kita 30 juta ton,” ujar Amran.

Toh pangan bukan hanya beras. Selain itu, pasang-surut harganya pun berpengaruh terhadap kondisi perekonomian. Itu tantangan baru buat Menteri Pertanian yang merangkap sebagai Kepala Bapanas. ●



KABINET PRABOWO KIAN GEMUK

Menjelang setahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto kembali menambah jumlah anggota Kabinet Merah Putih.

Prabowo melantik Ahmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu sore, 8 Oktober 2025. Pelantikan kedua tokoh itu didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Merah Putih Masa Jabatan 2024-2029.

Dengan pelantikan Ahmad Wiyagus, jumlah wamendagri bertambah menjadi tiga orang. Sebelumnya, jabatan tersebut juga diemban oleh Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk.

Ahmad Wiyagus merupakan purnawirawan polisi. Dia terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri dan pernah menjadi Kapolda Jawa Barat.

Dari ketiga wamendagri itu, satu di antaranya merangkap jabatan, yakni Ribka Haluk. Bersamaan dengan pelantikan dua wamen di Istana, Ribka juga dilantik sebagai anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Sebelum pelantikan, Ribka mengatakan, dirinya diminta Presiden untuk menjadi bagian dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Akan tetapi, tidak ada arahan khusus untuk meninggalkan posisinya sebagai wamendagri. Selain itu, tugasnya di komite baru itu linier dengan tugasnya sebagai wamendagri.

Sama halnya dengan wamendagri, jumlah wamenkes juga bertambah. Sebelumnya, hanya ada satu posisi wamenkes, yakni Dante Saksono Harbuwono. Benjamin Octavianus Paulus yang menjabat sebagai wamenkes baru

adalah seorang dokter ahli penyakit paru yang juga Ketua DPP Partai Gerindra.

Dengan penambahan dua posisi wakil menteri, berarti kini di Kabinet Merah Putih total ada 58 wakil menteri. Jumlah wakil menteri ini berkali-kali lipat jauh lebih banyak jika dibandingkan di era pemerintahan sebelumnya yang hanya 18 orang.

Reshuffle kabinet kali ini merupakan yang keempat sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo. Perombakan pertama berlangsung pada 19 Februari 2025 saat melantik Brian Yulianto sebagai Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi, menggantikan Satryo Brodjonegoro.

Beberapa bulan kemudian, 8 September 2025, Prabowo kembali mengganti sejumlah menteri dalam reshuffle jilid dua. Saat itu, Prabowo mencopot empat menteri dan melantik lima pejabat baru.

Mereka yang diganti adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

Posisi-posisi tersebut kemudian diisi oleh Purbaya Yudhi Sadewa (Menteri Keuangan), Mukhtarudin (Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Ferry Juliantono (Menteri Koperasi), serta Mochamad Irfan Yusuf (Menteri Haji dan Umrah) dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya. Namun, dua kursi masih dibiarkan kosong, yakni Menko Polkam dan Menpora.

Tak lama berselang, pada 17 September 2025, Prabowo kembali melakukan perombakan kabinet jilid ketiga. Dua posisi kosong tersebut akhirnya terisi. Djamar Chaniago dipercaya menjadi Menko Polkam dan Erick Thohir menjadi Menpora.

Dalam perombakan yang sama, Presiden juga melantik sejumlah wakil menteri dan pejabat lembaga negara. Friansyah Noor diangkat sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, Rohmat Marzuki menjadi Wakil Menteri Kehutanan, dan Farida Faricha diamanahi jabatan Wakil Menteri Koperasi.

Selain itu, Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi

Pemerintah (lembaga yang sebelumnya bernama Kantor Komunikasi Kepresidenan). Sementara, Muhammad Qodari dipercaya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Sonny Sanjaya dan Naniek S Deyang ditunjuk sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sarah Sadiqa menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ahmad Dofiri, mantan Wakil Kepala Polri, juga dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Polri.

Selain kembali mereshuffle kabinetnya pada Rabu sore, Prabowo juga melantik Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu.



• INFO ISTANA

Tak hanya melantik dua wamen dan Ketua Dewan Komisiner LPS, kali ini Presiden juga melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Badan tersebut merupakan perubahan dari Kementerian BUMN yang statusnya dijadikan badan melalui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, awal Oktober lalu.

Dony Oskaria dilantik sebagai Kepala BP BUMN serta Aminuddin Ma'ruf dan Tedi Baratha didapuk sebagai Wakil Kepala BP BUMN. Sebelumnya, mereka menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.

dua posisi baru dan melantik pejabat terkait. Kedua posisi dimaksud adalah Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan yang dijabat Dirgayuza Setiawan dan Asisten Khusus Bidang Analisa Data Strategis yang dijabat oleh Agung Gumilar Saputra.

Kemudian, Presiden melantik pula Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Mathius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen. Mathius dan Alberto memenangi Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah (PSU Pilkada) Papua 2025.

Belgia.

Letnan Jenderal (Purn) Hotmangaradja Pandjaitan akan menjadi Dubes RI untuk Singapura. Hotmangaradja, yang merupakan putra dari pahlawan revolusi DI Panjaitan, lulusan Akademi Militer (Akml) 1977 serta pernah menjabat Panglima Kodam IX/Udayana dan Asisten Menteri Pertahanan Bidang Lingkungan Khusus tahun 2019-2024. Selain itu, dia pernah menjabat Dubes Perancis, Andorra, dan Monako.

Selanjutnya, Syahda Guruh Langkah Samudera akan bertugas sebagai Dubes RI untuk Qatar dan berkedudu-



Selain itu, Presiden juga melantik ketua dan sejumlah anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Velix Wanggai ditugaskan untuk menjadi ketua komite tersebut. Sementara John Wempi Wetipo, Ignatius Yoko Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambasar Yani, John Gluba Gepze, serta Johnson Estrella Sihalasa, dilantik sebagai anggota.

Di luar dua wakil menteri dan para pimpinan badan, Presiden membuat

Mathius adalah alumnus Akademi Kepolisian 1990 dan mantan Kapolda Papua serta pernah menjadi Kepala Polres Jayapura. Adapun Aryoko pernah menjabat dalam pemerintahan Provinsi Papua sebagai Kepala Birokrat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Dia juga merupakan kader dari Partai Demokrat.

Selain itu, Presiden Prabowo melantik 10 duta besar. Para duta besar ini antara lain akan mengisi posisi di Singapura, Qatar, Mesir, Malaysia, Azerbaijan, dan

kan di Doha. Guruh adalah diplomat Kemenu yang sebelum ini menjabat Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi.

Kemudian, Kuncoro Giri Waseso akan bertugas sebagai Dubes RI untuk Mesir. Kuncoro juga diplomat karier dan sebelum ini menjabat sebagai Konsul Jenderal RI untuk Victoria dan Tasmania.

Adapun untuk Dubes RI untuk Malaysia, Presiden melantik Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo. Iman berlatar belakang sebagai pengusaha. Ia juga pernah menjabat Wakil Benda-

hara Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.

Selain itu, masih ada Berlian Helmy yang dilantik sebagai Dubes RI untuk Azerbaijan. Sebelum ini, diplomat Kemenlu itu menjabat sebagai Wakil Kepala Perwakilan RI untuk Rusia dan Belarus.

Selanjutnya, ada Andy Rachmianto yang bertugas sebagai Dubes RI untuk Kerajaan Belgia. Andy saat ini menjabat sebagai Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan, penambahan wamendagri dibutuhkan untuk mengurus Indonesia yang luas, terdiri atas 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

"Tentunya dalam rangka pembinaan dan memastikan pembangunan di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat satu wakil menteri dalam negeri," katanya.

Di Kementerian Kesehatan, kata Prasetyo, tambahan wakil menteri diperlukan untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN), yang merupakan badan yang dibentuk sejak awal pemerintahan Prabowo untuk melaksanakan program prioritas Makan Bergizi Gratis.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan, Benjamin yang merupakan ahli penyakit paru akan diberi tugas khusus untuk memberantas tuberkulosis. Sementara, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan, kehadiran tiga wamendagri bakal memperkuat kinerja Kemendagri dalam menjangkau daerah-daerah.

Sementara mengenai posisi baru, yakni asisten khusus presiden, Prasetyo mengatakan, tidak ada pertimbangan khusus dari Presiden. Sejak Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024 pun Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar Saputra disebut sudah membantu kerja Presiden. Kerja dimaksud mulai dari menyiapkan data dan menyusun pidato Presiden.

Berisiko

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and

International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengatakan, penambahan anggota kabinet akan menimbulkan risiko bagi jalannya pemerintahan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Hal tersebut salah satunya karena dengan banyaknya kementerian dan anggota kabinet, dapat membuat Presiden

partai untuk mengambil keputusan pergeseran menteri atau wakil menteri.

Lebih dari itu, posisi Presiden juga kian sulit karena harus mencari sosok yang tidak hanya memiliki kompetensi tetapi juga bisa diterima oleh partai.

Dalam ranah anggaran, penambahan anggota kabinet juga akan



kehilangan kendali atas pemerintahan.

"Bukan karena Presiden tidak punya kendali, melainkan banyaknya kementerian dan anggota kabinet membuat prioritas evaluasi hanya akan terjadi pada kementerian-kementerian utama saja atau kementerian yang mengurus bidang-bidang strategis," katanya.

Banyaknya anggota kabinet dengan latar belakang yang sebagian besar berasal dari partai politik, menurut Arya, juga bakal mempersulit Presiden untuk merombak kabinet. Itu terlihat dari empat reshuffle yang sudah dilakukan, Presiden harus bernegosiasi dengan banyak

memperbesar alokasi anggaran untuk operasional menteri dan wakil menteri. Padahal, di saat bersamaan, pemerintah juga mengurangi transfer keuangan daerah dan memangkas berbagai alokasi anggaran untuk membantu program strategis.

Lebih dari itu, Arya juga mengingatkan, penambahan anggota kabinet serta badan dan komite juga akan memengaruhi dinamika dengan wakil presiden.

"(Dengan keberadaan anggota kabinet dan badan yang semakin rigid) peran wakil presiden akan semakin mengecil," ujarnya. ●



Angkat Citra Indonesia di Mata Dunia

GERAKAN AMNESTI UNTUK ALEX NOERDIN TERUS BERGEMA

Mantan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin sedang diperjuangkan untuk mendapat amnesti dan abolisi dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Kontribusinya terhadap bangsa sangat besar karena mengangkat citra positif Indonesia di mata dunia melalui olahraga dan event-event internasional di Sumatera Selatan.

Sehingga berbagai pihak menyebut, Alex Noerdin berhak menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto karena dinilai banyak berjasa terhadap Sumsel selama menjadi gubernur.

Tidak dapat dipungkiri, jasa Alex Noerdin sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Selatan. Bahkan, dirinya mendapat julukan pelopor sekolah dan berobat gratis



iden Prabowo Subianto.

Bahkan Harda Belly secara resmi menyampaikan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo

tokoh pembangunan dan pelopor berbagai program pro-rakyat yang masih dirasakan hingga kini, khususnya melalui Program Sekolah Gratis, Kuliah Gratis,



hingga sekarang.

Koordinator Aktivis Sumsel-Jakarta, Harda Belly menyebut Alex Noerdin berhak mendapatkan amnesti dan abolisi sehingga meminta pertolongan Pres-

Subianto, agar memberikan amnesti dan abolisi terhadap Alex Noerdin.

Menurut Harda, Alex Noerdin yang menjabat sebagai Gubernur Sumsel selama dua periode (2008-2018) adalah

dan Berobat Gratis.

"Banyak sekali jasa-jasa yang telah diberikan Alex Noerdin untuk Sumsel. Beliau telah membuat pendidikan dan kesehatan bisa diakses masyarakat tan-

pa biaya, sesuatu yang langka bahkan di tingkat nasional," katanya.

Atas dasar itu pula, Harda meminta Presiden Prabowo untuk memberikan amnesti dan abolisi, sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdian Alex Noerdin.

Mengingat fisik Alex Noerdin semakin menua dan kondisi kesehatan yang menurun, di dalam sel akan semakin memperburuk keadaan.

"Bahkan, bisa saja dilakukan survei kepada masyarakat Sumsel bagaimana kinerja Alex Noerdin bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dari sekolah gratis, kuliah gratis, berobat gratis, hingga pembangunan besar di Sumsel," sambungnya.

Kondisi Alex Noerdin saat ini banyak menyita perhatian, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumsel, M. Yansuri bahkan mengingatkan jasa-jasa besar Alex Noerdin bagi Sumsel. Baik dibidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sebagainya.

"Saya tidak bisa menutup mata terhadap semua jasa-jasa Alex Noerdin untuk Sumsel, meskipun perbuatannya juga tidak dibenarkan," kata dia.

Dalam melihat kasus yang dihadapi Alex Noerdin, Yansuri meminta masyarakat untuk lebih manusiawi. Meskipun, semua masalah harus dipertanggungjawabkan. Tapi, jasa-jasa Alex Noerdin untuk Sumsel juga layak dipertimbangkan.



"Mari kita pikirkan, masihsan ada ruang kemanusiaan bagi sosok yang telah membawa banyak kemajuan untuk Sumsel. Jalur amnesti dan abolisi patut dipertimbangkan," pungkasnya. ●

DUKUNGAN KEMANUSIAAN UNTUK ALEX NOERDIN TERUS MENGALIR

Gerakan kemanusiaan untuk mendukung mantan Gubernur Sumatera Selatan, H. Alex Noerdin, terus menunjukkan geliatnya di berbagai lapisan masyarakat untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo.

Setelah sebelumnya dukungan datang dari sejumlah tokoh dan komunitas masyarakat, kini giliran pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jembatan Ampera dan Pasar 16 Ilir Palembang yang menyuarakan simpati mereka untuk Alex Noerdin bisa mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo.

Dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram @sumsel.terciduk pada Kamis, 9 Oktober 2025, tampak sejumlah pedagang kecil menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan pemberian amnesti dan abolisi kepada Alex Noerdin, yang saat ini tengah menjalani masa hukuman.

Salah satu pedagang pempek tumpah di kawasan Pasar 16 Ilir, seorang pria berkacamata, dengan lantang menyampaikan bahwa Alex Noerdin memiliki jasa besar dalam pembangunan Sumatera Selatan.

"Kedepannya kami berharap langsung kepada Pak Presiden Prabowo agar bisa memberi solusi melalui amnesti atau abolisi. Insya Allah Pak Alex bisa mendapatkan keringanan, karena beliau sudah banyak berbuat untuk masyarakat," ujar pedagang di tempat itu.

Gelombang dukungan terhadap mantan Gubernur Sumsel, H. Alex Noerdin, kembali mencuat dalam bentuk yang lebih terorganisir.

Kali ini, masyarakat menunjukkan simpatinya melalui petisi daring berjudul "Permohonan Amnesti untuk Alex Noerdin", yang mulai beredar sejak Kamis, 9 Oktober 2025.

Petisi tersebut pertama kali diinisiasi oleh Manzal Khan, warga Sumsel yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial. Dalam waktu singkat, dukungan mengalir deras, dengan ratusan tanda tangan telah tercatat di platform Change.org.

Dalam deskripsinya, Manzal Khan menulis permohonan resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mempertimbangkan pemberian amnesti kepada

Alex Noerdin.

Menurutnya, langkah tersebut bukan semata-mata permintaan belas kasihan, tetapi bentuk penghargaan atas kiprah panjang mantan gubernur dua periode itu dalam membangun Sumatera Selatan.

"Hanya sedikit yang bisa melupakan jejak pembangunan besar yang lahir di masa kepemimpinan beliau mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat," tulis Manzal dalam petisi tersebut.

Dari Kabupaten Musi Banyuasin, ratusan masyarakat dari berbagai lapisan saat ini tengah menggalang dukungan moral kepada Alex Noerdin yang pernah menjabat Bupati Muba selama dua periode.

Gerakan ini dipimpin H Yusnin, mantan Sekda Muba yang saat ini sedang menggalang dukungan gerakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) masyarakat Kabupaten Muba untuk dibawa ke DPRD.

"RDP ini dukungan dari DPRD Muba untuk memberikan Amnesti dan Abolisi kepada visioner sang pelopor pembangunan Sekolah Gratis Berobat Gratis Sumsel Bapak H Alex Noerdin atas jasa jasa membangun Muba dan Sumsel," kata Yusni.

Ia menjelaskan gerakan moral RDP ini adalah forum untuk DPRD dalam menampung usulan dari masyarakat Muba agar menyampaikan aspirasi masyarakat ke Presiden RI, Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti atau abolisi kepada Alex Noerdin.

Adapun alasan masyarakat Muba mengajukan Amnesti dan Abolisi untuk Alex Noerdin ada tiga yakni usianya sudah mencapai 75 tahun. Kondisi kesehatan yang menurun.

Kemudian Alex Noerdin adalah salah satu putra terbaik Bangsa Indonesia karena pernah mendapat tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden RI atas jasa jasanya membangun Sumsel dan mengangkat citra positif Indonesia di mata dunia.

"Ini mumi aspirasi dari masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin untuk membantu pak Alex Noerdin karena ingat dengan jasa jasanya pada waktu menjadi bupati Muba dengan beberapa programnya terutama sekolah dan berobat gratis yang sampai saat ini masih dirasakan," ujar tokoh masyarakat Muba ini. ●

KEPALA DAERAH DAN WAKILNYA MULAI TAK HARMONIS

Belum genap setahun dilantik, sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah di Jawa Timur terlihat mulai menunjukkan ketidakselarasan dalam pemerintahan.

Kementerian Dalam Negeri pun menurunkan tim gabungan untuk menelusuri konflik itu. Hasilnya akan ditindaklanjuti untuk mengatasi masalah tersebut.

Ketegangan antara bupati dan wakil bupati mencuat di Kabupaten Jember dan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025. Setelah pelantikan, mereka juga mengikuti kegiatan retreat kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benni Irwan, menuturkan, persoalan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo dan Jember sudah menjadi atensi dari pemerintah pusat. Kemendagri menurunkan tim gabungan yang dipimpin oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal Kemendagri ke Sidoarjo dan Jember.

"Saat ini, tim sudah di Sidoarjo untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk dengan bupati dan wakil bupati," kata Benni, Rabu, 1 Oktober 2025.

akan dirujuk oleh Kemendagri adalah Pasal 65 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan itu mengatur tugas dan kewenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Masalah Berulang

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi, memandang, hubungan tidak harmonis antara kepala daerah dan wakilnya terus berulang. Dia menilai, akar masalahnya adalah pembagian tugas dan wewenang yang tidak adil.

Pada saat proses pemilihan kepala daerah, calon pasangan kepala daerah biasanya menanggung beban yang sama, mulai dari pendaftaran hingga kampanye. Namun, saat terpilih, wakil kepala daerah terbentur oleh tugas yang terbatas dan hanya membantu kepala daerah.

"Pada dasarnya mereka berpasangan, berkampanye bersama. Tentu dengan dukungan partai dan biaya politik bersama. Namun, ketika sudah terpilih, undang-undang dan peraturan pemerintah mengatur wakil kepala daerah itu tugasnya hanya membantu kepala daerah atau ditugaskan untuk tugas-tugas tertentu," tutur Dede.

"Nah, di sini titik masalah itu terjadi, (yakni) ketika dirasa pembagian tugas dan kewenangan itu tidak adil, bahkan cenderung tidak sesuai dengan komitmen bersama. Itu sebabnya konflik-konflik seperti ini akan selalu terjadi. Apalagi, jika mereka berasal dari beda partai," imbuhnya.

Oleh karena itu, Dede beranggapan peran kepala daerah dan wakilnya perlu diatur lebih jauh lagi dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Hal ini untuk menghindari perdebatan antarpasangan kepala daerah ini. Namun, Dede tetap mengingatkan tidak boleh ada dualisme kepemimpinan.

"Mungkin ke depan perlu diatur lebih jauh lagi mengenai tugas dan fungsi



Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, melaporkan Bupati Jember, Muhammad Fawait, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

Sementara di Kabupaten Sidoarjo, Wakil Bupati, Mimik Idayana, menyebut tidak pernah dilibatkan oleh Bupati Sidoarjo, Subandi, dalam pengambilan keputusan strategis, seperti penunjukan kepala dinas dan penyusunan struktur organisasi birokrasi daerah.

Kedua pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu sama-sama dilantik secara serentak oleh Presiden

Tim gabungan terlebih dulu datang untuk menginvestigasi persoalan di Kabupaten Sidoarjo. Setelah itu, mereka akan bergerak ke Kabupaten Jember untuk mendapatkan keterangan dari sejumlah pihak di sana. Hasil kunjungan langsung ke lapangan itu akan menjadi dasar tindak lanjut pembinaan dan pengawasan Kemendagri berdasarkan aturan yang berlaku.

Menurut Benni, hasil pemeriksaan lapangan di daerah itu penting untuk memahami duduk perkara ketidakselarasan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Adapun regulasi yang

wakil kepala daerah, juga diberikan kewenangan dan tanggung jawab tertentu. Bukan hanya membantu sehingga mereka bisa melaksanakan tugas tanpa perdebatan. Walaupun pada akhirnya tidak boleh ada matahari kembar," ucapnya.

Dede juga memberikan catatan kepada partai politik dalam mempertimbangkan pasangan calon yang diusung. Dia menilai perlu adanya hubungan yang intens di antara pasangan calon ini, sehingga komitmen mereka tidak hanya masalah wewenang, tetapi juga mengedepankan kepentingan rakyat.

"Pasangan ini harus sebelumnya memiliki hubungan yang intens dari awal, bukan hanya kagetan menjelang pilkada, sehingga komitmen untuk menjadi pelayan publik bagi rakyatnya di atas segala kepentingan partai atau individu," kata Dede.

Akar Persoalan

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N Suparman, mengatakan, masalah konflik kepala daerah dengan wakil kepala daerah sudah sering terjadi. Misalnya, konflik antara Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2019-2023. Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurut Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, mundurnya wakil gubernurnya itu karena ada perintah dari partai politik pendukungnya.

Adapun, Wakil Bupati Indramayu 2021-2024, Lucky Hakim, juga mengundurkan diri karena merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Herman menilai akar persoalan konflik itu adalah karena memang peran wakil kepala daerah yang tidak terlalu signifikan jika dilihat di UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Kehadiran wakil kepala daerah hanya jelas saat kepala daerahnya berhalangan sementara atau menjalani masa tahanan. Tanpa situasi dan kondisi berhalangan itu, peran wakil kepala daerah sangat bergantung pada penugasan kepala daerahnya.

"Di dalam UU Pemda, yang disebut dengan pemimpin pemerintah daerah itu kepala daerah. Kemudian, kepala daerah itu dapat diwakili oleh wakil kepa-

la daerah. Jadi, kata 'dapat' itu sifatnya sangat opsional, sehingga kehadiran wakil kepala daerah sangat bergantung pada seperti apa penugasan dari kepala daerahnya sendiri. Itu yang kami lihat menjadi salah satu akar persoalan di dalam UU Pemda," tutur Herman.

Persoalan ketidakharmonisan kepala daerah dan wakilnya juga kerap terjadi sebagai dampak dari proses pencalonan dalam pemilihan kepala daerah. Sering kali, mereka disandingkan bukan karena kesamaan visi dan misi. Namun, lebih kepada hal-hal pragmatis seperti

ganggu jalannya pemerintahan daerah ketika mereka sudah memimpin," ujar Herman.

Dalam konteks masalah di Kabupaten Sidoarjo dan Jember, kata Herman, diharapkan ada proses pengawasan berjenjang dari gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Saat terjadi konflik antara bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota, gubernur semestinya bersikap proaktif untuk mendamaikan.

Mengingat potensi konflik antara kepala daerah dan wakil daerah bisa



elektabilitas di dalam proses kandidasi. Alhasil, saat mereka terpilih dan bersama-sama memimpin daerah, ada friksi terkait visi misi mereka dalam menjalankan proses pemerintahan.

"Dimensi kesamaan visi dan misi saat proses pencalonan ini juga perlu mendapatkan perhatian utama dari partai politik saat menyandingkan bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah, sehingga tidak meng-

terjadi kapan pun, Kemendagri sebagai pembina dan pengawas daerah pun diharapkan mengeluarkan kebijakan untuk memitigasi potensi friksi antara kepala daerah dan wakilnya.

Kemendagri juga perlu mengeluarkan surat edaran atau Peraturan Menteri Dalam Negeri agar bisa menjadi pedoman bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. ●

MERITOKRASI TNI DI TENGAH BAYANG POLITISASI

Tentara Nasional Indonesia menyambut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan prinsip meritokrasi dan tidak mengandalkan senioritas dalam penempatan jabatan maupun rotasi perwira.

Arahan itu sejalan dengan proses transformasi kelembagaan yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, arahan itu dinilai tidak menyentuh akar persoalan regenerasi kepemimpinan di TNI yang selama satu dekade cenderung dipolitisasi.

Arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai regenerasi kepemimpinan TNI yang tidak memprioritaskan prinsip senioritas disampaikan dalam pidatonya di upacara peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 TNI di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Minggu, 5 Oktober 2025.

Presiden menekankan, tantangan yang dihadapi TNI ke depan akan kian kompleks, sehingga membutuhkan pemimpin-pemimpin yang profesional. Oleh karena itu, saringan untuk memilih pimpinan TNI harus berdasarkan kompetensi serta komitmen kecintaan terhadap Tanah Air.

Di tengah ketidakpastian kondisi global, Presiden juga menekankan bahwa TNI perlu terus beradaptasi dengan

perkembangan teknologi. Tidak hanya terkait profesionalitas prajurit, tetapi juga bentuk organisasi. Struktur organisasi yang sudah usang hendaknya diubah sesuai kebutuhan zaman.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, membenarkan, Presiden memberikan penekanan kepada seluruh jajaran TNI untuk mengutamakan kompetensi dari pertimbangan lain dalam regenerasi kepemimpinan. Kompetensi harus menjadi prioritas dibandingkan hal lain, terutama senioritas.

Menurut dia, hal itu juga sudah mulai dilaksanakan di internal TNI. Ke depan, prinsip meritokrasi itu juga yang harus dikedepankan. "Ini sudah dijalankan, ya, karena kita memang betul-betul ingin profesionalitas dalam menjalankan tugas TNI," kata Prasetyo.

Meski demikian, ia menegaskan, prinsip itu hendaknya tidak dimaknai bahwa kompetensi prajurit senior tertinggal dibandingkan dengan yang lebih muda. Semua prajurit dinilai kompeten. Akan tetapi, dalam penentuan kepemimpinan



nan, diharapkan pertimbangan profesionalitas menjadi yang utama.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Freddy Adriansyah, mengatakan, TNI melihat pernyataan Presiden mengenai urgensi pembaruan organisasi dan seleksi pimpinan yang tidak didasarkan pada senioritas sebagai arahan strategis. Apalagi, hal itu juga sejalan dengan proses transformasi kelembagaan yang telah diselenggarakan dalam beberapa tahun terakhir dan akan terus dilanjutkan.

"TNI telah secara bertahap menerapkan prinsip meritokrasi dan kompetensi dalam penempatan jabatan, di mana promosi dan rotasi perwira tidak selalu mengikuti urutan senioritas semata, melainkan didasarkan pada rekam jejak, kinerja, integritas, serta kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan organisasi," kata Freddy, Selasa, 7 Oktober 2025.

Ia melanjutkan, langkah tersebut merupakan bagian dari modernisasi dan adaptasi TNI terhadap dinamika lingkungan strategis, perkembangan teknologi, dan tuntutan profesionalisme yang kian tinggi dalam sistem pertahanan negara. Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik arahan Presiden yang memperkuat arah reformasi yang sudah berjalan.

Arahan itu juga menjadi dorongan untuk mempercepat proses pembaruan organisasi agar lebih lincah, efisien, dan responsif terhadap tantangan baru. Misalnya, ancaman siber, ruang angkasa, dan domain teknologi pertahanan modern.

Dalam konteks organisasi, TNI juga memahami bahwa organisasi yang efektif harus mampu beradaptasi dan tidak terjebak dalam struktur yang usang. Oleh karena itu, evaluasi terhadap satuan dan jabatan yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan operasional dan kebutuhan strategis menjadi bagian dari pembenahan berkelanjutan yang tengah dilakukan oleh seluruh matra.

"Prinsip meritokrasi yang diperkuat ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan nilai-nilai tradisi keprajuritan, tetapi justru mempertegas profesionalisme, integritas, dan semangat pengabdian sebagai fondasi moral setiap prajurit, sesuai dengan visi TNI PRIMA dari Panglima TNI, yaitu Tentara yang Profesional, Responsif, Integratif, Modern dan Adaptif," kata

Freddy.

Tidak Menyentuh Akar Masalah

Peneliti senior Imparsial, Al Araf, sepakat bahwa seleksi kepemimpinan di TNI harus dilakukan dengan prinsip meritokrasi. Namun, akar masalah dalam penerapan meritokrasi di TNI tidak terkait dengan senioritas, tetapi politisasi.

Selama satu dekade terakhir, promosi dan mutasi perwira cenderung bersifat politis, sehingga mereka yang tidak

memiliki akses terhadap kekuasaan sulit untuk mendapat ruang untuk berkembang.

"Sejak era sebelumnya, termasuk saat ini, yang dihitung dalam promosi dan mutasi bukan profesionalisme dan kemampuannya, tetapi kedekatannya dengan kekuasaan. Seberapa kedekatannya dengan klik-klik kekuasaan, sehingga mekanisme meritokrasi tidak berjalan," kata Al Araf.

Salah satu promosi jabatan perwira



• INFO NASIONAL

yang menuai sorotan publik terkait dengan Letkol Teddy Indra Wijaya, mantan ajudan Prabowo saat menjadi Menteri Pertahanan yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, naik pangkat dari mayor menjadi letkol pada 25 Februari 2025. Teddy naik pangkat dengan mekanisme kenaikan pangkat reguler percepatan.

Padahal, mengacu Peraturan Panglima TNI Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2015

perbaikan meritokrasi di TNI semestinya dimulai dengan menghilangkan politisasi dalam promosi dan mutasi jabatan. Adapun pertimbangan senioritas justru sering kali menunjukkan pengalaman dan kompetensi yang lebih teruji dengan keterlibatan di berbagai misi di bidang pertahanan.

Harapan Tentara Profesional

Dalam menyambut HUT Ke-80 TNI, kalangan masyarakat sipil berharap adanya perbaikan terhadap reformasi

"Lebih dari dua dekade, sejak reformasi 1998, publik berharap TNI bertransformasi menjadi kekuatan pertahanan yang profesional, tunduk pada supremasi sipil, dan terbebas dari praktik kekerasan terhadap warga sipil. Kenyataannya, itu masih jauh dari harapan," kata peneliti Imparsial, Annisa Yudha, saat membacakan pernyataan koalisi masyarakat sipil di Jakarta, Sabtu, 4 Oktober 2025.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan juga menyoroti kasus kekerasan oleh TNI hingga masuknya institusi militer ke ranah sipil.

Annisa membeberkan sejumlah kasus kekerasan oleh prajurit TNI terhadap sipil yang juga disorot publik akhir-akhir ini. Pada Maret 2025, terjadi penembakan tentara kepada warga di Aceh dan polisi di Lampung. Di bulan yang sama, juga terjadi pembunuhan yang dilakukan tentara di Banjarbaru.

Terakhir, pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI pada Agustus 2025 melibatkan tentara. Bahkan, kekerasan yang berujung pada kasus kematian juga menimpa prajurit TNI di Nusa Tenggara Timur.

"Pola yang berulang ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan di tubuh TNI bukan sekedar tindakan individual, melainkan problem struktural dan kultural yang tak kunjung dibenahi," lanjut Annisa.

Masyarakat yang menuntut keadilan dari kasus-kasus kekerasan ini menemukan jalan buntu. Annisa menyebut, penyelesaian kasus pidana oleh prajurit TNI dilakukan di peradilan militer yang tidak bisa dijangkau sipil. Akibatnya, ada potensi celah kosong yang menciptakan ruang impunitas.

"Persidangan yang berlangsung secara tertutup dan tidak memenuhi prinsip-prinsip peradilan yang adil atau fair trial serta didominasi oleh militer sulit untuk mendapatkan keadilan. Apalagi kalau korbannya adalah warga sipil," kata Annisa.

Padahal, sejumlah payung hukum telah menegaskan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili melalui peradilan umum. Annisa memaparkan, aturan ini tercantum dalam TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 dan Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang TNI.

"Selama hakim, jaksa, dan terdakwa



tentang Kepangkatan Prajurit TNI, tidak disebutkan kategori kenaikan pangkat reguler percepatan, seperti yang diterima Teddy. Beleid itu hanya mengatur kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat penghargaan, dan kenaikan pangkat luar biasa.

Oleh karena itu, menurut Al Araf, pernyataan Presiden dapat ditafsirkan sebagai pembenaran atas promosi dan mutasi yang bersifat politis. Padahal, hal tersebut berpotensi menurunkan profesionalisme TNI secara keseluruhan.

Untuk itu, ia mengingatkan bahwa

TNI yang dinilai mengalami kemunduran. Sebagai institusi militer, TNI diharapkan tidak lagi mencampuri urusan sipil dan lebih fokus terhadap pertahanan di tengah dinamika kawasan yang kian kompleks.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menegaskan dorongan publik untuk mengembalikan lagi semangat reformasi TNI yang dinilai sudah menurun tersebut dalam momentum HUT ke-80 TNI. Penurunan ini dilihat dari peran TNI yang terus meluas ke ranah sipil.

sama-sama berasal dari institusi militer, impunitas kian menguat. Koalisi menilai bahwa praktik ini bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan juga pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi," kata Annisa.

Keterlibatan TNI dalam urusan sipil juga menjadi catatan. Annisa menyebutkan, koalisi menyoroti penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil. Tidak hanya itu, terdapat kekhawatiran multifungsi TNI dengan ketentuan terkait

masyarakat sipil.

"Ini tidak hanya bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga mengancam kebebasan sipil dan demokrasi. Perumusan pasal di atas menjadi indikasi semakin menguatnya upaya militerisasi ruang siber yang langkah-langkah sistematisnya terlihat semenjak revisi Undang-Undang TNI," kata Annisa.

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, juga memandang peran TNI di ranah sipil di dunia siber ini berbahaya.

perspektif outward looking yang fokus menghadapi ancaman dari luar. Hal ini bisa dilihat dari modernisasi alat utama sistem senjata hingga pemantauan wilayah teritorial.

"Kita ingin TNI yang profesional adalah TNI yang tidak berpolitik, tidak berbisnis, fokus bidang pertahanan. Militer itu punya kekuatan pertahanan yang modern dan profesional," ujarnya.

Namun, yang terjadi saat ini justru sebaliknya, TNI lebih fokus menghadapi



Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang tercantum dalam UU TNI.

Pengesahan UU yang direvisi secara relatif cepat di bulan-bulan awal 2025 juga memantik reaksi publik. Bahkan, koalisi melihat adanya keterkaitan perluasan keterlibatan TNI ini dalam RUU Keamanan dan Ketahanan Siber.

Dalam draft RUU itu, pada usulan Pasal 56 ayat (1) poin d, disebutkan TNI diberi kewenangan terhadap tindak pidana di bidang keamanan dan ketahanan siber. Sontak, hal itu memicu reaksi dan protes publik, salah satunya dari koalisi

Dia mendorong DPR untuk lebih hati-hati dalam membahas RUU KKS ini dan mengutamakan partisipasi publik yang tidak ingin supremasi sipil terancam.

Di sisi lain, lanjut Al Araf, ancaman kedaulatan di kawasan hingga global semakin kompleks. Selain potensi konflik perbatasan negara yang bisa pecah kapan saja, dunia juga tengah menghadapi sejumlah perang dan konflik yang bisa saja merembet ke ranah global.

Untuk menghadapi potensi ancaman yang kian kompleks, Al Araf menginginkan militer untuk menggunakan

ancaman dari dalam (inward looking) yang justru rentan dijadikan politisasi oleh penguasa.

Al Araf berujar, hal ini dilihat dari Indonesia yang lebih mengutamakan penambahan Komando Daerah Militer dan Komando Cadangan yang menelan banyak biaya.

"Perspektif ancaman militer Indonesia itu lebih banyak inward looking, bukan outward looking. Makanya orientasi kekuatan daratnya kuat, kan? Secara jumlah pasukan, itu juga menelan banyak anggaran," tutur Al Araf. •



USAI PERANG KURSI PPP TETAP VERSI LAMA

Dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar X berakhir damai dengan penyatuan kubu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.

Posisi ketua umum tetap dijabat Mardiono, sementara Agus ditetapkan sebagai wakil ketua umum. Selain itu, dalam Surat Keputusan Menteri Hukum terbaru hasil rekonsiliasi, posisi Sekretaris Jenderal PPP dijabat Taj Yasin Maimoen yang juga Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Sebelum rekonsiliasi, kondisi PPP penuh ketegangan setelah Muktamar X melahirkan dualisme kepengurusan. Setelah rekonsiliasi, ketegangan mereda, tetapi tantangan PPP masih ada di depan mata.

Pertemuan islah antara Mardiono dan Agus bersama Taj Yasin kemudian meluruhkan ego masing-masing. Sejak saat itu, Mardiono bersurat ke Kementerian Hukum berisi perubahan susunan kepengurusan yang telah menggandeng kubu Agus.

Pada Senin, 6 Oktober 2025, bertempat di kantor Kementerian Hukum, Ja-

karta, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memfasilitasi pertemuan mereka. Surat keputusan dikeluarkan sesuai permohonan Mardiono. Seluruhnya kemudian bergandengan tangan.

Bantuan Eksternal dan Internal

Politikus senior PPP, Usman Tokan, mengungkapkan adanya peran "orang baik" di balik islah antara kubu Mardiono dan Agus.

"Ya, orang baik ini ada yang internal dan ada yang eksternal. Mereka tidak ingin melihat PPP rusak atau hancur," ujar Usman.

Menurut Usman, para "orang baik" ini berupaya melakukan komunikasi dengan kedua belah pihak, sehingga akhirnya bisa duduk bersama dan berdiskusi. "Alhamdulillah, punya kesepakatan," katanya.

la enggan mengungkapkan siapa sosok-sosok tersebut. Ia hanya men-

egaskan bahwa mereka adalah orang yang peduli dengan PPP, mengingat partai ini bagian dari sejarah panjang perjuangan bangsa.

"Siapa mereka, hanya Allah yang tahu. Pak Mardiono, Pak Agus, dan Gus Yasin bisa duduk satu meja hingga lahir kesepakatan membangun PPP bersama-sama, menyatukan perbedaan dan menyelaraskan persepsi hingga lahir konsep rekonsiliasi," ujar Usman.

Kedua kubu, lanjut Usman, sepakat akur karena memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembalikan PPP ke Senayan. Setelah pertemuan ini, keduanya akan menyusun kepengurusan baru bersama-sama.

"Diharapkan tidak ada lagi kubu-kubuan. Sudah jadi satu. Yang pertama harus dilakukan adalah duduk bersama membentuk susunan kepengurusan gabungan hasil rekonsiliasi," kata Usman.

Politikus senior PPP, Syaifullah Tamliha, menyebut, berdasarkan isu di internal partai, pertemuan itu difasilitasi oleh Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

"Isu yang beredar di internal (katanya) difasilitasi Pak Dasco pada Jumat malam lalu. Hadir di situ Pak Mardiono, Agus Suparmanto, dan Gus Yasin," ujarnya.

Tamliha menilai, peran pemerintah dalam pertemuan itu sebatas memfasilitasi agar konflik internal PPP tidak berkepanjangan.

"Sepertinya ada kesepakatan, tetapi yang jelas pemerintah tidak ingin ada isu konflik politik yang tidak perlu," ujarnya.

Sebagai politikus senior PPP, Tamliha berharap konflik internal ini dihentikan. PPP memiliki pekerjaan rumah berat untuk menyolidkan barisan menyongsong Pemilu 2029.

"Hentikan konflik internal. Pemenang merangkul yang kalah dan yang kalah menerima takdir Allah," tuturnya.

Adapun Menteri Hukum yang juga politikus Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas, tidak membantah atau membenarkan kabar keterlibatan Dasco.

Supratman hanya menegaskan, tugasnya sebatas memproses permohonan Mardiono sebagai ketua umum PPP.

"Beliau mengirim surat untuk mengubah kepengurusan sehingga Kementerian memproses," ujarnya.

Ia juga menegaskan, tidak ada andil

Presiden Prabowo Subianto dalam proses islah tersebut. "Ini inisiatif teman-teman di internal PPP," kata Supratman.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo selalu menekankan agar partai politik menyelesaikan masalahnya sendiri.

Rekonsiliasi

Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hi-

Pilihan kedua tidak mudah, apalagi elektabilitas PPP terus menurun. Karena itu, jalan terbaik adalah islah dengan sharing power, seperti yang terjadi sekarang," ujar Bakir.

Islah ini baru satu langkah dari sekian langkah konsolidasi pasca-perpecahan. Tanggung jawab terbesar kini ada di pundak Mardiono untuk merawat jahi-



dayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan, menilai, PPP harus mampu memilah kader agar tidak menjadi beban bagi partai. Namun, kemampuan itu kerap terkalahkan oleh ego sempit dan pragmatisme yang mengikis modal sejarah panjang PPP.

"Semoga tak jadi keledai yang jatuh berkali-kali di jurang yang sama," katanya.

Ia menilai, bagi partai yang terbelah, ada dua jalan, islah atau keluar dari partai untuk mendirikan partai baru.

"Kedua jalan ini sudah dialami PPP.

tan baru agar tidak lepas lagi.

"Ini semua jalan pragmatis karena konflik mereka juga konflik pragmatis, bukan ideologis," kata Bakir.

Tantangan ke Depan

Setidaknya ada lima tantangan yang akan dihadapi PPP pasca kemelut Muk-tamar ini selesai dengan damai, terutama jelang perhelatan Pemilu 2029.

Tantangan pertama yakni krisis elektoral dan ancaman ambang batas parlemen. Ini adalah hal mendasar yang harus

• INFO NASIONAL

dihadapi PPP untuk bisa eksis kembali dalam panggung politik nasional, terutama di dalam parlemen.

Hasil Pemilu 2024 menunjukkan sinyal peringatan serius ketika PPP hanya memperoleh suara nasional sekitar 3,8 persen, tepat di bawah ambang batas parlemen 4 persen. Dengan demikian, PPP kehilangan sebagian kursi di DPR RI meskipun masih memiliki wakil di DPRD

liknya, yang terjadi justru pelemahan kelembagaan, terutama akibat terjadinya sejumlah ketegangan politik internal.

Sebut saja mulai dari fragmentasi internal pascadualisme kepengurusan saat era Mardiono vs Suharso Monoarfa. Kemudian, berlanjut dengan dualisme Mardiono vs Agus Suparmanto pasca-Muktamar X.

Jika mengacu data Indeks Kelemba-

Hasil penghitungan indeks menunjukkan, meskipun menempati skor terendah dalam Indeks Kelembagaan Partai Politik, PPP justru menempati posisi tertinggi dalam dimensi derajat kesisteman dengan skor 71,25 poin. Artinya, sistem yang dibangun di internal PPP relatif menjadi penopang kelembagaan partai ini.

Tantangan kedua adalah penguatan kelembagaan, terutama setelah PPP melawati fase krisis dengan adanya dualisme kepemimpinan yang terjadi di Muktamar 2024 dan Muktamar X.

Saat 2024, Muktamar yang dimenangkan Muhammad Mardiono sebagai ketua umum memicu perlawanan faksi Suharso Monoarfa yang menggelar forum tandingan. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan Mardiono, tetapi kubu Suharso mengajukan gugatan hukum.

Kondisi serupa juga terjadi setelah Muktamar X 2025 yang menghasilkan gugatan hukum dari kubu yang menolak pengesahan kepengurusan PPP kubu Mardiono. Namun, langkah rekonsiliasi menjadi titik akhir dari dualisme kepengurusan tersebut.

Bagaimanapun PPP sudah banyak pelajaran tentang dualisme kepemimpinan yang tidak hanya terjadi di peristiwa Muktamar X.

Bagaimanapun dinamika politik internal turut menyumbang kerapuhan kelembagaan. Dengan keputusan jalan tengah dalam rekonsiliasi, PPP akan lebih mencurahkan energinya untuk menata dan memperkuat kelembagaan partainya.

Sebut saja agenda kaderisasi dan rekrutmen pemilih baru yang terancam stagnan jika ketegangan politik terus berjalan setelah Muktamar. Apalagi citra publik terhadap PPP berpotensi tergerus jika pertikaian elite terus terjadi di internalnya.

Secara kelembagaan, PPP juga menghadapi tantangan modernisasi organisasi. Banyak beban partai justru karena sistem internalnya masih sentralistik dan patronase yang bergantung kuat pada figur ketua umum. Kondisi ini membuat PPP sulit beradaptasi dengan perubahan cepat di tingkat akar rumput, terutama di kalangan pemilih muda.

Tantangan ketiga bagi PPP adalah



provinsi dan kabupaten/kota.

Jika dibandingkan partai-partai politik nonparlemen lain, posisi PPP memang relatif masih di atas parpol nonparlemen lainnya. Namun, tren elektoral PPP pas-capemilu yang cenderung tidak lebih baik dari hasil pencapaian di Pemilu 2024 menjadi hal yang perlu dikhawatirkan.

Potensi penurunan ini tak lepas dari performa kelembagaan PPP yang justru belum menunjukkan penguatan. Seba-

gaan Partai Politik yang dirilis Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), skor PPP memang paling buncit dari parpol parlemen.

PKS menempati posisi teratas dengan skor Indeks Kelembagaan Partai Politik mencapai 88,65 poin, diikuti Partai Nasdem (83,14 poin), PAN (79,87 poin), PDIP (76,72 poin), Partai Golkar (68,83 poin), Partai Demokrat (68,54 poin), PKB (67,65 poin), dan Partai Gerindra (67,08 poin). Berikutnya PPP dengan 66,92 poin.

adanya pergeseran pemilih Muslim. Sejak awal berdirinya, PPP menggantungkan kekuatan elektoralnya pada basis tradisional umat Islam, khususnya kalangan pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU).

Namun, sejak NU kembali menjadi organisasi sosial keagamaan murni pasca-Khittah 1926 dan munculnya PKB pada 1998, PPP kehilangan basis NU secara signifikan.

Dalam dua dekade terakhir, PPP mengalami penyusutan basis pemilih tradisional karena beberapa hal, di mana PKB berhasil menguasai mayoritas basis pesantren NU, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara, PKS dan PAN merebut pemilih Muslim kelas menengah perkotaan dengan gaya politik yang lebih modern dan profesional.

Selain itu, meningkatnya jumlah pemilih muda Muslim (generasi milenial dan gen Z) yang tidak memiliki ikatan historis dengan PPP. Mereka lebih sensitif terhadap isu konkret (ekonomi, keadilan sosial, dan lingkungan) daripada identitas partai Islam klasik.

Data BPS dan KPU menunjukkan, pada Pemilu 2029, hampir 60 persen pemilih adalah generasi muda (18-39 tahun). Jika PPP tidak mampu menyesuaikan gaya komunikasi politik, program, dan citra partainya terhadap segmen ini, sulit bagi PPP memperluas dukungan. Basis tradisional saja tidak lagi cukup untuk lolos ambang batas nasional.

Tantangan keempat adalah rebranding dan modernisasi partai. Harus diakui PPP selama ini dikenal dengan citra partai tua, konservatif, dan identik dengan konflik internal. Dalam konteks demokrasi elektoral modern, citra tersebut menjadi beban besar.

Untuk bertahan, PPP membutuhkan transformasi dalam tiga aspek, yakni rebranding ideologis dengan memperjelas posisi ideologisnya. Apakah sebagai partai Islam tradisional yang fokus pada representasi pesantren dan ulama? Ataukah sebagai partai Islam modern yang inklusif terhadap pemilih muda dan kelas menengah Muslim?

Selama ini, PPP terkesan setengah-setengah, tidak sekuat PKB di kalangan NU, dan tidak semodern PKS dalam isu-isu kontemporer. Posisi tengah ini yang

kadang membuat tidak jelas segmen pemilihnya.

Tak kalah penting adalah modernisasi struktur dan kaderisasi di mana PPP perlu mengembangkan sistem rekrutmen kader berbasis merit dan digitalisasi organisasi. Kaderisasi harus diarahkan ke pemimpin muda lokal, bukan hanya elite nasional atau keluarga politik lama.

Hal ini akan semakin kuat jika kemudian diikuti dengan langkah transformasi digital dan komunikasi publik yang bagi dari PPP. Bagaimanapun harus diakui PPP tertinggal dalam penggunaan media sosial dan strategi komunikasi digital.

Dalam Pemilu 2024, mayoritas per-

inya relatif kecil.

Menjelang Pemilu 2029, PPP menghadapi dua pilihan strategis, yakni bertahan dalam koalisi pemerintahan untuk menjaga akses kekuasaan dan sumber daya atau mengambil posisi oposisi atau koalisi alternatif untuk merebut kembali basis ideologis Islam yang kini lebih dekat dengan kelompok kritis.

Kedua pilihan memiliki risiko. Jika PPP tetap pragmatis tanpa rebranding ideologis, maka ia akan tenggelam di antara partai besar. Namun, jika PPP memilih jalan oposisi ideologis, ia harus benar-benar melakukan transformasi organisasi dan komunikasi politik untuk bersaing



cakapan politik Islam di media sosial didominasi oleh PKS dan PAN, sedangkan PPP nyaris tidak terdengar. Untuk menghadapi Pemilu 2029, PPP harus membangun tim digital kreatif, memanfaatkan platform, seperti Tiktok, Instagram, dan X (Twitter), untuk menggaet pemilih muda.

Tantangan kelima adalah PPP harus mengambil posisi yang tepat di peta koalisi politik nasional. Bagaimanapun, harus diakui setelah gagal lolos ambang batas parlemen di Pemilu 2024, PPP tidak lagi menjadi king maker seperti awal reformasi.

Posisi PPP kini adalah partai menengah bawah yang bergantung pada koalisi besar untuk bertahan. Dalam pemerintahan setelah Pemilu 2024, PPP berada di kubu koalisi, tetapi kontribus-

dengan partai-partai berbasis Islam lainnya.

Pada akhirnya, untuk menghadapi kelima tantangan di atas, mau tidak mau PPP membutuhkan sejumlah syarat. Syarat pertama dan utama sudah dilakukan, yakni rekonsiliasi internal untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan imbas dari Mukhtar X.

Setelah bekal rekonsiliasi, penajaman identitas politik perlu dilakukan guna menentukan arah ideologis dan segmen pemilih utama secara jelas, apakah PPP akan fokus pada basis pesantren (NU), pemilih Islam perkotaan, atau kombinasi dengan strategi diferensiasi. Termasuk juga PPP harus segera melakukan transformasi digital dan kaderisasi pemuda yang menjadi pilar perjuangan politiknya. ●

MAJU MUNDUR JANJI KOMITE REFORMASI POLRI

Janji pembentukan Komite Reformasi Polri yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto setelah peristiwa penanganan eksekutif kepolisian terhadap pengunjuk rasa di sejumlah daerah, akhir Agustus lalu, mulai kehilangan momentum.

Sejak wacana pembentukan tim itu digulirkan, belum ada kejelasan mengenai waktu pelantikan ataupun susunan anggotanya.

"Sebenarnya mau diumumkan minggu ini tadinya. Tapi, beberapa kali hari yang dipilih, ada beberapa di antara anggota yang akan masuk ke dalam Komite

Reformasi Kepolisian ini berhalangan," ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2025.

Penundaan itu memperpanjang rentetan lambannya pembentukan komite yang mulai diwacanakan sejak pertengahan September lalu. Saat itu, Prasetyo mengatakan, pemerintah menyiapkan langkah pembenahan kepolisian melalui pembentukan Komite Reformasi Polri. Pembentukan komite ini merupakan bagian dari komitmen Presiden untuk memperkuat reformasi di kepolisian.

"Tentu ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan, evaluasi, dan itu biasa untuk seluruh institusi. Keinginan beliau adalah membuat Komite Reformasi Kepolisian. Ditunggu, sedang disusun," kata Prasetyo, 17 September 2025.

Pelantikan anggota komite pada mu-

lanya akan diumumkan setelah Presiden Prabowo menyelesaikan lawatan ke empat negara. Namun, dua pekan setelah ketibaan Presiden, 27 September 2025, tim belum juga dilantik.

Meskipun demikian, sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam komite tersebut mulai beredar. Selain mantan Menko Polhukam Mahfud MD, Prasetyo juga menyebut tim akan diisi oleh mantan kepala Polri.

Nama lain yang dikabarkan masuk dalam komite adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidiqie; Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan, Yusril Ihza Mahendra; Wamenko Kumham-Imipas, Otto Hasibuan; dan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Sejumlah mantan Kapolri, seperti Badrodin Haiti, Da'i Bachtiar, Idham Azis, dan Tito Karnavian, juga disebut masuk dalam radar.

Di tengah tak kunjung terbentuknya



komite bentukan Presiden tersebut, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo justru mendahului dengan membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri. Hal tersebut tertuang dalam surat perintah bernomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1./2025 yang terbit pada 17 September 2025. Tim ini dipimpin Kepala Lembaga Diklat Polri, Komjen Chryshnanda Dwilaksana. Tim itu beranggotakan 52 perwira Polri, terdiri dari 47 perwira tinggi dan 5 perwira menengah.

Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, mengatakan, ketidakjelasan mengenai pembentukan Komite Reformasi Polri menggambarkan lemahnya fokus pemerintah terhadap reformasi Polri. Padahal, pembentukan komite tersebut merupakan salah satu janji awal Presiden Prabowo setelah penanganan eksekutif kepolisian terhadap pengunjuk rasa di sejumlah daerah pada akhir Agustus lalu.

"Tampaknya tidak ada keseriusan dan sense of urgency yang kuat dari Presiden Prabowo. Tidak jelas target pembentukannya kapan, mandatnya untuk apa, sejauh mana perubahannya, apalagi orang-orangnya juga belum jelas," kata Isnur di Jakarta, Sabtu, 11 Oktober 2025.

Tertundanya pembentukan Komite Reformasi Polri pun diduga bukan semata karena kendala teknis, melainkan karena adanya tarik-menarik kepentingan di lingkaran kekuasaan. Kondisi itu justru dikhawatirkan akan melahirkan kompromi politik yang bisa mengaburkan arah reformasi.

"Kalau ada tarik-menarik atau manuver, itu menandakan adanya intervensi atau kepentingan yang bermain. Saya khawatir ujungnya justru terjadi kompromi, dan kalau sudah kompromi, perubahan yang dihasilkan tidak akan fundamental atau struktural, tetapi hanya bersifat kosmetik," kata Isnur.

Isnur menilai Presiden seharusnya memahami betapa mendesaknya kebutuhan reformasi kepolisian karena situasinya sudah terlalu lama dibiarkan tanpa perubahan signifikan. Situasi ini diperparah dengan banyaknya pelanggaran terhadap hak warga, konstitusi, dan hak asasi manusia yang melibatkan aparat penegak hukum.

Selain pembenahan Polri, pemerintah

juga harus memperhatikan kecenderungan meningkatnya militerisasi di ruang sipil. Dengan demikian, agenda reformasi kepolisian tidak berjalan berlawanan dengan upaya menjaga profesionalisme TNI.

"Presiden justru melakukan kesalahan dengan memberi porsi terlalu besar pada peran multifungsi TNI. Saat polisi seharusnya direformasi, tentara malah

ri menunjukkan resistansi institusi Polri, menolak upaya reformasi dari (lembaga) kepresidenan," ujarnya.

Jika Presiden Prabowo benar-benar serius membenahi Polri, Komite Reformasi Kepolisian semestinya dibentuk bersamaan dengan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Agustus. Dengan demikian, reformasi kelembagaan bisa berjalan beriringan dengan



makin berkuasa di ruang-ruang sipil. Reformasi Polri harus dijalankan bersamaan dengan mengembalikan TNI pada fungsi pertahanan, bukan diberi tugas-tugas sipil," ujarnya.

Pengajar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Herlambang Perdana Wiratraman, juga melihat Presiden dan Polri belum menunjukkan kesungguhan untuk mereformasi Polri.

"Pembentukan tim internal Polri sendi-

pengungkapan kebenaran atas peristiwa kekerasan dalam kerusuhan Agustus lalu.

"Tanpa TGPF, Komite Reformasi Kepolisian tidak akan pernah tahu situasi lapangan secara mutakhir dan akan sekadar menjadi gimik, bukan proses yang simultan dengan pertanggungjawaban hukum kepolisian atas banyaknya laporan pelanggaran HAM," katanya.

• INFO NASIONAL

Keraguan Herlambang pada komitmen Presiden mereformasi Polri kian menguat setelah beredar nama-nama yang akan masuk dalam tim. Salah satunya dari nama yang beredar tidak ada unsur dari masyarakat sipil yang diikutsertakan. Padahal, kelompok ini memiliki rekam jejak kasus-kasus pelanggaran HAM oleh kepolisian.

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukmin-to, menilai, lambannya pembentukan Komite Reformasi Polri memang bisa

sudah dijalankan Polri sendiri.

"Sedikit penundaan di tahap awal masih bisa dimaklumi selama tujuannya memperkuat fondasi dan memastikan efektivitas. Yang penting, komite itu hadir dengan kewenangan yang efektif dan dihormati, bukan sekadar menjadi etalase atau respons sesaat terhadap desakan publik," ujarnya.

Namun, Bambang mengingatkan agar kehati-hatian itu tidak berubah menjadi kelambatan yang berkepanjangan. Publik sudah menunggu refor-

agar publik tak lagi meragukan komitmen atau sabda Presiden yang sudah terucap," kata Bambang.

Sesuai Harapan Masyarakat

Komitmen untuk mereformasi Polri diharapkan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Komite Reformasi Polri yang nantinya dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan eksternal terhadap institusi kepolisian.

Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengatakan tengah menunggu tokoh-tokoh yang akan mengisi Komite Reformasi Polri. Meski belum diumumkan, politisi Partai Gerindra ini mengingatkan tim bentukan Presiden ini harus sesuai harapan masyarakat.

"Saya sedang menunggu jumlah orangnya (Komite Reformasi Polri), personil yang ditunjukkan oleh Presiden. Nanti kita dari situ kita akan lihat. Harapannya, kan, masyarakat sudah cukup jelas dan terang," ujarnya di Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.

Salah satu harapan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR, Sarifudin Sudding. Dalam kesempatan yang berbeda, dia menilai pembentukan Komite Reformasi Polri sebagai momentum penting memperkuat pengawasan eksternal terhadap institusi kepolisian.

Selama ini, publik kerap mengkritik transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme Polri, sehingga mendorong reformasi di tubuh institusi penegak hukum tersebut.

"Reformasi Polri harus lebih dari sekadar dokumen atau laporan administratif. Publik menuntut transparansi kinerja, akuntabilitas, dan pengawasan independen yang mampu mendorong perubahan nyata dalam budaya organisasi kepolisian," kata Sudding.

Menurut Sudding, kehadiran tokoh-tokoh besar seperti Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, dan Jimly Asshiddiqie memberikan bobot akademis serta jaminan independensi yang dibutuhkan dalam proses reformasi.

Sudding juga menekankan reformasi Polri tidak sekadar simbol formalitas. Perbaikan sejati hanya akan tercapai jika komite memiliki kewenangan nyata untuk mengevaluasi kebijakan, budaya



menimbulkan persepsi adanya hambatan politik. Namun, ia memandang kehati-hatian pemerintah masih dapat dipahami sejauh diarahkan untuk memperkuat fondasi kelembagaan.

Pembentukan komite tidak boleh tergesa-gesa agar tidak menimbulkan resistansi internal ataupun tumpang tindih dengan mekanisme reformasi yang

masi kepolisian bertahun-tahun. Kepercayaan terhadap komitmen Presiden Prabowo bisa memudar jika wacana pembentukan komite terus berlarut tanpa kepastian.

"Kalau terlalu lama tanpa kejelasan, narasinya bisa bergeser dari sedang disiapkan menjadi sekadar wacana atau bahkan gimik politik. Tenggat harus ada

organisasi, dan praktik operasional Polri.

Sudding juga menyoroti potensi dualisme pengawasan akibat pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Bahwa saat ini ada dua tim dengan visi dan misi yang sama harus dipastikan tidak terjadi tumpang tindih. Jangan sampai dualisme pengawasan justru menimbulkan masalah baru," ujarnya.

Menurutnya, keberadaan tim internal yang beranggotakan perwira aktif berisiko menjadi tameng yang meredam kritik publik dan menghambat reformasi struktural maupun kultural.

"Karena itu, evaluasi internal harus dikombinasikan dengan kontrol eksternal yang kuat agar reformasi tidak berhenti pada level administratif," tutur Sudding.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah lebih dulu membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri. Kendati demikian, tim internal ini disebut akan bekerja sama dengan Komite Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo. Terkait hal ini, Sudding memberikan beberapa catatan prioritas yang harus diperhatikan, baik oleh tim internal Polri maupun komite bentukan Presiden.

Pertama, terkait transparansi dan akuntabilitas internal. Ia menegaskan publik harus memiliki akses yang jelas terhadap data kinerja, pelanggaran anggota, dan mekanisme penindakan.

"Kedua, demiliterisasi dan depolitisasi. Polri perlu menyingkirkan praktik militeristik dan keterlibatan politik praktis yang masih tersisa sejak era ABRI," ungkapnya.

Sudding juga menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan eksternal. Menurutnya, Kopolnas, lembaga independen, serta mekanisme judicial scrutiny (pengawasan pengadilan terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana) pada KUHAP baru, harus memiliki otoritas nyata terhadap kewenangan penyidikan.

"Selain itu, reformasi juga harus menyentuh perubahan budaya organisasi, meliputi pola pendidikan, etika pelayanan publik, serta sikap aparat terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan," terang Sudding.

Keberhasilan reformasi Polri akan diukur dari dampak nyata terhadap perlindungan hak warga negara dan kepastian hukum, bukan sekadar simbol politik.

"Komite Reformasi Polri harus menjadi instrumen kontrol yang efektif, menutup celah sejarah reformasi 1998 yang belum tuntas, dan memastikan Polri mampu menjalankan fungsi melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat secara profesional," ujar Sudding.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira, menyambut baik keterlibatan sejumlah tokoh independen dalam Komite Reformasi Polri, seperti Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, dan Jimly Asshiddiqie. Menurutnya, kehadiran mereka menjadi harapan untuk

ya mekanisme check and balances.

"Transparansi dan akuntabilitas publik harus menjadi fondasi utama dalam reformasi ini. Publik berhak tahu bagaimana mekanisme pengawasan dan penindakan pelanggaran anggota Polri berjalan," ungkapnya.

Reformasi Polri juga tidak boleh berhenti pada tataran restrukturisasi birokrasi, melainkan harus mencakup perubahan mendasar dalam tata kelola dan budaya organisasi.

"Reformasi Polri bukan sekadar restrukturisasi birokrasi, tapi perubahan mendasar pada tata kelola dan budaya organisasi. Ini harus memastikan bahwa hak-hak warga negara, terutama kelompok rentan, terlindungi secara nyata," katanya.



memperkuat kontrol eksternal terhadap Polri.

"Terutama dalam meninjau praktik operasional dan kebijakan internal yang berdampak pada hak-hak warga negara," ujar Andreas.

Namun, Andreas mengingatkan adanya potensi risiko dari dualisme pengawasan, khususnya dengan hadirnya Tim Transformasi Reformasi Polri yang beranggotakan 52 perwira kepolisian, mulai dari pelindung hingga anggota.

Kehadiran perwira aktif dalam tim reformasi dinilai berpotensi menimbulkan bias dan mengurangi efektivitas reformasi serta perlindungan hak publik.

Andreas menegaskan, reformasi Polri harus menyentuh akar persoalan, seperti budaya kekerasan, dominasi kepolisian dalam proses penyidikan, serta lemahnya

Andreas juga menekankan pentingnya profesionalisme Polri agar institusi ini dapat berfokus pada pelayanan publik dan penegakan hukum yang adil.

"Kami mengingatkan pentingnya Polri terlepas dari praktik politik dan militeristik agar benar-benar dapat melayani masyarakat secara profesional," tuturnya.

Komite Reformasi Polri juga harus berfungsi sebagai instrumen independen yang menjaga hak publik, memastikan keadilan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

"Keberhasilan reformasi akan diukur dari perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat, bukan sekadar laporan formal atau retorika politik semata," ujar Andreas. ●

RAKYAT PUAS SATU TAHUN KEPEMIMPINAN PRABOWO

Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah satu tahun bekerja tergolong tinggi. Menurut survei Index Politica, 83,5 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.

Direktur Eksekutif Index Politica, Denny Charter, menjelaskan, hasil survei ini menunjukkan bahwa publik secara umum menilai pemerintahan Prabowo-Gibran cukup efektif dalam satu tahun pertama.

"Tingkat awareness masyarakat terhadap kebijakan Presiden mencapai 90,8 persen, sementara terhadap para menteri 87,5 persen. Ini menunjukkan publik mengikuti dan menilai kerja kabinet dengan cukup intens," ujar Denny dalam keterangan pers, Senin, 13 Oktober 2025.

Dalam daftar kepuasan menteri, Purbaya Yudha Sadewa menduduki posisi tertinggi dengan tingkat kepuasan 90,23 persen, disusul Wihaji (89,45 persen), Erick Thohir (85,65 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (83,35 persen), dan Amran Sulaiman (82,55 persen).

Selain itu, Nasaruddin Umar dan Bahliil Lahadalia juga masuk jajaran menteri dengan tingkat kepuasan di atas 80 persen.

Hasil ini sejalan dengan tingkat popularitas dan ketekeralan publik terhadap

sejumlah menteri. Menteri BUMN Erick Thohir tercatat memiliki tingkat keterkeralan tertinggi 82,56 persen, diikuti AHY (80,64 persen) dan Bahliil Lahadalia (79,56 persen).

"Reshuffle kabinet yang dilakukan tiga kali selama setahun dinilai publik sebagai langkah positif. Penilaian terhadap menteri-menteri baru cenderung meningkat," ungkap Direktur Riset Index Politica, Fadhy.

Secara umum, survei menyimpulkan, Kabinet Merah Putih dinilai publik bekerja dengan baik. Sebanyak 85,5 persen responden bahkan menyatakan bersedia mengikuti survei lanjutan untuk memberikan penilaian lebih mendalam terhadap para menteri.

Sementara itu, hasil survei Indo Survey & Consulting (ISC) menunjukkan ada 12 menteri Kabinet Merah Putih yang kinerjanya memperoleh kepuasan publik tertinggi di atas 70 persen. Tiga di antaranya berperan krusial sebagai teknokrat yang mengonsolidasi program unggulan

Presiden Prabowo.

Menteri yang meraih skor tertinggi adalah Purbaya Yudhi Sadewa dengan skor 85 persen. Dibuntuti Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (83 persen) dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (82 persen). Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berada di posisi keempat (80 persen), diikuti Menteri Luar Negeri Sugiono (79 persen), dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (77 persen).

Selanjutnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti (76 persen), Menteri Agama Nasaruddin Umar (75 persen), dan Menteri Hukum Supratman (73 persen). Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani (72 persen), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamarie Chaniago sama-sama mencatat 70 persen.

Analisis politik Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah, memberi catatan sejumlah menteri yang mendapatkan skor cukup baik dari publik



dalam survei ISC karena berperan krusial dalam melaksanakan program pemerintah selama nyaris setahun terakhir.

Pertama adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memegang peranan kendali inflasi daerah dan memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi transfer keuangan daerah (TKD).

Kendati, tantangan yang dihadapi Tito adalah tidak semua daerah memiliki kapasitas infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM) yang sama. Akan tetapi, Tito tampak berpengalaman mengonsolidasi program unggulan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pangan dan pengendalian inflasi sampai ke level daerah.

Insan juga memberi catatan yang cukup disayangkan dari Tito sebagai Mendagri, yang malah mendukung wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Seharusnya Tito tidak menyetujui gagasan ini karena mengurangi esensi partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Sekalipun alasannya adalah efisiensi," kata Insan.

Selanjutnya, menteri yang cukup mendapat skor kepuasan publik tertinggi adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang terlihat memberi angin segar bagi sektor ekonomi sampai ke level sektor riil.

Meski masih terlalu dini untuk diberi rapor positif, gebrakan Purbaya yang menyalurkan Rp200 triliun ke bank BUMN sangat memberi peluang meningkatkan volume bisnis dan memperluas lapangan pekerjaan.

"Serta manuver anti-tax amnesty, penekanan kepada Pertamina untuk mengolah minyak sendiri sampai penghapusan pajak masyarakat dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan. Pendekatan yang pro daya beli masyarakat ini sangat berbeda dengan orientasi stabilitas dan kehati-hatian ala Sri Mulyani. Kita sama-sama harus memantau supaya dana Rp200 triliun ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan," kata Insan.

Figur lain yang mendapat penilaian positif dari publik dan berperan cukup teknokratik adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang sejauh ini cukup maksimal dalam menjembatani

komunikasi antara presiden dan anggota kabinet. Salah satu peran yang tampak dilupakan Teddy adalah meredam konflik dari intrik internal kabinet.

Terlepas dari catatan positif para Menteri Kabinet Merah Putih, Insan memberi pula catatan sosok menteri yang mendapat skor rendah atau negatif dipandang publik. Salah satu yang paling disorot adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Selama hampir setahun pemerintahan Prabowo, Bahlil banyak melakukan ke-



bijakan blunder yang menyusahkan rakyat, seperti kebijakan pelarangan para pengecer kecil, di luar pengecer resmi Pertamina untuk menjual LPG 3 kilogram.

Selain itu, Bahlil juga dianggap publik sebagai biang keladi masalah perusahaan lingkungan dengan diizinkan PT GAG Nikel untuk beroperasi di kawasan Raja Ampat.

"Dengan berbagai kontroversi kebijakan dan posisinya yang rentan dengan konflik kepentingan di sektor strategis, Bahlil Lahadalia paling layak untuk dikeluarkan dari kabinet Presiden Prabowo Subianto" kata Insan.

Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, menilai, satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi momentum penting untuk melakukan koreksi total terhadap tata kelola dan kepemimpinan nasional.

Sudirman menilai, selama setahun ini, akar persoalan pemerintah terletak pada fungsi kepemimpinan dan keteladanan moral. Ia menyebut lemahnya moralitas

kepemimpinan menjadi sumber kecacauan dalam tata kelola negara.

"Satu-satunya jalan pemulihan adalah melakukan koreksi total atas tata cara, tata kelola, dan kepengurusan negara," ujarnya.

Sudirman menekankan, publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.

Ia mencontohkan, kasus program MBG yang menuai kritik publik, serta sejumlah agenda reformasi yang belum

menunjukkan hasil konkret.

"Kita masih menunggu koreksi yang sifatnya konkret. Kita juga sedang menanti kabar dari Tim Reformasi Polri yang kini menjadi kontroversi, serta melihat apakah penindakan terhadap mafia minyak dan kasus hukum lainnya akan benar-benar dijalankan," imbuhnya.

Dalam pandangan Sudirman, ada beberapa tantangan besar masih menghantui pemerintahan saat ini seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, dan lemahnya kualitas demokrasi.

Selain tiga tantangan tersebut, Sudirman juga menyinggung kerusakan ekologi dan lingkungan hidup yang kian mengkhawatirkan.

Pemerintah juga harus melakukan perbaikan tata kelola yang dimulai dari kepemimpinan beretika dan berintegritas.

"Kepemimpinan moral adalah fondasi utama negara. Tanpa keteladanan, semua sistem dan kebijakan hanya akan menjadi formalitas belaka," pungkasnya. ●

PAHAM

Gunawan Effendi

Jadi, kita paham bahwa belakangan ini emak-emak atau siapa saja yang mengurus konsumsi di tingkat rumah tangga sedang menghadapi kenaikan harga. Terutama harga daging ayam dan cabai merah.

Tapi kenaikan harga itu juga akan lebih terasa di Indonesia bagian barat. Katakanlah Pulau Jawa dan Sumatera. Di bagian tengah dan timur, agaknya kenaikan harga daging ayam dan cabai tidak terlalu terasa. Mungkin karena ketergantungan terhadap daging ayam dan cabai maupun pasokannya tidak seperti di Jawa, Sumatera, dan beberapa daerah di Kalimantan.

Jika ada yang bertanya, bagaimana bisa memahami naik-turun harga dan perbedaan antara Indonesia barat, tengah, dan timur? Banyak cara sebenarnya. Namun, cara yang lebih mudah dan cepat adalah memahami laporan bulanan Badan Pusat Statistik (BPS). Laporan bulanan itu keluar teratur setiap awal bulan. Untuk awal Oktober 2025, BPS mengumumkan perkembangan pada September dan bulan-bulan sebelumnya. Bahkan kita bisa menelusuri data tahun-tahun sebelumnya.

Nah, pada 1 Oktober 2025, BPS melaporkan angka inflasi, catatan mengenai kenaikan harga barang atau jasa pada periode tertentu. Untuk September 2025, kenaikan yang mencolok terjadi pada harga daging ayam dan cabai merah tadi. BPS juga mencatat kenaikan harga emas dan biaya pendidikan tinggi, apakah diploma, akademi, maupun perguruan tinggi.

Tapi, BPS juga mencatat bahwa kenaikan harga itu tak mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Dalam laporannya, lembaga yang sehari-harinya berkuat dengan pengumpulan dan analisis data berupa angka-angka ini melaporkan, pada September 2025 inflasi terjadi di 24 dari 38 provinsi di Indonesia.

Sedangkan di 14 provinsi lainnya yang terjadi adalah deflasi, penurunan harga. Kita sebutkan saja provinsi yang mengalami deflasi pada September 2025, dengan mengutip laporan BPS: Bali, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Sedangkan di provinsi yang mengalami inflasi, tingkatannya pun berbeda-beda. Menurut laporan BPS, untuk kawasan Sumatera, inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Riau dan yang terendah kenaikan harganya adalah Provinsi Lampung.

Di Jawa, yang terendah inflasinya adalah Banten, sedangkan yang tertinggi terjadi di Jawa Timur. Lanjut dengan kawasan Bali dan Nusa Tenggara (Nusra). Untuk Nusra, hanya Nusa Tenggara Barat yang mengalami inflasi. Bali dan Nusa Tenggara Timur justru mengalami deflasi.

Untuk Kalimantan, inflasi tertinggi terjadi di Kalimantan Tengah. Sedangkan inflasi terendah ada di Kalimantan Barat, selain Kalimantan Utara yang mengalami deflasi.

Lebih ke timur lagi, di Sulawesi, hanya Sulawesi Utara yang mengalami inflasi. Provinsi lainnya di Sulawesi mengalami deflasi. Deflasi terdalam tercatat di Sulawesi Tenggara. Sedangkan di Maluku dan Papua, Papua Barat menjadi provinsi dengan inflasi tertinggi tapi provinsi lainnya mengalami deflasi.

Bagaimana memahami ragam inflasi antardaerah? Cara mudahnya, lihat juga data tentang perputaran uang yang beredar. Lebih dari itu, inflasi yang masih 0-1 persen pertanda ekonomi bergerak dan memerlukan lebih banyak konsumsi maupun energi.

Toh masih banyak yang perlu dipelajari. Jadi, jangan pernah berhenti. ●





IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

▲ **6,947.83**
0.00%

IDX COMPO



NFO KHUSUS

13 08

06 Jun 2024
Thursday

9,386 M

3,990 B

474,172

TOP 5 GAINERS

NO	STOCK	PRICE	CHANGE
1	TOPS ▲	2	100%
2	CDRE-W ▲	2	100%
3	BTEK ▲	2	100%
4	AKSI ▲	143	26.55%

TOP 5 FREQ

NO	STOCK	PRICE	FREQ
1	ATA ▼	61	39,093
2	BBN ▲	4,420	17,388
3	WFI ▲	170	11,342
4	ANM ▼	1,330	11,267



SHARIA INVESTMENT WEEK

JAGA-JAGA INFLASI DAERAH

Tingkat inflasi (kenaikan harga) di tingkat provinsi, kabupaten dan kota menjadi sorotan. Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan sejumlah fakta.

Rapat pengendalian inflasi daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebenarnya kegiatan rutin. Berlangsung secara hibrid, gabungan tatap muka dan dalam jaringan (daring) internet yang melibatkan pejabat terkait di tingkat pusat hingga daerah. selama tiga tahun terakhir sejak September 2022, tercatat 140 kali rapat serupa telah berlangsung.

Namun, pada Senin, 6 Oktober 2025 itu, suasana rapat agak berbe-

bankan jumlah rapat kita. Jumlah rapat, jumlah lamanya rapat mulai 22 September 2022, 140-an kali, kalau enggak salah,” ujar Tomsu.

Toh bukan data jumlah rapatnya saja yang tertayang, melainkan juga kecenderungan harga beberapa kebutuhan sehari-hari seperti cabai merah dan cabai rawit yang terus meningkat dari minggu pertama hingga minggu terakhir September 2025. Menurut dia, kondisi ini seharusnya bisa diantisipasi lebih awal oleh pemerintah daerah,

hafal. Di bulan apa, di musim apa, daerahnya cabai akan naik. Di bulan apa, di musim apa, bawang akan naik,” ungkapnya.

Selanjutnya, Sekjen Kemendagri meminta pemerintah daerah (Pemda) memantau secara rutin perkembangan angka inflasi di wilayahnya masing-masing. Alasannya, setiap fluktuasi inflasi di daerah akan berimbas langsung pada kondisi yang dirasakan masyarakat.

Berdasarkan data yang dirilis Badan



da. Misalnya saja, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsu Tohir yang mempertanyakan efektivitas rapat-rapat semacam ini karena para pejabat daerah dinilai tak belajar dari 140 kali rapat soal pengendalian inflasi.

Pak Sekjen mengemukakan betapa lemahnya kesiapan pemerintah daerah (Pemda) menghadapi lonjakan harga komoditas pangan seperti cabai, bawang, ayam ras, dan telur ayam ras, meskipun pembahasan soal itu sudah berulang kali dilakukan. “Tolong tay-

bukan dibiarkan hingga masyarakat merasakan dampaknya.

Tomsu menyebut bahwa pejabat daerah tidak boleh bekerja layaknya “pemadam kebakaran” yang baru sibuk ketika situasi genting. Menurut dia, data harga pangan selama tiga tahun terakhir harusnya sudah cukup untuk memprediksi pola kenaikan harga setiap musim.

“Ya, 140 kali kita rapat. Dengan 140 kali, saya harapkan tim teknis daerah, Kepala Dinas yang berkaitan, sudah

Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2025, angka inflasi nasional dari tahun ke tahun yakni dari September 2024 sebesar 2,65 persen. Sedangkan inflasi bulan ke bulan dari September 2025 terhadap Agustus 2025 sebesar 0,21 persen.

Sedangkan dalam rapat, hadir pula antara lain Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyananti, Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nita

Yulianis, serta Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran. Turut hadir secara virtual Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Pertanian Kementerian Pertanian Suwandi, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nawandar Dwi Putra, serta para pejabat terkait lainnya.

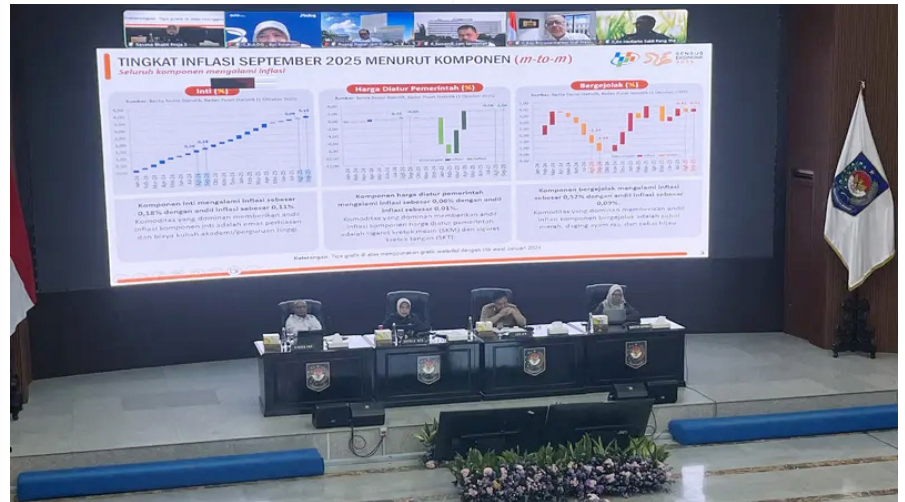
Masih dalam rapat, Tomsy menyoro-

Riau 5,08 persen, Aceh 4,45 persen, dan Sumatera Barat 4,22 persen. Angka tersebut menunjukkan tekanan harga yang sudah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah Sumatera. Beberapa daerah lain menunjukkan pula peningkatan harga yang signifikan: Sulawesi Tengah mencatat inflasi 3,88 persen, Jambi 3,77 persen, Sulawesi Tenggara 3,68 persen, dan Papua Pegunungan 3,55 persen.

"Bahwa di sini kita sama-sama melihat Provinsi Sumatera Utara 5,32 pers-

perhatian para gubernur," ujarnya.

Selanjutnya ia meminta perhatian khusus dari para gubernur di daerah dengan tingkat inflasi tertinggi agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor penyebabnya. "Yang menjadi permasalahan hanya sedikit provinsi, hanya sedikit kota dan kabupaten yang inflasinya tinggi. Oleh sebab itu, teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras di daerah yang merah-merah ini. Kenapa? Karena yang lain bisa," ujarnya.



ansportasi dari APBD



daerah dengan angka inflasi tertinggi. Daerah tersebut yakni Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Riau, Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Kemudian untuk tingkat kabupaten yaitu Deli Serdang, Labuhanbatu, Pasaman Barat, Indragiri Hilir, dan Kerinci. Sedangkan kota yakni Pematangsiantar, Gunungsitoli, Padangsidempuan, Dumai, dan Baubau.

Berdasarkan pemaparan data dalam rapat, Sumatera Utara mencatat inflasi tertinggi sebesar 5,32 persen, disusul

en, Provinsi Riau 5,08 persen, Provinsi Aceh 4,45 persen, Sumatera Barat 4,22 persen, Sulawesi Tengah 3,88 persen, Jambi 3,77 persen, Sultra 3,68 persen, Papua Pegunungan 3,55 persen," ungkap Pak Sekjen

Tomsy mengatakan bahwa kenaikan inflasi di atas lima persen merupakan sinyal serius bagi pemerintah daerah untuk segera bertindak. "Bapak-Ibu sekalian, inflasi 5,32 dalam satu provinsi itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi

la menambahkan, daerah dengan inflasi tinggi perlu memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, dinas perdagangan, dan pelaku pasar agar penyaluran barang tetap lancar dan harga bisa terkendali. Pak Sekjen mengemukakan pula, sebagian besar wilayah dengan inflasi tinggi bukan termasuk daerah yang sulit dari sisi distribusi barang.

"Deli Serdang, Labuhan Batu, Pasaman Barat, Tembilahan, Kerinci, Aceh Tengah, Kampar, Toli-Toli, Karo, Lu-

• INFO KHUSUS

wuk- ini bukan daerah-daerah yang sulit untuk distribusi. Begitu juga kotanya seperti Pematang Siantar, Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, Dumai, Bau-Bau, Sibolga, Pekanbaru, Medan, Bukittinggi, Lhokseumawe," paparnya.

Tomsy menyoroti fakta bahwa banyak daerah dengan akses distribusi lancar justru mengalami inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang sulit secara geografis. Sementara itu, beberapa provinsi di Sumatera yang memiliki akses logistik lebih baik justru mencatat kenaikan harga tajam.

Ia membandingkan dengan Papua Pegunungan, yang justru memiliki tantangan besar dari sisi logistik tetapi inflasinya masih terkendali. "Kita sama-

menyebut ada daerah yang hanya mengharapkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa tanpa berusaha sungguh-sungguh menekan kenaikan harga di wilayahnya.

Data Kemendagri mencatat, terdapat 25 pemerintah daerah (pemda) yang belum sama sekali menjalankan upaya konkret pengendalian inflasi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) Kemendagri hingga 6 Oktober 2025, dari total pemda yang dipantau, 43 pemda telah melakukan enam upaya konkret sekaligus.

Sedangkan 159 pemda menjalankan 4-5 langkah. Sebanyak 287 pemda baru melakukan 1-3 upaya, dan 25 pemda belum melakukan langkah

Hanya 43 daerah yang rajin," kata dia.

Dalam laporan Kemendagri tercatat pula sebagian besar pemda aktif melakukan pemantauan harga dan stok serta rapat teknis TPID. Hingga 6 Oktober 2025, tercatat 395 pemda memantau harga dan stok barang kebutuhan pokok, naik dari 394 pemda pada akhir September. Kegiatan operasi pasar murah tetap menjadi langkah paling banyak dilakukan, yakni oleh 489 pemda, disusul rapat TPID di 376 daerah, serta pencanangan gerakan menanam di 296 daerah.

Tomsy pun meminta kepala daerah untuk segera mengevaluasi kinerja jajarannya jika dinilai tidak bergerak cepat. "Bagi kepala daerah, kalau umpamanya dinas-dinasnya tidak bergerak, mungkin selanjutnya untuk dievaluasi," katanya.

Ia menegaskan, pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama, terutama kepala daerah yang memiliki kewenangan langsung terhadap kebijakan di lapangan. Jadi, Tomsy mengingatkan agar para gubernur, bupati, dan wali kota segera mengevaluasi kinerja dinas terkait jika inflasi di wilayahnya tidak menunjukkan perbaikan.

Toh Tomsy mengapresiasi pula peran aktif dari Pemda yang selama ini telah bekerja sama dalam mengendalikan harga komoditas pangan. Berbagai upaya yang dilakukan diketahui telah berhasil menurunkan harga sejumlah komoditas pangan seperti beras hingga minyak goreng. Ia berharap, Pemda dapat semakin optimal dalam melakukan langkah konkret pengendalian.

"Kita bekerja di sini setiap minggu meluangkan waktu tiga jam untuk mengabdikan diri kepada masyarakat [melalui Rakor Pengendalian Inflasi]. Berbuat yang terbaik supaya barang-barang, terutama yang kita konsumsi sehari-hari itu terjangkau dan tidak mengalami kenaikan yang tinggi," ujarnya.

Ia menambahkan, dari hampir 500 kota dan kabupaten, kini hanya sekitar 60-an daerah yang harga beras dan minyak gorengnya belum turun. "Itu menandakan apa? Kalau kita kerja, kalau kita mau usaha, bisa. Sekali lagi, kalau kita bekerja dengan rajin, dengan gigih, bisa," tandasnya. ●



sama tahu bagaimana sulitnya kondisi medan distribusi Papua Pegunungan. Tapi Papua Pegunungan inflasinya bisa 3,55 persen. Sementara provinsi lain, yang distribusinya lancar, itu angkanya tinggi," ucap Tomsy.

Menurut Tomsy, untuk mengendalikan angka inflasi, Pemda dapat belajar kepada daerah lainnya yang kondisi inflasinya lebih terkendali. Ia meminta jajaran Pemda untuk bekerja keras, rutin mengecek perkembangan harga di lapangan, serta melakukan evaluasi program apabila daerahnya mengalami angka inflasi yang tinggi.

Tomsy berpesan, sebagai pelayan publik, jajaran pejabat terkait di daerah perlu memastikan harga pangan tidak mengalami gejolak. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada rakyat. Namun Pak Sekjen juga

apapun. "Yang paling bawah 25 daerah yang mengharapkan anugerah Yang Maha Esa tanpa bekerja," kata Tomsy

Nah, sembilan upaya langkah konkret yang menjadi indikator penilaian mencakup: Operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT (Belanja Tidak Terduga), dukungan transportasi dari APBD, pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, rapat teknis Pengendalian Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dan menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting.

"Sembilan. Tapi, enam saja kalau dilaksanakan itu sudah sangat luar biasa.

BOBBY LANGSUNG BEREAKSI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) langsung bereaksi terkait laju inflasi pada September 2025 yang tercatat 5,32 persen (yoy), tertinggi secara nasional. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan, pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama daerah, mengingat dampaknya langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

"Inflasi ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, kita ambil langkah cepat dan ter-

bagai aksi jangka pendek.

Dalam tiga bulan ke depan Pemprov Sumut menyiapkan 11 langkah cepat menurunkan harga komoditi penyumbang tertinggi. Langkah tersebut yaitu, membagikan secara gratis komoditi penyumbang inflasi, bundling beras SPHP harga murah dengan cabai merah, percepat program bantuan pangan, pasar murah, intervensi tataniaga, sidak pasar, monitoring distribusi pangan, memperkuat kerja sama antar daerah, menugaskan BUMD mengelola cabai dan bawang merah, antisipasi bahan pangan untuk program MBG, dan

kan PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) untuk aktif mengelola dan menyalurkan pasokan cabai, bawang, serta beras.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung menambahkan bahwa selain langkah cepat, Pemprov juga tengah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal dan memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir. Ia menjelaskan, BUMD pangan daerah akan didorong menjadi bagian dari ekosistem pangan strategis, bekerja sama dengan kelompok tani dan pemerintah kabupaten/



ukur agar harga-harga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil," ujar Gubernur Bobby Nasution, di Medan, usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi dengan Kemendagri secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Senin, 6 Oktober 2025.

Tekanan inflasi di Sumut terutama berasal dari komoditas pangan bergejolak seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Untuk menekan gejolak harga, Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah menyiapkan ber-

penetapan toko pantau inflasi.

Bobby Nasution menekankan langkah yang dijalankan mengikuti prinsip 4T, yaitu tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu. "Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya di lapangan," ungkapnya.

Gubernur juga menekankan bahwa penanganan inflasi tak cukup hanya dengan operasi pasar. Diperlukan sinergi lintas sektor, termasuk optimalisasi peran BUMD pangan daerah dalam menjaga ketersediaan stok komoditas utama. Dalam hal ini Bobby menugas-

kota untuk menjaga kesinambungan pasokan.

"Dengan cara ini, kita ingin Sumut tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, maka harga akan lebih terkendali," tambahnya.

Langkah tersebut juga diiringi dengan peningkatan koordinasi antara TPID Provinsi, BI, BPS, Bulog, dan Satgas Pangan, termasuk publikasi berkala melalui press release dan konferensi pers untuk menjaga komunikasi yang efektif dengan masyarakat. ●



MBG DAN INFLASI

Program Makan Bergizi Gratis menyumbang inflasi, masih bisa dimaklumi. Tapi, harapan terhadap MBG lebih tinggi lagi.

Sumatera Utara, provinsi dengan inflasi tahunan 5,2 persen dari September 2024 ke 2025 (year on year) menjadi yang tertinggi di Indonesia. Untuk inflasi dari bulan ke bulan, dari Agustus ke September 2025, Riau, tetangga sebelah selatan Sumut, tercatat menjadi yang tertinggi, mencapai 1,11 persen manakala provinsi lain pada periode yang sama masih di bawah satu persen.

"Secara nasional ternyata Riau mencatat inflasi bulanan (month to month) tertinggi. Inflasi nasional berada di angka 0,21 persen, sedangkan inflasi Riau 1,11 persen," ungkap Kepala Badan Pusat Statistik Riau Kepala BPS Riau, Asep Riyadi pada Jumat, 3 Oktober 2025.

Komoditas utama penyumbang inflasi bulanan di Riau pada September

2025 didominasi cabai merah dan emas perhiasan, diikuti bawang merah, beras, daging ayam ras, serta ayam hidup. Hal serupa juga terjadi di Sumut dengan kenaikan harga pangan yang bergejolak: cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam.

Nah, harga pangan yang bergejolak naik hingga menjadi penyumbang utama inflasi rupanya terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama daging ayam yang kerap menjadi pilihan bahan baku. Provinsi Sumut pun sudah mengantisipasi permintaan daging ayam dan bahan pangan lainnya terkait dengan MBG ini.

Khusus daging ayam, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatera Utara (Sumut) Zakir Syarif Daulay mengungkapkan, pada Juni lalu harga ayam sempat anjlok bahkan di bawah Harga Batas Pembelian (HBP). Untuk

mengatasi kondisi tersebut, pemerintah pusat bersama pelaku usaha mengambil kebijakan pembatasan DOC (day old chick, bibit ayam), dengan harapan harga ayam bisa kembali naik ke atas HBP sehingga peternak tidak merugi.

"Setelah itu, harga ayam memang kembali naik. Ditambah adanya program pemerintah seperti SPPJ serta berkembangnya program MBG, permintaan ikut meningkat. Mekanisme pasar ini memang tidak bisa kita halangi," kata Zakir.

Meski begitu, ia menekankan bahwa lonjakan harga masih dalam batas wajar. "Kenaikan ini memang sedikit berpengaruh ke inflasi, tapi kondisi masih terkendali," ujarnya.

Zakir juga menyebutkan, kebutuhan daging ayam di provinsi tetangga turut mempengaruhi harga di Sumut. "Kita

saling terhubung. Apa yang terjadi di daerah lain bisa berdampak ke Sumut, apalagi dengan meningkatnya kebutuhan pangan akibat program nasional,” tambahnya.

Namun demikian, ia memastikan ketersediaan pangan hewani di Sumut masih mencukupi. “Insya Allah ketersediaan daging ayam, sapi, maupun telur cukup. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir soal pasokan,” tegasnya.

Lebih lanjut ia berharap kenaikan harga ayam yang sudah terjadi tidak berlanjut pada bulan-bulan berikutnya. “Kita sudah lakukan antisipasi. DOC atau pembibitan ayam sudah kembali



Setelah itu, harga ayam memang kembali naik. Ditambah adanya program pemerintah seperti SPPJ serta berkembangnya program MBG, permintaan ikut meningkat.

normal, kerannya sudah dibuka lagi,” ungkapnya.

Toh dalam pandangan Direktur Kebijakan Publik Celios. Media Wahyudi Askar, penyediaan jutaan porsi makanan bergizi per hari terkonsentrasi di dapur umum berskala industri. Dapur-dapur ini memilih pasokan dari perusahaan besar dan tidak lagi membeli ayam dari pasar tradisional atau peternak rakyat.

Akibatnya, kata dia, pedagang kecil kehilangan pembeli, sementara stok ayam di pasar menipis dan harga melonjak. Menurut Media, harga daging ayam ras segar yang sebelumnya sekitar Rp35.000 per kilogram kini naik menjadi Rp38.000, bahkan ada yang menembus Rp50.000.

Menurut Media, sejak Juni 2025, harga ayam naik 9,3 persen, disusul ikan kembung 3,2 persen dan telur ayam 2,9 persen. “Peternak ayam dan



pedagang ayam di pasar tradisional sulit masuk ke rantai pasok MBG karena tidak bisa memenuhi volume dan standar kualitas. Skema MBG yang kini bertumpu pada dapur umum berskala besar harus segera dihentikan,” kata Media, dikutip dari siaran pers Celios, Jumat, 3 Oktober 2025.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional kelolaan Bank Indonesia mencatat rata-rata harga daging ayam (per kg) harian di pasar modern di beberapa provinsi tercatat Rp.44,77 ribu setelah sebelumnya pernah mencapai

Rp.45.950 per kg.

Pada hari yang sama, Badan Pangan Nasional mencatat, harga daging ayam ras di tingkat konsumen masih mencapai Rp45-47 ribu di beberapa provinsi seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Provinsi-provinsi ini lazim menerima pasokan dari daerah lain karena lebih mudah mendapat ikan laut maupun tawar sebagai alternatif.

Di Jawa, pada hari yang sama, harga ayam ras berkisar sekitar Rp36-39 ribu per kg. Harga tertinggi, Rp39.057 per

• INFO KHUSUS

kg tercatat di Jawa Barat. Sedangkan harga terendah, Rp36.245 per kg, tercatat di Jawa Timur.

Sedangkan di Sumut, Riau dan provinsi lain di Sumatera, harga daging ayam ras berkisar antara Rp32-40 ribu per kg. Harga tertinggi tercatat di Bangka Belitung sebesar Rp40.875 per kg. Sedangkan yang terendah, Rp32.346 per kg tercatat di Aceh.

Harga daging ayam ras yang menyumbang inflasi juga diakui oleh Badan Gizi Nasional (BGN), penyelenggara

jasnya.

Ia menambahkan, apabila dapur memasak dua kali dalam seminggu, maka dalam sebulan satu SPPG bisa menghabiskan sekitar 2.800 ekor ayam. "Kalau dua kali seminggu saja butuh 700 ayam, satu bulan berarti 2.800 ayam. Jadi kebutuhan ayam memang cukup meningkat di satu SPPG," kata Dadan.

Karena itu, ia menilai peningkatan harga ayam di pasaran wajar, terutama dengan jumlah SPPG yang terus bertambah di seluruh Indonesia. Hingga

orang itu banyak 4.000 (ekor ayam) dibutuhkan sekitar 8-10 hektar buat panen jagung yang bisa dipasok," ujarnya.

Ia pun mencontohkan kebutuhan pangan lain untuk memasok program MBG. Pada komoditas beras misalnya, Dadan menyebut setiap SPPG membutuhkan lima ton beras atau setara 10 ton gabah kering giling per bulan. Untuk mencapai produksi beras itu, dibutuhkan lahan 12 hektar.

"Estimasi dengan 24 hektar luas tan-



MBG. Namun, kenaikan tersebut justru membuka peluang besar bagi peternak lokal untuk tumbuh dan memperluas usahanya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Jadi, setidaknya perlu 350 kg ayam dan 3.000 butir telur per hari. Semakin banyak dapur SPPG, kian besar pula keperluan ayam dan telur untuk memenuhi standard menu harian penerima manfaat.

"Setiap kali masak ayam untuk 3.000 orang itu dibutuhkan 350 ayam. Kalau satu kilogram satu ayam, maka dibutuhkan 350 kilogram daging ayam,"

saat ini, BGN telah mengoperasikan 10.681 SPPG dan menargetkan 25.400 unit di akhir tahun 2025.

"Kalau dikalikan dengan jumlah SPPG yang ada, saya kira kebutuhan ayam kita akan segera meningkat. Dan kalau tidak diikuti dengan tumbuhnya peternak-peternak baru, kita akan kekurangan pasokan ayam maupun telur," ujarnya.

Lebih jauh lagi, Kepala BGN menerangkan sekitar 50 persen pakan ayam petelur berasal dari jagung. Dengan target 4.000 ekor ayam, Dadan menyebut membutuhkan sekitar 8-10 hektar lahan untuk menanam jagung.

"Nah 50 persen pakan dari ayam dan telur itu adalah jagung. Jadi untuk

am sekali setahun, atau 12 hektar jika ditanami dua kali setahun. Jadi satu SPPG akan membutuhkan minimal 12 hektar luas lahan untuk menghasilkan 24 ton luas panen setiap tahun," tambah Dadan.

Dadan menekankan bahwa kondisi tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Justru, menurutnya, program MBG telah menciptakan pasar baru yang menjanjikan bagi pelaku usaha peternakan, pakan ternak, hingga pertanian pendukungnya.

"Kenaikan kebutuhan ayam ini bukan masalah, tapi peluang. Karena ini menunjukkan adanya new demand yang bisa digarap oleh para peternak lokal," tegas Dadan.

la juga menjelaskan bahwa MBG secara tidak langsung mendorong kemandirian ekonomi di sektor pangan. Peralnya, 50 persen pakan ayam petelur berasal dari jagung, sehingga peningkatan permintaan ayam otomatis ikut menggairahkan produksi jagung di daerah.

“Kalau sebanyak 4.000 ayam petelur, kira-kira membutuhkan 18 hektar luas panen jagung, dan itu bisa dipasok oleh petani lokal,” ujarnya.

Toh hitung-hitungan Dadan masih

tual terkait peluncuran laporan Bank Dunia, East Asia and Pacific Economic Update, Selasa, 7 Oktober 2025.

Bank Dunia menyoroti, meski Indonesia berada di jalur reformasi yang positif, efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam memastikan bahwa subsidi benar-benar menasar kelompok yang membutuhkan. Program Makan Bergizi Gratis, yang digagas Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program subsidi yang mendapat per-

di masyarakat, terutama bagi mereka yang paling rentan,” ujar Mattoo.

Sedangkan dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update, Bank Dunia mencatat sebagian besar negara di kawasan ini memiliki tingkat angkatan kerja tinggi, yakni persentase penduduk usia kerja yang memiliki pekerjaan. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta menjamin kemudahan bagi generasi muda untuk mendapatkan pekerjaan layak.

“Masalahnya adalah kaum muda ke-



memerlukan pembuktian dalam penerapan atau eksekusinya. Tak kurang Bank Dunia yang menyoroti program MBG itu.

Chief Economist of the East Asia and Pacific Region World Bank Aadiya Mattoo, misalnya, mengemukakan kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan potensi memerlukan kesungguhan dalam penerapannya. “Dukungan berbentuk subsidi pangan, program makan bergizi, transportasi, dan energi. Tetapi, masalahnya, seringkali di negara-negara kawasan, seperti Indonesia, legislasinya ambisius, namun implementasinya lemah.” kata Mattoo dalam media briefing vir-

hatian khusus.

Sejak diluncurkan, MBG telah menjadi sorotan publik karena sejumlah persoalan, mulai dari kasus keracunan makanan, ketimpangan dalam distribusi pasokan pangan, hingga minimnya serapan anggaran. Meski realisasi anggarannya masih rendah, pemerintah berencana menaikkan alokasi MBG dalam APBN 2026 menjadi Rp 335 triliun. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pembiayaan serta kesiapan lembaga pelaksana di tingkat daerah.

“Program-program seperti MBG perlu dievaluasi tidak hanya dari sisi besaran anggaran, tetapi juga sejauh mana manfaatnya benar-benar terasa

sulit mencari pekerjaan, terutama di negara-negara seperti China dan Indonesia, satu dari tujuh orang tidak memiliki pekerjaan,” ujar Mattoo.

Dalam laporan yang sama, Bank Dunia mengidentifikasi lima sektor yang memiliki potensi tinggi dalam penciptaan lapangan kerja sekaligus ketahanan terhadap guncangan global: agribisnis, kesehatan, infrastruktur dan energi, manufaktur dan pariwisata. Tentu saja MBG termasuk di dalamnya.

Ringkasnya, penerapan MBG memerlukan pembuktian manfaat dari hulu hingga hilirnya, tak terkecuali menyerap tenaga kerja. Agar bukan hanya menyumbang inflasi yang bisa dimaklumi..●

MENCARI TITIK KESEIMBANGAN INFLASI

Sorotan terhadap tingkat inflasi hingga ke pelosok daerah berkaitan dengan perekonomian secara keseluruhan. Berapa standard tingkat inflasi yang menjadi patokan bersama?

Belakangan ini daging ayam sekalipun dapat menjadi masalah. Apalagi harga emas. Begitulah, jika permintaan barang atau jasa meningkat, harga cenderung naik. Maka, terjadilah inflasi.

Tersirat pula bahwa keinginan agar ekonomi bergairah sulit mengelakkan inflasi. Namun, inflasi yang tinggi apalagi tak terkendali, justru akan meredupkan kembali gairah perekonomian. Pada titik ini sorotan terhadap tingkat inflasi hingga ke pelosok daerah men-

jadi sangat relevan.

Ideal, memang, inflasi yang rendah dan lebih penting lagi, stabil terkendali, akan sangat menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Namun, berapa tingkat inflasi rendah dan stabil yang menjadi patokan seka-



rang.

Nah, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian punya jawaban. Harap maklum sudah bertahun-tahun Kemendagri di bawah Menteri Tito memperhatikan dinamika inflasi hingga ke pelosok daerah. Antara lain dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Menurut Pak Mendagri, Indonesia perlu mengendalikan inflasi di angka 2,5 persen plus minus 1 persen. Jadi, rentang kendali inflasinya berkisar antara 1,5 hingga 3,5 persen baik se-

cara bulanan maupun tahunan. "Alhamdulillah inflasi dari (pernah) 5,95 persen, sekarang inflasi kita terjaga di angka yang ditarget pemerintah, yaitu 2,5 persen plus minus 1 persen. Inflasi tahun ke tahun (yoy) September 2025 terhadap September 2024 adalah sebesar 2,65 persen," ungkap Mendagri Tito di acara Peluncuran Masterplan Produktivitas Nasional di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.

Menurut dia, rentang tingkat inflasi itu adalah titik keseimbangan agar

baik produsen maupun konsumen sama-sama diuntungkan. "Kenapa 2,5 persen plus minus 1 persen? Karena kita tidak hanya negara konsumen, tapi juga negara produsen," sambung Tito

la menjelaskan, bila inflasi terlalu rendah di kisaran 1,5 persen ke bawah, memang akan menyenangkan bagi masyarakat karena harga-harga murah. Namun, dampaknya berat bagi produsen seperti petani, nelayan, dan pelaku industri yang bisa kesulitan menutup biaya operasional.

"Jadi kalau angka 1,5 persen ke bawah rakyat atau konsumen senang, harga-harga barang murah. Tapi produsen, petani, nelayan, pabrik-pabrik kesulitan untuk menutup biaya operasional," ungkapnya.

Sebaliknya, bila inflasi naik di atas 3,5 persen, kondisi justru berbalik. Produsen memang diuntungkan karena harga jual naik, tetapi masyarakat kelas bawah akan terbebani oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. "Kalau di angka di atas 3,5 persen, ini produsen senang, nelayan, petani, pabrik senang. Tapi masyarakat konsumen akan kesulitan, terutama masyarakat kelas bawah," kata Tito.

Karena itu, menurut dia, target inflasi di angka 2,5 plus minus satu persen adalah titik ideal yang menjaga keseimbangan antara kepentingan kedua pihak. "Jadi kita jaga di angka 2,5 plus minus satu persen itu," ucapnya.

Tito mengemukakan pula, Kemendagri mengemban tugas dari Presiden RI untuk mengawasi pergerakan inflasi nasional yang berbasis pada pertumbuhan inflasi di daerah. Ya melalui pelaksanaan rapat koordinasi inflasi dengan seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia secara daring setiap minggunya.

Sebagai Koordinator Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sesuai amanat Keputusan Presiden (Keppres) No 23 Tahun 2017, Tito mengatakan Kemendagri konsisten memantau dan intervensi secara berkala setiap awal pekan. "Setiap Senin dari jam 8-11 pagi, setelah itu kita melakukan intervensi. Sehingga kita tahu daerah mana yang inflasinya tinggi, dan mana yang inflasinya rendah. Jadi kita berbasis daerah,



• INFO KHUSUS

yang inflasinya tinggi kita serang, dikeroyok ramai-ramai, tergantung isunya apa,” kata dia.

Ia mengisahkan pula, sehari sebelumnya, pada Senin, 6 oktober 2025, ia melaporkan angka inflasi 2,65 persen kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia pun menjelaskan penyebab angka inflasi naik dari 2,3 persen menjadi 2,65 persen.

“Kemarin saya bertemu Bapak Presiden, saya sampaikan, ‘Ini angka yang baik, masih dalam range target kita. Tapi kenapa terjadi kenaikan sedikit, itu karena harga daging ayam ras meningkat, ada kebijakan dari Mentan untuk melindungi peternak. Karena ongkos operasional mereka naik. Otomatis beliau menaikkan harga daging ayam ras dan DOC atau bibit ayam. Tapi ini masih under control,’” jelas Tito menirukan laporannya kepada Presiden.

Selain itu, Tito juga menyebut inflasi dipengaruhi kenaikan harga emas akibat geopolitik dan kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed. “Yang kedua, inflasi karena kenaikan harga emas. Kita tahu ada geopolitik, konflik, perang tarif antar negara, juga The Fed menurunkan suku bunganya, dan akibatnya kenaikan harga emas kurang lebih 40 persen, harga

tertinggi. Itu akibat seluruh dunia masyarakatnya investasi ke emas, termasuk Indonesia,” lanjut Tito.

Toh, tetap masih ada persoalan. Secara teoritis, inflasi yang terlalu rendah akan menghambat daya serap tenaga kerja. Saat inflasi tinggi, per-

yang selanjutnya meningkatkan daya beli masyarakat.

Sedangkan saat inflasi terlalu rendah, permintaan barang dan jasa melemah, sehingga produsen mengurangi produksi maupun penyerapan tenaga kerja. Ini yang dapat menyebabkan



mintaan barang dan jasa meningkat, mendorong produsen untuk meningkatkan produksi dengan merekrut lebih banyak pekerja. Hal ini dapat menurunkan tingkat pengangguran. Upah juga cenderung naik karena persaingan memperebutkan tenaga kerja,

tingkat pengangguran meningkat, angkatan kerja baru pun tak terserap.

Dalam konteks inilah Masterplan Produktivitas Nasional menjadi relevan. Kita bahas saja rencana induk terkait pekerja ini di lain kesempatan.

• Editor: GE



info indonesia

iNOVASI UNTUK NEGERI



INFO PASANG IKLAN
NUR AISAH
0815-1157-6312

IKLAN BACK COVER
RP 75.000.000
 IKLAN DISPLAY/HAL
RP 50.000.000
 IKLAN ADVERTORIAL/HAL
RP 65.000.000
 CENTER SPREAD
RP 80.000.000

*Kami Hadir
 Memberikan
 info Tersebut*

- ▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**
- ▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**
- ▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**
- ▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON UNTUK PARA PELANGGAN**



INOVASI UNTUK NEGERI
info indonesia

<https://infoindonesia.id>

●●● EDISI #60 OKTOBER 2025



BAHLIL LAHADALIA
**MENTERI
KESAYANGAN
PRABOWO**